



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN
KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013-2018**

SKRIPSI

Oleh :

**Ahmad Dalail
NIM 150210301011**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN
KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013-2018**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Ekonomi (S-1) dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

Ahmad Dalail
Nim 150210301011

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, pemilik seluruh kerajaan langit dan bumi, serta yang terkandung di dalamnya. *Alhamdulillah*, karena dengan kuasa-Nya, saya dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Shalawat dan salam tetap tucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Skripsi ini, saya persembahkan untuk :

- 1) Ayahanda Jainul Arifin dan Ibunda Indayanti yang dengan ikhlas mendidik, memberikan dukungan yang tak henti-hentinya, serta doa tulus yang selalu mereka panjatkan demi keberhasilan saya hingga saat ini;
- 2) Abahku Mohamad Holil beserta keluarga besarku terutama adikku Moh. Syarifudin Indrayani yang tiada hentinya memberikan doa, semangat serta dukungannya selama ini;
- 3) Bapak dan Ibu guru semasa TK sampai menengah atas, serta dosen saya yang telah memberikan arahan dalam proses belajar saya; dan
- 4) Almamater tercinta, Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jember.

MOTTO

Prioritaskan untuk meningkatkan pendapatanmu daripada harus mengurangi pengeluaran. Lebih penting untuk menumbuhkan semangatmu daripada menghapus impianmu.*)

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.**)



*Finansialku, “Robert T. Kiyosaki”, diakses <https://www.finansialku.com/50-kata-bijak-dan-kata-motivasi-keuangan-dari-robert-t-kiyosaki/>, pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 10.03 WIB

**Ekspektasia, “Lessing “, diakses <https://ekspektasia.com/motto-hidup/>, pada tanggal 1 Juni 2019 pukul 06.27 WIB

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Dalail

NIM : 150210301011

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018” adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juli 2019

Yang Menyatakan

Ahmad Dalail

NIM 150210301011

HALAMAN PERSETUJUAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Nama Mahasiswa : Ahmad Dalail
NIM : 150210301011
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Angkatan Tahun : 2015
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 03 Oktober 1997

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Sukidin, M.Pd.
Nip. 19660323 199301 1 001

Wiwin Hartanto, S.Pd., M.Pd
Nip. 19870924 201504 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Juli 2019

Tempat : Gedung 1 FKIP Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Sukidin, M.Pd
NIP. 19660323 199301 1 001

Wiwin Hartanto, S.Pd., M.Pd
Nip. 19870924 201504 1 001

Anggota I

Anggota II

Hety Mustika Ani, S.Pd, M.Pd
NIP. 19800827 200604 2 001

Dra. Sri Wahyuni, M.Si
NIP. 19570528 198403 2 002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jember

Prof. Drs. Dafik. M.Sc., P.hD
NIP.19680802 199303 1 004

RINGKASAN

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018”. Ahmad Dalail; 150210301011; 2019; 69 halaman; Program Studi pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah untuk mengelola pembangunan di daerah serta mengelola APBD, selain itu dengan adanya otonomi daerah diharapkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung maupun pelayanan yang tidak langsung, seperti pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, sehingga penyediaan barang publik dan pelayanan publik dapat lebih terjamin. Alokasi Belanja Modal dilandasi oleh kebutuhan daerah dari sarana dan prasarana, untuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik agar bisa meningkatkan pengalokasian Belanja Modal. Variabel yang berpengaruh terhadap pangalokasian Belanja Modal antara lain seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, yaitu perpaduan data *time series* dari tahun 2013-2018 dan data *cross section* dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari dokumen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian

Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan estimasi model *Fixed Effect Model* (FEM) dan bantuan program aplikasi EViews 9.0.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Prob* (*F-statistic*) sebesar $0,000000 < 0,05$. H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 sebesar 90,2918% sisanya sebesar 9,03% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pengaruh yang paling dominan (besar) di antara ketiga variabel bebas dalam penelitian ini yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh sebesar 0,937095 juta, artinya apabila ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 juta, maka Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 naik sebesar 0,937095 juta. Sedangkan pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 yakni 0,307210, artinya apabila ada kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar 1 juta, maka Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 naik sebesar 0,307210 juta. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 yakni 0,137066, artinya apabila ada kenaikan Dana Alokasi Khusus sebesar 1 juta, maka Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 naik sebesar 0,137066 juta.

PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018” guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak yang terkait. Maka dari itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Dafik, M.Sc., P.h.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
2. Dr. Sumardi, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Drs. Kayan Swastika, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Dra. Sri Wahyuni, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
5. Dr. Sukidin, M.Pd.,selaku Dosen Pembimbing I dan Wiwin Hartanto, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
6. Hety Mustika Ani, S.Pd, M.Pd., selaku Dosen Penguji I dan Dra. Sri Wahyuni, M.Si., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini;

7. Semua dosen-dosen FKIP Program Studi Pendidikan Ekonomi yang selama ini banyak membimbing serta memberikan ilmu kepada penulis sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan studi ini;
8. Seluruh pihak mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jember yang turut membantu dalam memberikan informasi dan pengumpulan data skripsi;
9. Sahabat seperjuanganku Adi, Bintang, Dika, Anjar, Ghofur, Bagus, Aditya, Agung, dan Faisal terima kasih telah menjadi tempat bercurah hati dan memberikan semangat serta memberikan pengalaman yang berkesan;
10. Septi Nuristiqomah yang selama ini selalu mendukung dan memberiku semangat yang tiada henti dalam proses mengerjakan skripsi ini;
11. Seluruh teman-teman Pendidikan Ekonomi angkatan 2015 terima kasih atas semangat dan kebersamaanya; dan
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan untuk terselesaikannya skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin

Jember, 15 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	9
2.2 Teori Akuntansi Keuangan Daerah	13
2.3 Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	14
2.3.1 Struktur APBD.....	16
2.3.2 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	17
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	18

2.5 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pengalokasian Belanja Modal.....	22
2.6 Dana Alokasi Umum (DAU).....	23
2.7 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal.....	25
2.8 Dana Alokasi Khusus	26
2.9 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal	27
2.10 Belanja Modal	27
2.8 Kerangka Berpikir	29
2.9 Hipotesis Penelitian.....	32
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian	34
3.3 Tempat Penelitian.....	35
3.4 Metode Pengumpulan Data	35
3.5 Definisi Operasional Variabel	36
3.6 Teknik Analisis Data	38
3.7 Uji Asumsi Klasik	41
3.7.1 Uji <i>Multikolinieritas</i>	41
3.7.2 Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	42
3.8 Estimasi Regresi dengan Data Panel.....	42
3.8.1 <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	43
3.8.2 <i>Random Effect Model (REM)</i>	43
3.9 Uji Signifikansi Statistik	45
3.9.1 Uji Signifikansi Parameter Parsial (t)	45

3.9.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (F)	46
3.9.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	47
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Data Pendukung	48
4.1.2 Hasil Pengujian	54
4.2 Pembahasan	60
BAB 5. PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

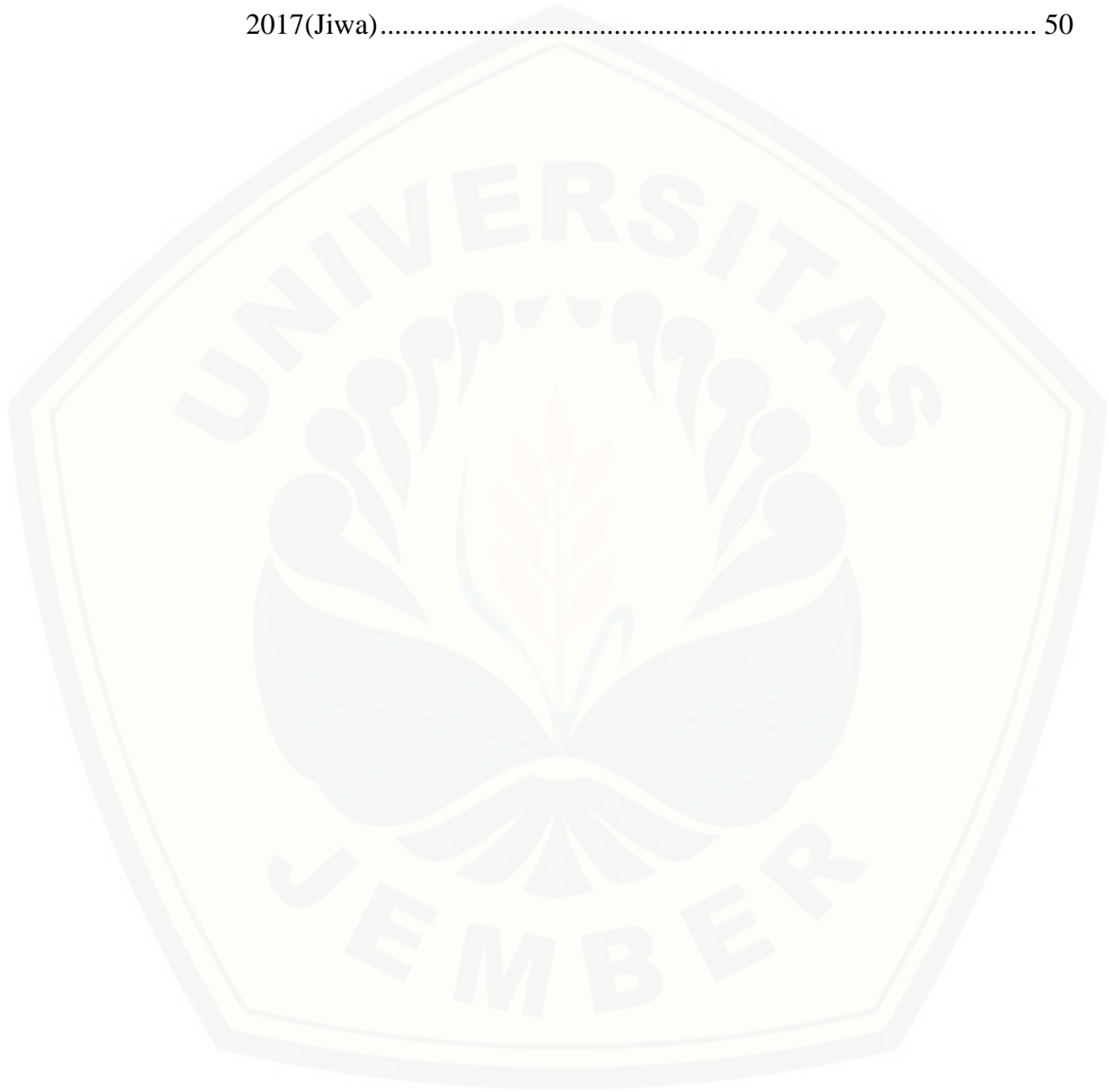
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 31
Gambar 2.2 Sistematika Pengujian dengan Program *EViews 9.0*..... 40



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4 1 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-
2017(Jiwa)..... 50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran PAD, DAU, DAK, dan Belanja Moda Provinsi Jawa Timur 2013–2018.....	1 5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah).....	51
Tabel 4.2 Dana Alokasi Umum (Juta Rupiah).....	52
Tabel 4.3 Dana Alokasi Khusus (Juta Rupiah).....	53
Tabel 4.4 Belanja Modal (Juta Rupiah)	53
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Multikolinieritas</i>	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Hausman</i>	55
Tabel 4.8 Hasil Regresi Data Panel dengan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	56
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	58
Tabel 4.11 Determinasi R^2	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Penelitian	70
Lampiran 2 Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2013	73
Lampiran 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2013-2018	125
Lampiran 4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 (Juta Rupiah).....	132
Lampiran 5 Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 (Juta Rupiah).....	134
Lampiran 6 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 (Juta Rupiah).....	136
Lampiran 7 Belanja Modal (BM) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 (Juta Rupiah).....	138
Lampiran 8 Hasil Uji <i>Hausman</i>	140
Lampiran 9 Hasil Uji <i>Multikolinieritas</i>	141
Lampiran 10 Hasil Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	141
Lampiran 11 Hasil Regresi dengan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	142
Lampiran 12 Surat Penelitian.....	144
Lampiran 13 Surat Konfirmasi dari DJPK.....	146
Lampiran 14 Lembar Konsultasi.....	148
Lampiran 15 Tabel Nilai Distribusi t	150
Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup.....	151

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia berkembang pesat seiring berjalannya waktu, hal ini terlihat dari ketetapan MPR yaitu Tap MPR No .XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 yang sekarang telah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, memberikan harapan baru terhadap munculnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat. Otonomi daerah memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan sedikit peran pemerintah pusat. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU tersebut adalah merupakan upaya memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang harmonis antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah untuk mengelola pembangunan di daerah dan mengelola APBD. Inovasi, kreativitas, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat (Adisasmita 2011:83), selain itu dengan adanya otonomi daerah, diharapkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung di berikan untuk masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung, seperti pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial

lainnya, sehingga penyediaan barang-barang publik dan pelayanan publik dapat lebih terjamin.

APBD adalah salah satu tolak ukur daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah, jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Saragih, 2003). Berdasarkan karakteristiknya, Belanja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja pemerintah daerah yang ada dalam APBD adalah kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Belanja yang semakin meningkat menyebabkan dana yang dibutuhkan besar juga, dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Belanja daerah dapat menjadi pedoman tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah, sehingga pengalokasian dana belanja daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah mengeluarkan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal pada APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Alokasi Belanja Modal dilandasi akan kebutuhan daerah dari sarana dan prasarana, baik untuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik, karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah diharapkan mengubah komposisi belanjanya menjadi lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2003:121). Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (dalam Jemparut dan Riduwan, 2017) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah sebaiknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini mengartikan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik atau Belanja Modal, agar bisa meningkatkan pengalokasian Belanja Modal, perlu diketahui variabel-

variabel yang berpengaruh terhadap pangalokasian Belanja Modal, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Menurut UU No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan dana Pemerintah Daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD, dalam pengelolaan anggaran dana, asas kemandirian menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab harus mampu menyediakan dana yang diperlukan yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanya dari sumber Pendapatan Asli Daerah (Adisasmita, 2011), dalam kewenangan tersebut, Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber keuangan agar memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah dapat meningkatkan atau mengoptimalkan investasi Belanja Modal pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang baik, dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan pengelolaan semua dana tersebut diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. Adanya perbedaan sifat dari perekonomian daerah dengan perekonomian nasional dan di antara kekuasaan Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan, akan menimbulkan pengaruh yang berbeda pula terhadap corak strategi program pembangunan daerah Haeruman dan Kuncoro (dalam Sun'an & Senuk, 2015). Perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah dapat menimbulkan beberapa akibat yang tidak menguntungkan jika Pemerintah Pusat tidak secara aktif campur tangan dalam kegiatan ekonomi, tingkat pembangunan yang berbeda antar berbagai daerah akan mengakibatkan hal

yang buruk pada corak pembangunan selanjutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Pusat mentransfer Dana Perimbangan untuk masing-masing daerah, salah satu Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum adalah anggaran dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah dan membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Adisasmita (2011:177) Dana Alokasi Umum bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan daerah, termasuk dalam pengertian tersebut adalah sebagai jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah di seluruh daerah dalam penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dana tersebut dapat digunakan pemerintah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Pemerintah Pusat memberikan wewenang pada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia. Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus, berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah anggaran dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan Dana Aloksi Khusus ditujukan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dana Alokasi Khusus dapat mempengaruhi Belanja Modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 47.799,75 km² dan jumlah penduduk Jawa Timur dari hasil proyeksi yaitu sebesar 39.292.972 jiwa pada tahun 2017, merupakan salah satu provinsi dengan jumlah Kabupaten dan Kota yang cukup besar yang terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten

dan 9 Kota (BPS Provinsi Jawa Timur 2018). Kondisi daerah di Jawa Timur sangat bervariasi, dengan perbedaan antara Kota atau Kabupaten yang relative kecil secara ekonomi tetapi secara wilayah cukup luas. Daerah di Jawa Timur secara garis besar terdiri dari daerah dengan basis industri yang kuat, seperti Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan sebagainya serta daerah dengan basis pertanian. Perbedaan kondisi yang bervariasi tentunya akan membuat pengaruh kepada sumber pendapatan dan juga belanja yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur 2013–2018

Tahun	Jumlah PAD (Rupiah)	Jumlah DAU (Rupiah)	Jumlah DAK (Rupiah)	Jumlah Belanja Modal (Rupiah)
2013	11.579.340.719.022	1.632.648.287.000	85.644.430.000	1.175.751.046.134
2014	14.442.216.534.959	1.866.548.185.000	101.875.970.000	1.207.456.633.374
2015	15.402.647.674.503	1.587.261.707.000	66.039.190.000	2.258.320.071.662
2016	15.817.795.024.797	1.672.878.372.000	5.516.240.624.514	2.150.594.111.043
2017	14.900.003.388.123	3.687.183.876.000	7.298.679.584.000	2.639.437.686.978
2018	15.675.894.291.960	3.813.411.928.000	7.150.849.653.000	2.846.847.344.082

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sampai 2018 hampir selalu mengalami peningkatan yang signifikan, Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1, meskipun pada tahun 2015 dan 2017 ada sedikit penurunan, tidak jauh berbeda Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi umum juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2015, dan Belanja Modal juga selalu mengalami peningkatan namun pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan mengikat kembali sampai tahun 2018.

Penentuan batas wilayah merupakan hal penting, dengan adanya batas wilayah antar daerah dapat mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Dengan adanya batas wilayah yang resmi akan diketahui sejauh mana batas status hukum,

tanggung jawab pemerintahan, perpajakan, hingga untuk menentukan luas area guna untuk menghitung potensi sumber daya, kepadatan penduduk hingga dana perimbangan daerah. Sehingga dapat mempengaruhi pada berapa besarnya pendapatan atau pengeluaran yang terjadi pada daerah tersebut. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti memilih Provinsi Jawa Timur sebagai obyek penelitian.

Alokasi proporsi belanja daerah pada Provinsi Jawa Timur saat ini memang menjadi fokus utama, hal ini dapat dilihat dari data laporan APBD yang dapat diakses pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang menyatakan “APBN merupakan instrumen kebijakan penting untuk mencapai tujuan nasional dan pelaksanaan program Nawacita. Pemerintah terus berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus prioritas pembangunan nasional pada 2018, yaitu: (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-pendapatan dan antar wilayah; serta (3) perluasan kesempatan kerja”.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun 2013 – 2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
2. Apakah secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Mengetahui apakah secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai pengembangan atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal, sehingga selanjutnya daerah otonom dapat mengembangkan dan membangun daerahnya dengan sumber pendanaan dan hasil kekayaan daerah masing-masing. Diharapkan konsep desentralisasi sesungguhnya dapat terwujud secepatnya dan Pemerintah daerah tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan kajian, terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal.

3. Bagi Peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan referensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal. Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat untuk penelitian topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat lanjutan, melengkapi, maupun menyempurnakan.

4. Bagi Peneliti

Sebagai pembelajaran melakukan penelitian, dan menambah pengetahuan serta pemahaman tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Skripsi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi Ekonomi.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi terdahulu yang dilakukan, peneliti mengutip hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Pengutipan penelitian terdahulu tersebut antara lain

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Akbarurizqillah Al Azhar dan Suwardi Bambang Hermanto (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	Berdasarkan hasil penelitian, Uji t variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t-hitung sebesar 37.443 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t-hitung sebesar 7.230 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai t-hitung sebesar 6.674 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
2	Maria Selcindya Jemparut dan Akhmad Riduwan	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana	Berdasarkan hasil penelitian, t hitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
(2017)		Alokasi Umum Pada Belanja Modal	signifikansi sebesar 0,000 dibawah $\alpha = 5\%$, artinya bahwa hipotesis pertama dapat diterima bahwa pengalokasian anggaran Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah. hipotesis pertama dari variabel independen memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga hipotesis kedua diterima dan dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).
3	Elita Susilawati dan Ikhsan Budi Riharjo (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah	Berdasarkan hasil penelitian, koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai <i>R Square</i> sebesar 0,644 hal ini berarti 64,4% variasi belanja langsung dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan sisanya 26,6 % dijelaskan sebab yang lain diluar model. Dari uji ANOVA atau <i>F-test</i> pada tabel 7, didapat <i>F</i> -hitung 63,246 dengan <i>p value</i> sebesar 0,000. Karena <i>p value</i> lebih kecil daripada alpha 0,05 maka model regresi ini bisa dipakai untuk menjelaskan alokasi belanja langsung. Dengan demikian, PAD dan DAU berpengaruh terhadap alokasi belanja langsung.
4	Puput Purpitasari dan Kurnia (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana	Berdasarkan hasil penelitian ini, Uji t menghasilkan pengaruh signifikan, dengan perhitungan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
		Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah	sebesar 39,761 dengan tingkat signifikan 0,000 yang kurang dari 0,05. Pengujian yang kedua dilakukan dengan menggunakan Uji Kelayakan Model mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah pada Kab/Kota di Jawa Timur dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah pada Kab/Kota di Jawa Timur dengan menggunakan Uji t mempunyai pengaruh signifikan, dengan perhitungan sebesar 22,941 dengan tingkat signifikan 0,000 yang kurang dari 0,05. Pengujian yang kedua dilakukan dengan menggunakan Uji Kelayakan Model mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah pada Kab/Kota di Jawa Timur dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
5	Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal	Berdasarkan hasil penelitian, Nilai t hitung DAU lebih kecil dari t tabel ($1,42 < 1,96$) dengan koefisien sebesar 0,0317, koefisien dan t bernilai positif dan dengan nilai korelasi sebesar 0,41 menandakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif namun secara statistik tidak signifikan. Dengan kata lain DAU parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Nilai t hitung PAD sebesar 6,11 lebih besar dari t tabel dengan koefisien sebesar 0,4636 dan bertanda positif dengan nilai korelasi sebesar 0,58. Hal tersebut berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap alokasi Belanja Modal dalam anggaran daerah pada tingkat $\alpha = 1\%$. Nilai t hitung SiLPA sebesar 6,62, lebih besar dari t tabel dengan koefisien sebesar positif 0,4287 dengan nilai korelasi sebesar 0,69. Hal tersebut menandakan bahwa besarnya Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan positif dalam pengalokasian Belanja Modal yang dilakukan oleh daerah pada tingkat $\alpha = 1\%$.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah populasi yang berbeda, populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2018. Metode penelitian yang digunakan

merupakan metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data yang di peroleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan data yang selalu di perbarui jika terjadi perubahan, sehingga data yang di peroleh lebih akurat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumen dan Studi Kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel melalui program Eviews 9 sebagai pengolah data. “Data panel (*pooled data*) adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu (rumah tangga, perusahaan, kabupaten/kota, dll) pada periode waktu tertentu” (Ekananda, 2015). Data panel (*pooled data*) merupakan penggabungan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* (deret waktu) merupakan runtun waktu yang digunakan dalam penelitian. Data *cross section* merupakan data lintas sektor atau individual yang menggambarkan perbedaan antara objek penelitian.

Penelitian yang akan dilaksanakan saat ini merujuk pada beberapa penelitian diatas dengan mengutip beberapa teori yang mengacu pada beberapa tahapan serta melihat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

2.2 Teori Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pmda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh eksternal (Halim & Kusufi, 2013). Pihak pihak eksternal entitas pmda tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Investor, kreditur, donator, analisis ekonomi, rakyat, dan pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pokok Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- f. Laporan Arus Kas (LAK)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Ketentuan pokok pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 165 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan pemerintah tersebut antara lain:

- a. Prinsip transparansi serta akuntabilitas tentang penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD, pengelolaan, kas, tata cara pelaporan, pengawasan internal otoritas dan sebagainya, serta merupakan pedoman bagi sistem dan prosedur pengelolaan;
- b. Pedoman laporan pertanggungjawaban tentang pelayanan yang dicapai, biaya satuan komponen kegiatan, dan standar akuntansi pemerintah daerah, serta presentase jumlah penerimaan APBD untuk membiayai administrasi umum dan pemerintahan umum.

Penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna dan berpedoman pada peraturan pemerintah.

2.3 Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintahan daerah membagi kepengurusan keuangan menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pada pemerintah daerah terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam “pengurusan umum” dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada “pengurusan khusus”, bagian ini akan menjelaskan secara singkat APBD sebagai inti pengurusan umum keuangan daerah, Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Mamesah (dalam Halim & Kusufi, 2013) menyatakan bahwa APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan daerah pemerintah daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud. Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada era orde baru. Sebelumnya, yaitu pada era orde lama, terdapat pula definisi APBD menurut Wajong (dalam Halim & Kusufi, 2013) APBD merupakan rencana pekerjaan keuangan (*financial work plan*) yang di buat untuk suatu jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislative (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran tadi, di era pra-reformasi, bentuk dan susunan

APBD mengalami perubahan 2 kali, lalu pada era (pasca)-reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan cukup mendasar. Bentuk APBD didasarkan pertama kali pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sejalan dengan perubahan yang terjadi bentuk APBD sekarang ini didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan Daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif (Halim & Kusufi, 2013), untuk itu dalam bentuk yang baru APBD terdiri atas 3 bagian yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan adalah kategori baru yang belum muncul pada APBD di era pra-reformasi, adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif dengan memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah, hal itu sesuai

dengan definisi pendapatan sebagai hak pemerintah daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak pemerintah daerah, selain itu dalam APBD mungkin terdapat surplus atau defisit. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Seperti yang ada pada APBN, istilah dan prosedur pada APBD dapat berubah atau bervariasi., dengan adanya revisi peraturan perundangan hal tersebut sangat mungkin di rubah atau direvisi.

Dari beberapa kutipan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas serta disetujui bersama oleh pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tertentu.

2.3.1 Struktur APBD

Menurut Adisasmita (2011:44) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan, maksud dari satu kesatuan adalah dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

- a. Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah disusun menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Belanja Daerah. Belanja Daerah disusun menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, serta Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis belanja maksudnya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan Belanja Modal/pembangunan.
- c. Pembiayaan. Pembiayaan disusun berdasarkan sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah seperti sisa lebih

perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan asset Daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran seperti pembayaran hutang pokok

2.3.2 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya, pada operasionalisasinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009, belanja daerah adalah suatu bagian dari pengeluaran daerah, selain pembiayaan daerah yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi dalam pencapaian hasil dari input yang direncanakan sehingga pemerintah daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah,

Klasifikasi Belanja daerah menurut jenisnya dikategorikan menjadi dua yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi adalah belanja yang manfaatnya atau akan terpakai habis dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan selama tahun berjalan. Sedangkan Belanja Modal merupakan belanja yang bermanfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya material. Penentuan tingkat materialitas belanja perlu dituangkan dalam Peraturan Kepala daerah. (Ratmono & Sholihin, 2015) menyatakan jenis-jenis belanja diantaranya :

- a. Belanja Operasi. terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang
 - 3) Belanja Bunga
 - 4) Belanja Subsidi
 - 5) Belanja Hibah
 - 6) Belanja Bantuan Sosial
 - 7) Belanja Bantuan Keuangan

- b. Belanja Modal. terdiri dari :
- 1) Belanja Tanah
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan
 - 4) Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya
- c. Belanja Tak terduga

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 diartikan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Halim & Kusufi (2013:101) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Sedangkan menurut Bratakusuma dalam Azhar dan Hermanto (2017) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang berasal dari daerah bersangkutan untuk membiayai kegiatan daerah tersebut. Jadi pendapatan asli daerah merupakan pendapatan atau penerimaan yang didapatkan dari suatu daerah yang berasal dari sumber kekayaan daerah itu sendiri.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah “Iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang serta dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”

Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak provinsi dan Kabupaten atau Kota menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah :

- 1) Jenis Pajak Provinsi
 - a) Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g) Pajak Parkir

Selain pajak tersebut, daerah masih memungkinkan menetapkan pajak lainnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, dengan syarat :

- 1) Tidak bersifat retribusi
- 2) Terletak di wilayah Kabupaten yang bersangkutan
- 3) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

- 4) Tidak menjadi objek pajak pusat maupun pajak provinsi
 - 5) Potensinya memadai
 - 6) Memperlihatkan aspek keadilan, serta
- b. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Sumber pendapatan lainnya yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran dari jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Saragih (2003:64) retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak jenis retribusi, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam berdasarkan obyeknya. Menurut UU No 34 Tahun 2000 obyek retribusi terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum, merupakan retribusi dari jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan.
 - 2) Retribusi jasa usaha, merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menerapkan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 - 3) Retribusi perizinan tertentu, merupakan retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin pada orang pribadi maupun badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Salah satu sebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat didalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 84 diatur bahwa daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda). Sesuai dengan kewenangannya setiap Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya. Upaya dan usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah semata-mata hanya kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh swasta atau masyarakat itu sendiri.

Undang-undang yang menjadi dasar Pendirian Perusahaan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Tujuan Pendirian Perusahaan Daerah menurut ketentuannya yakni “untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

d. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah bisa digunakan sebagai biaya belanja daerah serta dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan sesuai peraturan yang berlaku. Alternatif memperoleh pendapatan dapat dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

2.5 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pengalokasian Belanja Modal

Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sebagai daerah otonomi dipengaruhi dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang dihasilkan, akan semakin besar juga kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan sebagai peningkat pelayanan publik serta meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui Belanja Modal (Solikin, 2007).

Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Halim & Kusufi, 2013).

Azhar dan Hermanto (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Temuan ini bisa mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan Belanja Modal. Hal ini sesuai PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi Belanja Modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga jika Pemerintah daerah ingin meningkatkan Belanja Modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah daerah harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

2.6 Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Pengertian DAU

Dana Alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diberikan sepenuhnya kepada daerah, Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Kota Makassar 2002 (dalam Adisasmita, 2011:175)

Dana Alokasi umum bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diberikan pada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat, serta merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bratakusmanto dan Solihin (dalam Halim & Kusufi, 2013:175).

Dari beberapa kutipan di atas maka peneliti menyimpulkan Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana Pemerintah pada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dasar Hukum Dana Alokasi Umum (DAU) :

- 1) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
- 2) PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

b. Alokasi Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Besaran Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25 % dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi serta daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten/Kota (Adisasmita, 2011).

Dana Alokasi Umum terdiri dari :

- 1) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
- 2) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Provinsi dan Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DKI Jakarta sebagai Daerah Provinsi dapat menerima kedua jenis Dana Alokasi Umum tersebut. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam APBN, dalam hal terjadi perubahan kewenangan di antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, presentase Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diatas disesuaikan dengan perubahan tersebut, penyesuaian persentase tersebut di tetapkan dalam APBN. Perubahan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi.

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Adisasmita, 2011).

2.7 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal

Pelaksanaan desentralisasi di terapkan dengan cara pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana perimbangan ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan adalah dampak adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana perimbangan keuangan guna memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui Belanja Modal (Solikin, 2007).

Hasil penelitian Azhar dan Hermanto (2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan Belanja Modal. Penelitian lain yaitu Jemparut dan Riduwan (2017) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah Belanja Modal dipengaruhi dengan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah pusat. Hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa belanja daerah khususnya Belanja Modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi Belanja Modal juga meningkat

2.8 Dana Alokasi Khusus

Salah satu unsur dari Dana Pembangunan adalah Dana Alokasi Khusus dialokasikan agar membantu pembiayaan kebutuhan tertentu yaitu, merupakan program nasional khusus yang dilaksanakan di daerah. Kegiatan atau program yang dibiayai Dana Alokasi Khusus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBD.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Adisasmita (2011:182) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu, yang di maksud sebagai daerah tertentu adalah daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, yang menyebutkan bahwa mekanisme perhitungan pengalokasi Dana Alokasi Khusus dilakukan melalui 2 tahapan yaitu: (1) penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus, Dan (2) penentuan besaran pengalokasi Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Dana alokasi khusus adalah dana yang diambil dari APBN diberikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga merupakan prioritas nasional seperti: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi, pendidikan, kesehatan, dll.

2.9 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan pemerintah pusat dengan memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Menurut UU No.33 Tahun 2004 urusan pemerintah pusat diserahkan pada pemerintah daerah disertai penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dana perimbangan adalah bentuk hubungan keuangan antar pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar dan Hermanto (2017)) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.

2.10 Belanja Modal

Menurut Halim (2004) tentang pengertian Belanja Modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1): Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c

digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Dari kedua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan belanja pemerintah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya merupakan pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas serta kualitas aset.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002, Belanja Modal dibagi menjadi:

- a. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- b. Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Belanja Modal dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok utama (Syaiful, 2006):

- a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah yang di maksud siap pakai.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan, peningkatan kapasitas

peralatan, dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan sampai peralatan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan, pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, atau peningkatan pembangunan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan jalan irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian pembangunan, pembuatan, serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.11 Kerangka Berpikir

Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan adanya hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus terhadap Belanja Modal.

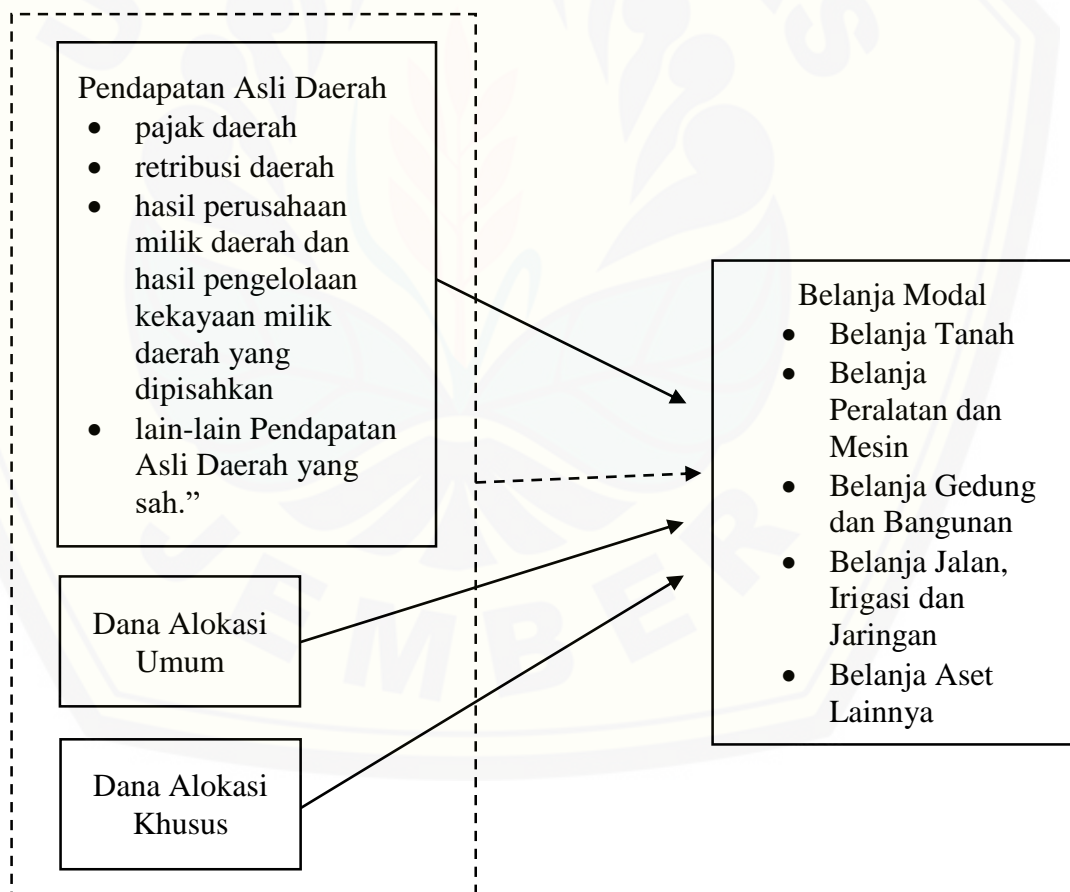
Pada bagian pertama menjelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi Belanja Modal pada APBD. Semakin baik Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin besar pula alokasi Belanja Modalnya.

Yang kedua menjelaskan hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap alokasi Belanja Modal. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan Dana Alokasi Umum untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena Dana Alokasi Umum juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, semakin kecil Dana Alokasi Umum yang diperoleh semakin kecil pula alokasi Belanja Modal daerah tersebut.

Yang terakhir menjelaskan hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Modal. Salah satu unsur dari Dana Pembangunan adalah Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu yaitu, merupakan program nasional khusus yang dilaksanakan di daerah. Kegiatan/program yang dibiayai Dana Alokasi Khusus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBD. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebutkan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Oleh karena itu, semakin kecil Dana Alokasi Khusus yang diperoleh semakin kecil pula alokasi Belanja Modal daerah tersebut.

Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

2.12 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka hipotesis dari penelitian ini tentang. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai berikut :

H₁ :Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018.

H₂ : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian akan membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini dalam bab ini meliputi rancangan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, tempat penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis data, dan pengujian.

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian berisi rencana penelitian yang akan dilakukan, sehingga hasil yang diperoleh mampu menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatory yaitu menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat, serta pengaruh antara dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat melalui pengujian.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel (*pooled data*) yaitu penggabungan antara data *time series* (runtun waktu) yaitu dari tahun 2013-2018 dan *cross section* (data silang) yaitu data Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penggunaan data panel ini bertujuan untuk menerangkan pengaruh variabel X terhadap Y yang sifatnya kompleks dan terjadinya dalam waktu yang panjang. Sehingga, data panel akan menjawab fenomena tersebut dengan detail. Penelitian ini merupakan penelitian empiris untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal yang dilihat melalui data 29 Kabupaten dan 9 Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama enam tahun, yaitu dari tahun 2013-2018. Data bersumber dari dokumen Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dinyatakan valid.

3.3 Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di provinsi Jawa Timur dengan pertimbangan PAD, DAU, dan DAK yang semakin meningkat dan belanja modal yang tergolong tinggi dan berfluktuatif, serta ketersediaan data yang memadai dalam penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah-langkah atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data secara valid. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode studi dokumen dan wawancara.

a. Pengumpulan Data Sekunder

Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Menurut Moh. Nazir (2003) data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dan tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut yakni data runtut waktu (*time series*), berupa APBD kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2013-2018. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui website resminya <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>, dari laporan realisasi APBD per tahun 2013 sampai 2018 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

b. Metode Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta literatur lain yang mendukung, seperti: jurnal, prosiding, dan hasil penelitian lainnya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Laporan Realisasi APBD tahunan 29 Kabupaten dan 9 Kota

dari dokumen Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 hingga 2018.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberi suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1998). Dalam penelitian ini definisi operasional meliputi variabel-variabel serta indikator sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan dengan (Halim & Kusufi, 2013) :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Dimana :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dan Laba Perusahaan Daerah

LPS = Lain lain Pendapatan yang Sah

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang

bersangkutan. Porsi daerah Kabupaten/Kota tersebut di atas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Rumus Dana Alokasi Umum untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu (Adisasmita, 2011:117) :

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Jumlah DAU Suatu} \\ \text{Daerah Kab / Kota} \end{array}} \times \frac{\text{(Bobot Daerah Kabupaten/Kota)}}{\text{(Jumlah bobot dari seluruh Kabupaten/Kota)}}$$

Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan rumus di atas dilakukan oleh Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sekretariat Bidang Perimbangan keuangan pusat dan daerah juga menyusun dan menjaga kemutakhiran data yang merupakan variabel dalam rumus tersebut, dengan demikian Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai instansi yang objektif dan independen dapat menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang dimaksud kegiatan khusus disini adalah kegiatan yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Jadi besaran Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

4) Belanja Modal

Adalah pengeluaran untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator variabel ini diukur dengan (Ratmono & Sholihin, 2015) :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja} \\ & \text{Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan} \\ & \text{Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel melalui program Eviews 9 sebagai pengolah data. “Data panel (*pooled data*) adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu (rumah tangga, perusahaan, Kabupaten/Kota, dll) pada periode waktu tertentu” (Ekananda, 2015). Data panel (*pooled data*) merupakan penggabungan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* (deret waktu) merupakan runtun waktu yang digunakan dalam penelitian. Data *cross section* merupakan data lintas sektor atau individual yang menggambarkan perbedaan antara objek penelitian. (Ekananda, 2015) Secara teoritis terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan data panel

- 1) Semakin banyaknya jumlah observasi yang dimiliki bagi kepentingan estimasi parameter populasi yang membawa akibat positif dengan memperbesar derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan menurunkan kemungkinan kolinearitas antar variabel bebas.
- 2) Dimungkinkannya estimasi masing-masing karakteristik individu maupun karakteristik menurut waktu secara terpisah

Rumus fungsi *time series* yaitu:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

Sedangkan rumus fungsi *cross section*, yaitu:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

Sehingga, data panel merupakan gabungan dari kedua fungsi tersebut, sehingga ditulis

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it} ; i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Keterangan:

T : banyaknya waktu

N : banyaknya observasi

N x T : banyaknya data panel

Penelitian ini menempatkan Belanja Modal sebagai fungsi dari laju PAD, DAU, dan DAK, sehingga persamaan fungsinya sebagai berikut:

$$BM_{it} = f(PAD_{it}, DAU_{it}, DAK_{it})$$

Berdasarkan fungsi di atas, ditransformasikan ke dalam model ekonometrika sebagai berikut:

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal Provinsi Jawa Timur

PAD : Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur

DAU : Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Timur

DAK : Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Timur

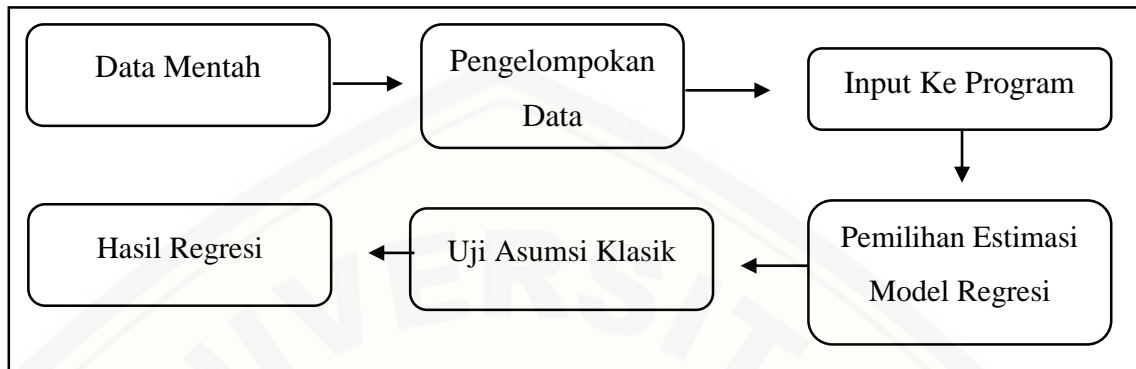
i : *cross section*

t : *time series*

β_0 : *konstanta*

e : *error term*

Langkah-langkah dalam pengujian data melalui program EViews 9.0 di antaranya, yaitu:



Gambar 2 2 Sistematika Pengujian dengan Program *EViews 9.0*

- 1) Data mentah, merupakan data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 yang berasal dari dokumen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 2) Data diurutkan di program Ms. Excel terlebih dahulu secara vertikal dari atas ke bawah, sesuai tahun terkecil ke tahun terbesar, yaitu masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan urutan tahun 2013-2018, serta urutan secara horizontal yaitu dimulai dari nama Kabupaten/Kota, tahun, variabel Y, variabel X1, variabel X2, dan variabel X3. Dikarenakan program EViews 9.0 tidak dapat membaca angka yang memiliki tanda koma (,), maka tanda tersebut diganti dengan tanda titik (.).
- 3) Buka program Eviews, kemudian input data yang sebelumnya telah disusun di Ms. Excel. Dikarenakan ada perbedaan satuan variabel, maka dilakukan log pada masing-masing data variabel.
- 4) Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji *multikolinieritas* dan uji *heteroskedastisitas*.
- 5) Pemilihan model estimasi dilakukan dengan uji *hausman*, pada uji hausmen Pemilihan FEM atau REM dapat dilihat dari hasil prob. *Cross-section random*, jika nilainya $> 0,05$, maka model yang terpilih *Random Effect*

Model. Namun, jika nilainya $< 0,05$ maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol dan menerima *Fixed Effect Model* sebagai model terbaik.

- 6) Jika telah dilakukan uji *hausman*, maka untuk melihat hasil regresi sebenarnya sudah terlihat sejak pemilihan efek spesifikasi. Jika estimasi model yang terpilih, maka hasil uji t, nilai F, dan R^2 dapat dibaca pada tabel yang telah dilakukan pengujian sebelumnya, misal yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*, maka hasilnya sudah terjawab sebelumnya. Besarnya koefisien masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dengan mengklik pada *cross-section Effect*.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Penggunaan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam analisis regresi mensyaratkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk menghasikan parameter yang valid. Apabila uji asumsi klasik yang dilakukan terpenuhi, maka OLS *estimator* dari alpha dan beta adalah BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) Mukhlis dan Simanjuntak (2017:15). *Best* mengandung arti varian dari *estimator* OLS adalah minimal lebih kecil dari varian *estimator* yang lain. *Linier* memiliki arti bahwa apabila hubungannya tidak *linier*, maka metode OLS tidak dapat diterapkan. *Unbiased* memiliki arti bahwa nilai ekspektasi dari alpha dan beta sama dengan nilai sebenarnya yang menggambarkan hubungan antara X dan Y. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan dua pengujian, yaitu: uji *multikolinieritas* dan uji *heteroskedastisitas*.

3.7.1 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar dua (atau lebih) variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang baik yaitu jika tidak adanya korelasi antar variabel bebas (independen). *Multikolinieritas* dapat terjadi pada variabel data *time series*,

sehingga dengan perpaduan dengan *cross section* dapat mengurangi terjadinya *multikolinearitas*. *Multikolinieritas* menyebabkan *standart error* koefisien regresi yang diduga akan besar, sehingga nilai t statistik menjadi kecil dan model tidak signifikan. *Multikolinieritas* terjadi karena nilai R^2 kecil, semua nilai t variabel tidak signifikan, dan nilai F tinggi.

Adanya *multikolinearitas* dapat dideteksi dengan cara melihat nilai *R-square* pada setiap variabel independen. Apabila nilai *R-square* pada variabel independen lebih kecil daripada *R-square* hasil regresi, maka data pada variabel independen tidak terjadi *multikolinearitas*. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai *R-square* pada variabel independen lebih besar daripada *R-square* hasil regresi, maka data pada variabel independen terjadi *multikolinearitas*. Data yang baik apabila nilai korelasi antar variabel independen di bawah 0,8 (Gujarati, 2006:68).

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas, dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model persamaan yang baik apabila terjadi homoskedastisitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, salah satunya dengan melakukan Uji Glejser (Gujarati, 2006:93). Apabila nilai t-statistik $>$ t-tabel atau nilai prob $\leq \alpha = 5\%$, maka ada heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika t-statistik $<$ t-tabel atau nilai prob $> \alpha = 5\%$, maka tidak ada heteroskedastisitas.

3.8 Estimasi Regresi dengan Data Panel

Pemilihan estimasi model yang tepat yang akan digunakan dalam penelitian ini, dilakukan pengujian melalui dua model, yaitu *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

3.8.1 *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini menggunakan variabel semu (*dummy*) untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya. Hal ini didasarkan pada kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain, Winarno (2015:9.15). Efek tetap di sini maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Model FEM dapat ditulis sebagai berikut (Ekananda, 2015:389):

$$y_{it} = \beta'_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

Intercept adalah bagian dari X yang memiliki nilai 1. Estimasi terhadap nilai *intercept* α_i berkorelasi dengan ε_{it} . Argumen ini menjelaskan bahwa metode efek tetap (*fixed*) diasumsikan ε_{it} memiliki korelasi dengan *regressor* x_{it} .

3.8.2 *Random Effect Model* (REM)

Metode ini merupakan terbalikan dari model FEM, yaitu estimasi pada data panel yang memungkinkan adanya hubungan antara waktu dan antar individu. REM memiliki μ_i sebagai elemen *random* yang dapat menangkap karakteristik dari individu atau kelompok. Elemen *random* sebagai pemisah efek individu dari regressor terpisah dari α , sehingga metode efek random diasumsikan ε_{it} tidak memiliki korelasi dengan regressor x_{it} .

Model REM dapat ditulis sebagai berikut (Ekananda, 2015:389):

$$y_{it} = \beta'_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Estimator REM selanjutnya memasukkan elemen $(\mu_i + \varepsilon_{it})$ sebagai residu dalam struktur matriks Σ . Model ini juga dikenal sebagai *Error Component Model* (ECM) dalam literatur lain.

Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan FEM dengan REM. Apabila model FEM yang dinyatakan lebih baik, maka model tersebut yang akan

dipakai dalam analisis data. Berikut pengujian untuk menentukan model yang terbaik.

a. Uji *Hausman-Test*

Menurut Greene (dalam Ekananda 2015:389) menjelaskan bahwa perbedaan antara FEM dan REM yaitu pada posisi α untuk menangkap keberagaman dari variabel dependen. Perbedaannya dapat dilihat dari:

- 1) Metode efek *random* diasumsikan ε_{it} tidak memiliki korelasi dengan *regressor* X_{it} .
- 2) Metode efek tetap (*fixed*) diasumsikan ε_{it} memiliki korelasi dengan *regressor* X_{it} .

Sebelum melakukan estimasi pemilihan model REM atau FEM, maka digunakan metode *rule of thumb* yang dibuat oleh Judge dkk (dalam Ekananda, 2015:389) dalam bukunya “*Introduction to the Theory and Practice of Econometrics*” yang menerangkan bahwa:

- 1) Bila T besar sedangkan N kecil maka hasil *Fixed Effect* dan *Random Effect* tidak jauh berbeda. Pemilihan pada umumnya didasarkan pada kemudahan perhitungan, yaitu *Fixed Effect*.
- 2) Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan dapat berbeda secara signifikan. Apabila diyakini bahwa N yang dipilih dalam penelitian diambil secara acak, maka *Random Effect* harus digunakan. Sebaliknya apabila diyakini bahwa N yang dipilih dalam penelitian tidak diambil secara acak, maka *Fixed Effect* harus digunakan.

Koefisien hasil dari metode *Fixed Effect* dan *Random Effect* akan berbeda karena perbedaan asumsi pada kedua metode tersebut. FEM menganggap *varians error* dari observasi satu dengan yang lainnya dianggap konstan, sedangkan pada REM diasumsikan berbeda. Akibatnya dapat terjadi perbedaan pengambilan keputusan ketika melihat signifikansi dari variabel-variabel independen yang terdapat dalam model. Model ekonometrika yang paling sering digunakan dan

dianggap lebih baik daripada metode yang lain ketika menentukan FEM atau REM, yaitu dengan Uji *Hausman*.

Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect* lebih baik daripada *Fixed Effect*

H_1 : *Fixed Effect* lebih baik daripada *Random Effect*

Pemilihan FEM atau REM dapat dilihat dari hasil prob. *Cross-section random*, jika nilainya $> 0,05$ (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikan atau α), maka model yang terpilih *Random Effect Model*. Namun, jika nilainya $< 0,05$ maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol dan menerima *Fixed Effect Model* sebagai model terbaik.

3.9 Uji Signifikansi Statistik

Uji signifikansi merupakan sebuah prosedur yang dilakukan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol. Pengujian signifikansi dilatarbelakangi oleh pengujian statistik (*estimator*) dan distribusi sampling dari statistik yang dinyatakan hipotesis nol. Keputusan yang akan diambil mengenai untuk menerima ataupun menolak H_0 didasarkan pada data yang ada. Uji signifikansi statistik terdiri dari tiga pengujian, yaitu uji signifikansi parameter parsial (t), uji signifikansi parameter simultan (F), dan uji koefisien determinasi (R^2).

3.9.1 Uji Signifikansi Parameter Simultan (F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel independen secara keseluruhan (simultan) memengaruhi variabel dependen ataukah tidak. Hipotesis yang digunakan yaitu:

1. H_0 : $b_1, b_2, b_3 = 0$, artinya semua variabel independen tidak mampu memengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.
2. H_1 : $b_1, b_2, b_3 \neq 0$, artinya semua variabel independen mampu memengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{1 - R^2/(N - 1)}$$

Keterangan:

k : jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N : jumlah observasi

Kriteria pengujian yang digunakan pada tingkat signifikansi 5% sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

3.9.2 Uji Signifikansi Parameter Parsial (t)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara satu per satu (*individual*) dan menganggap variabel lain konstan.

$$t = \frac{\beta_1}{S(\beta_1)}$$

Keterangan:

t : pengujian secara parsial

β_1 : besarnya perubahan dari variabel bebas

$S(\beta_1)$: *standart error* atau taksiran kesalahan

Apabila t hitung lebih kecil daripada t tabel dan $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung lebih besar daripada t tabel dan $\alpha = 5\%$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.9.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel dapat menjelaskan variabel dependennya. Semakin tinggi nilai R^2 (mendekati 100%), maka semakin tinggi kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang sempurna dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model $0 < R^2 < 1$, sehingga kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang lebih kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan-kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.
- b. Nilai R^2 yang mendekati satu, berarti kemampuan-kemampuan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Belanja Modal) dan secara parsial, masing-masing variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Yang artinya apabila semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh suatu daerah maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang akan di alokasikan oleh daerah tersebut; 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Yang artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar pula Belanja Modal yang dapat di alokasikan oleh daerah tersebut; 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Yang artinya semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar pula Belanja Modal yang dapat di alokasikan oleh daerah tersebut.

5.2 Saran

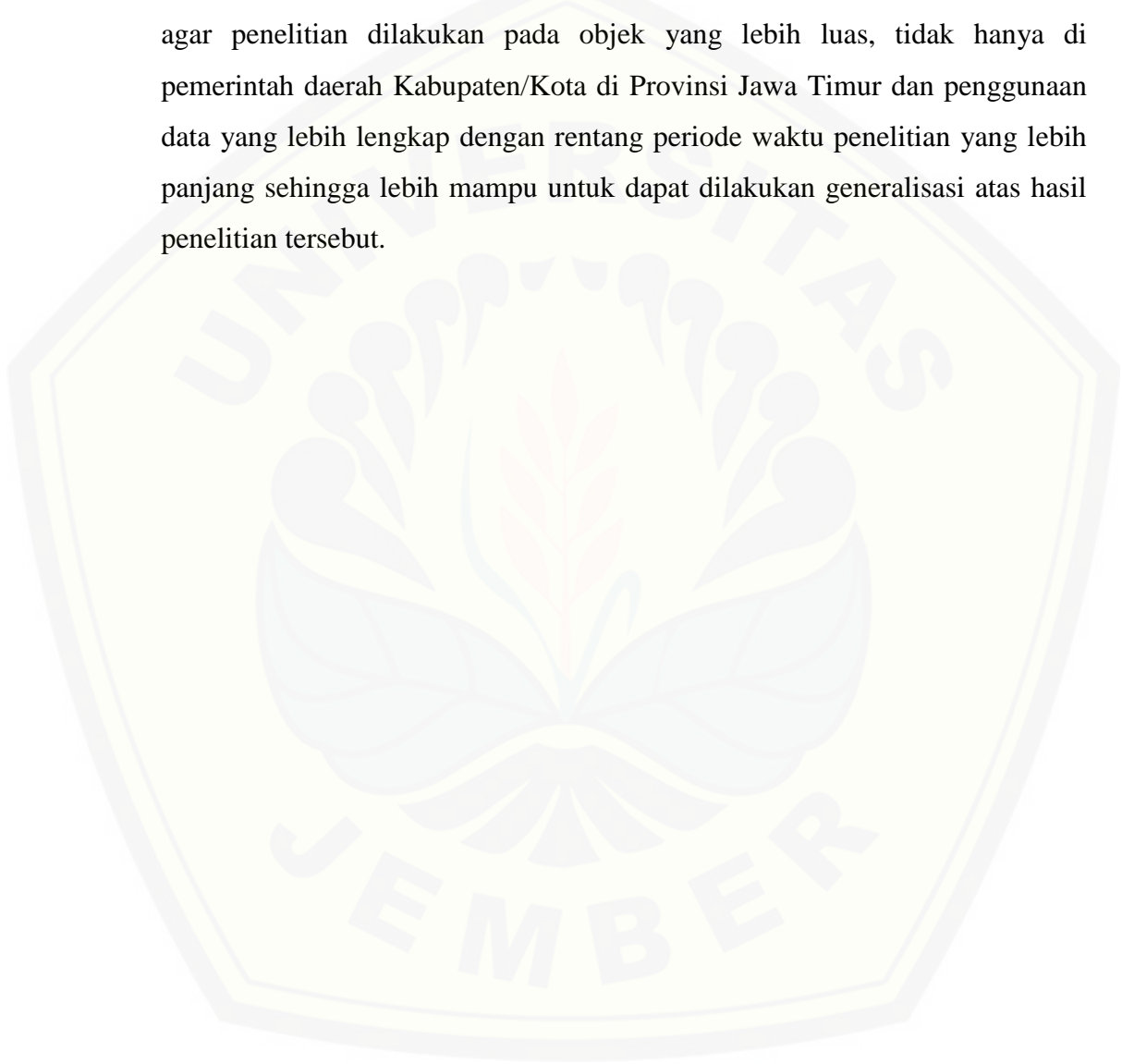
1. Rekomendasi bagi pemerintah

Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerahnya. Hal ini dikarenakan dengan pendapatan asli daerah yang melimpah maka pemerintah daerah akan lebih optimal dalam mengalokasikan pendapatannya pada sektor belanja modal yang didalamnya mencakup

infrastruktur dan sarana prasarana tanpa tergantung pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus,

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian yang serupa, disarankan agar penelitian dilakukan pada objek yang lebih luas, tidak hanya di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan penggunaan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.

BPS. 2018. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018*. Surabaya: BPS Pusat

Ekananda, M. (2015). *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Gujarati, D. N. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Andi, Yogyakarta

Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Basis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sun'an, M., & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews 9*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Jurnal

Al Azhar, A., & Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6 (8): 1-15.

Solikin, Ikin. (2007). Hubungan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan belanja modal di jawa barat. *Jurnal Akuntansi Riset*, 1 (2): 165-177.

Jemparut, M. S., & Riduwan, A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6 (9): 1-18.

Purpitasari, P., & Kurnia. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4 (11): 1-16.

Siswanto, D., & Kusnandar. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi*, 15 (1): 1-20

Susilawati, E., & Riharjo, I. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen*, 3 (8): 1-16.

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia. 1998. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998. Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 1998, No .XV. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004. Tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah Sekretariat Negara. Jakarta.

Skripsi

Farah M Y. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang

FITRIA M S. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat). Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama. Bandung.

Internet

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Perekonomian Indonesia dan RAPBN 2018*. Jakarta. <https://www.kemenkeu.go.id/rapbn2018>. [Diakses pada 11 September 2018].

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Data Keuangan Daerah Mulai 2006*. Jakarta. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. [Diakses pada 15 September 2018].

Lampiran 1 Matrik Penelitian

Matrik Penelitian

Judul	Permasalahan	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Hipotesis
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018	1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal 2. Apakah secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap	1. Variabel bebas(X): - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus 2. Variabel terikat(Y) - Belanja Modal	1. Pendapatan Asli Daerah: - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan - Lain-lain Pendapatan yang Sah 2. Dana Alokasi Umum : - Perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh	Data APBD kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2013-2018. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia	1. Jenis penelitian kuantitatif eksplanatory. 2. Tempat penelitian yaitu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 3. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen (data sekunder) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan	1. Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara

	<p>Belanja Modal ?</p>		<p>daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan</p> <p>3. Dana Alokasi Khusus : -Besaran Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN</p> <p>4. Belanja Modal: -Belanja Tanah -Belanja Peralatan dan Mesin</p>		<p>Republik Indonesia</p> <p>4. Metode analisis data menggunakan data panel (penggabungan cross section dan times series).</p> <p>5. Uji asumsi klasik: uji <i>multikolinearitas</i> dan uji <i>heteroskedastisitas</i> .</p> <p>6. Estimasi model yaitu: PLS, FEM, dan REM. Dilakukan dengan <i>hausman test</i>.</p> <p>7. Uji Statistik dilakukan dengan</p>	<p>parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013- 2018.</p>
--	----------------------------	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none">-Belanja Gedung dan BangunanBelanja Jalan, Irigasi dan Jaringan-Belanja Aset Lainnya		uji t, uji F, dan determinasi R^2 .	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--



Lampiran 2 Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2013

No	Daerah	Pendapatan	PAD	Pajak daerah	Retribusi daerah
1	Prov. Jawa Timur	17.411.309.058.022	11.579.340.719.022	9.404.933.622.357	106.213.770.752
2	Kab. Bangkalan	1.405.788.455.073	92.722.219.766	17.089.402.540	27.109.855.385
3	Kab. Banyuwangi	1.917.058.035.069	183.235.877.414	65.939.965.334	28.650.551.431
4	Kab. Blitar	1.604.229.567.580	115.670.863.817	21.856.652.835	20.565.238.382
5	Kab. Bojonegoro	2.024.348.269.284	215.766.157.632	58.309.466.701	38.127.664.114
6	Kab. Bondowoso	1.266.838.948.992	79.559.722.884	11.206.732.325	19.862.949.933
7	Kab. Gresik	1.840.556.214.829	502.767.029.904	287.204.002.798	68.748.761.969
8	Kab. Jember	2.366.370.839.532	308.376.581.786	95.188.144.409	44.192.346.021
9	Kab. Jombang	1.567.610.980.537	185.091.678.240	36.927.594.068	32.329.180.044
10	Kab. Kediri	1.790.936.818.007	203.212.445.366	96.638.092.384	23.065.628.457
11	Kab. Lamongan	1.674.655.717.105	161.087.916.085	34.882.026.901	29.725.601.395
12	Kab. Lumajang	1.299.318.897.389	112.406.824.133	21.601.343.403	21.937.809.267
13	Kab. Madiun	1.182.864.757.088	83.428.636.445	16.112.921.546	16.216.136.259
14	Kab. Magetan	1.225.384.220.297	87.859.707.871	13.796.586.343	23.049.578.924
15	Kab. Malang	2.529.685.862.152	262.267.260.455	95.918.841.193	45.314.153.759
16	Kab. Mojokerto	1.498.185.198.717	219.013.234.739	120.684.456.139	40.453.510.897
17	Kab. Nganjuk	1.559.541.595.674	153.130.115.173	19.600.066.015	19.387.701.357
18	Kab. Ngawi	1.414.456.951.798	85.636.138.389	16.826.150.653	16.095.652.437
19	Kab. Pacitan	1.061.397.988.848	62.988.926.126	9.053.156.097	18.399.845.514
20	Kab. Pamekasan	1.219.849.024.309	89.462.536.536	12.250.921.869	19.020.284.067
21	Kab. Pasuruan	1.819.738.370.147	278.165.169.902	166.109.566.065	41.994.753.930
22	Kab. Ponorogo	1.452.191.618.349	134.097.320.781	39.533.040.335	16.210.063.952
23	Kab. Probolinggo	1.381.935.052.366	108.513.200.489	20.438.494.720	25.976.527.795
24	Kab. Sampang	1.102.952.871.615	66.415.376.671	8.428.671.412	37.372.312.244
25	Kab. Sidoarjo	2.695.270.157.665	858.433.670.218	524.764.658.686	90.778.249.918
26	Kab. Situbondo	1.109.471.305.727	78.043.407.932	17.188.209.720	16.014.432.520
27	Kab. Sumenep	1.496.942.367.710	97.052.073.113	10.564.664.181	23.233.517.732
28	Kab. Trenggalek	1.206.677.943.038	77.799.518.146	10.930.561.913	25.757.640.217
29	Kab. Tuban	1.526.016.153.881	227.120.525.358	133.770.276.947	19.241.521.369
30	Kab. Tulungagung	1.774.874.063.728	174.981.706.538	29.775.702.288	19.110.755.509
31	Kota Blitar	612.551.692.286	72.853.545.668	12.370.826.110	8.048.422.555
32	Kota Kediri	979.946.713.954	144.562.729.327	57.840.761.516	9.631.747.602
33	Kota Madiun	809.078.381.918	96.011.481.200	34.432.024.109	17.116.760.622
34	Kota Malang	1.524.846.569.429	317.772.985.191	238.499.748.162	38.460.785.953
35	Kota Mojokerto	568.900.569.597	74.944.029.536	23.417.626.748	9.783.744.298
36	Kota Pasuruan	576.598.456.068	66.110.651.059	20.543.481.890	14.713.809.127
37	Kota Probolinggo	682.356.282.136	78.355.777.788	20.951.122.357	11.870.773.952
38	Kota Surabaya	5.235.293.716.914	2.791.580.050.710	2.154.652.323.798	229.680.153.172
39	Kota Batu	553.618.189.649	59.544.940.728	44.853.946.415	4.718.663.733

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Daper	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Dana Alokasi Umum
332.020.394.956	1.736.172.930.958	2.773.894.813.266	1.055.602.096.266	1.632.648.287.000
1.469.873.061	47.053.088.781	995.527.404.699	112.261.892.699	778.024.112.000
14.141.339.289	74.504.021.360	1.313.865.318.226	82.372.387.226	1.154.495.171.000
1.573.086.737	71.675.885.864	1.088.237.985.072	73.617.883.072	944.297.542.000
14.802.382.868	104.526.643.950	1.475.724.380.378	553.156.843.378	876.021.914.000
3.465.620.367	45.024.420.259	897.073.140.840	63.585.836.840	752.776.704.000
19.586.929.857	127.227.335.280	996.197.113.935	142.187.422.935	804.903.511.000
11.411.667.411	157.584.423.945	1.588.896.753.256	96.881.881.256	1.417.603.982.000
2.448.620.039	113.386.284.088	1.060.053.279.863	96.238.306.863	920.097.938.000
7.806.455.665	75.702.268.860	1.216.746.375.039	90.983.489.039	1.056.481.076.000
19.416.139.659	77.064.148.131	1.139.467.107.964	105.456.239.964	958.344.988.000
2.843.081.228	66.024.590.235	933.471.353.007	60.946.140.007	828.524.528.000
4.327.439.681	46.772.138.958	847.604.077.548	62.322.687.548	734.152.390.000
3.542.419.034	47.471.123.571	867.309.906.662	59.508.145.662	761.637.391.000
12.007.868.773	109.026.396.729	1.700.485.365.220	148.938.981.220	1.439.234.034.000
3.950.299.420	53.924.968.283	950.827.549.420	82.983.320.420	832.266.682.000
3.450.319.618	110.692.028.182	1.072.429.653.231	84.730.119.231	928.265.611.000
8.583.105.909	44.131.229.390	1.039.217.660.505	71.944.950.505	896.052.870.000
2.259.920.570	33.276.003.947	756.837.409.646	57.606.486.646	647.293.403.000
1.709.430.959	56.481.899.640	864.973.186.637	65.291.189.637	702.610.217.000
2.729.213.042	67.331.636.865	1.207.233.668.045	137.122.324.045	992.689.474.000
1.072.259.770	77.281.956.723	1.016.758.344.123	60.528.483.123	890.922.311.000
5.087.363.982	57.010.813.992	1.002.296.861.098	91.067.128.098	848.994.313.000
6.757.511.290	13.856.881.726	872.277.740.417	83.650.526.417	683.242.704.000
23.451.697.099	219.439.064.515	1.311.016.195.099	152.154.775.099	1.104.580.340.000
4.292.216.221	40.548.549.471	839.722.211.740	65.745.895.740	692.549.026.000
10.975.656.674	52.278.234.526	1.172.824.731.883	176.065.942.883	917.539.019.000
3.814.941.320	37.296.374.696	865.666.372.488	62.877.085.488	737.814.627.000
9.465.934.352	64.642.792.690	1.013.336.747.881	114.763.665.881	849.399.312.000
2.848.627.527	123.246.621.215	1.150.452.158.043	82.463.824.043	996.300.694.000
865.904.542	51.568.392.462	434.688.185.289	49.307.449.289	355.673.006.000
587.390.769	76.502.829.440	701.013.438.199	108.070.739.199	562.943.089.000
9.440.747.581	35.021.948.888	556.621.076.555	54.983.424.555	474.093.362.000
16.571.050.907	24.241.400.169	863.736.860.965	86.734.213.965	746.686.937.000
3.075.784.188	38.666.874.304	419.223.180.215	45.381.463.215	354.452.407.000
4.952.521.992	25.900.838.050	425.181.775.634	46.163.342.634	353.127.853.000
739.526.619	44.794.354.860	495.412.228.850	48.536.474.850	414.534.284.000
111.967.697.969	295.279.875.771	1.460.891.497.629	270.937.496.629	1.160.025.693.000
2.027.452.696	7.944.877.883	446.587.901.437	48.793.825.437	374.362.261.000

Dana Alokasi Khusus	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Hibah	Dana darurat	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya
85.644.430.000	3.058.073.525.734	397.258.179.934	-	-
105.241.400.000	317.538.830.608	99.811.668.550	-	43.039.396.890
76.997.760.000	419.956.839.429	411.010.663	-	95.561.380.266
70.322.560.000	400.320.718.691	-	-	71.873.238.191
46.545.623.000	332.857.731.274	-	898.000.000	71.514.220.274
80.710.600.000	290.206.085.268	825.400.091	-	39.128.918.697
49.106.180.000	341.592.070.990	-	-	124.619.733.990
74.410.890.000	469.097.504.490	481.647.500	-	101.453.794.490
43.717.035.000	322.466.022.434	1.101.409.750	-	76.372.776.932
69.281.810.000	370.977.997.602	761.309.000	-	86.764.936.228
75.665.880.000	374.100.693.056	-	-	76.671.573.056
44.000.685.000	253.440.720.249	-	-	58.474.888.262
51.129.000.000	251.832.043.095	-	-	52.766.344.095
46.164.370.000	270.214.605.764	-	-	58.998.481.950
112.312.350.000	566.933.236.477	-	-	127.284.469.477
35.577.547.000	328.344.414.558	82.975.000	-	80.186.011.558
59.433.923.000	333.981.827.270	444.296.925	-	76.941.933.345
71.219.840.000	289.603.152.904	-	-	54.149.804.904
51.937.520.000	241.571.653.076	1.925.000	-	34.123.870.076
97.071.780.000	265.413.301.136	761.640.000	-	78.917.777.136
77.421.870.000	334.339.532.200	503.662.675	-	89.069.270.525
65.307.550.000	301.335.953.445	-	-	56.106.850.342
62.235.420.000	271.124.990.779	391.063.500	-	51.056.674.598
105.384.510.000	164.259.754.527	472.252.507	-	30.490.373.020
54.281.080.000	525.820.292.348	-	-	218.723.546.389
81.427.290.000	191.705.686.055	361.837.300	16.717.505.000	44.685.358.755
79.219.770.000	227.065.562.714	1.669.092.300	-	41.582.079.985
64.974.660.000	263.212.052.404	2.000.000.000	-	44.264.340.470
49.173.770.000	285.558.880.642	898.000.000	-	76.047.580.642
71.687.640.000	449.440.199.147	2.000.000.000	-	81.468.829.647
29.707.730.000	105.009.961.329	-	-	46.030.980.329
29.999.610.000	134.370.546.428	-	-	49.201.611.428
27.544.290.000	156.445.824.163	-	-	37.301.512.163
30.315.710.000	343.336.723.273	17.756.000.000	-	109.145.826.273
19.389.310.000	74.733.359.846	-	-	32.176.161.785
25.890.580.000	85.306.029.375	-	-	36.698.357.933
32.341.470.000	108.588.275.498	-	-	43.315.480.498
29.928.308.000	982.822.168.576	-	-	622.818.370.575
-	47.485.347.485		-	7.473.834.485

Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	Lain-lain	Belanja	Belanja Tidak Langsung
2.660.815.345.800	-	-	16.738.657.227.159	12.127.124.091.743
158.740.743.000	-	15.947.022.168	1.431.497.631.931	907.931.796.402
293.368.228.000	30.616.220.500	-	1.886.309.069.851	1.179.565.578.627
276.727.595.500	-	51.719.885.000	1.637.252.053.174	1.131.250.998.511
236.525.556.000	-	23.919.955.000	2.034.120.195.584	1.147.081.422.411
177.907.456.000	72.343.065.000	1.245.480	1.266.305.195.495	776.251.182.533
199.836.702.000	17.135.635.000	-	1.897.270.106.456	992.715.498.549
345.099.902.500	-	22.062.160.000	2.348.129.104.082	1.530.229.361.841
225.489.404.000	19.030.455.000	471.976.752	1.559.047.056.627	1.026.658.376.568
271.386.615.000	-	12.065.137.374	1.595.444.481.821	1.122.957.674.105
246.212.819.000	-	51.216.301.000	1.606.782.530.256	1.116.989.671.472
181.945.527.000	-	13.020.304.987	1.237.250.864.103	906.093.363.285
170.282.584.000	-	28.783.115.000	1.140.996.797.668	797.857.052.446
211.159.024.500	-	57.099.314	1.188.654.360.771	889.613.133.642
370.878.002.000	-	68.770.765.000	2.440.509.395.392	1.598.440.236.702
181.961.233.000	-	66.114.195.000	1.432.529.154.200	921.994.353.353
256.595.597.000	-	-	1.486.896.745.684	1.038.354.319.990
217.699.223.000	17.754.125.000	-	1.353.881.705.136	946.839.616.457
172.525.413.000	34.920.445.000	-	1.036.980.098.890	724.455.198.735
138.585.209.000	-	47.148.675.000	1.167.571.677.040	850.874.297.379
222.755.724.000	-	22.010.875.000	1.739.245.818.047	1.127.934.141.237
235.057.842.000	-	10.171.261.103	1.396.914.654.794	1.132.494.443.074
196.793.327.000	-	22.883.925.681	1.329.410.577.152	912.880.061.366
101.595.223.000	-	31.701.906.000	1.085.328.587.395	710.027.248.545
281.796.428.000	-	25.300.317.959	2.569.817.000.142	1.557.566.312.570
129.940.985.000	-	-	1.150.103.067.653	701.730.331.744
158.956.296.000	24.719.335.000	138.759.429	1.421.813.451.772	945.189.277.154
193.892.007.000	-	23.055.704.934	1.164.834.490.082	839.017.514.882
196.127.355.000	-	12.485.945.000	1.489.827.940.912	1.011.492.620.583
311.416.144.500	-	54.555.225.000	1.680.332.359.804	1.242.424.864.957
58.978.981.000	-	-	594.594.934.115	329.201.014.549
81.492.920.000	3.676.015.000	-	871.479.638.834	489.841.023.299
117.120.867.000	2.023.445.000	-	775.087.201.814	419.409.660.407
191.569.752.000	-	24.865.145.000	1.486.368.766.886	851.263.919.969
40.428.194.000	-	2.129.004.061	511.091.545.446	277.297.358.200
45.910.773.000	2.696.898.442	-	552.338.988.276	297.419.728.944
58.181.950.000	7.090.845.000	-	655.932.038.460	335.262.153.415
360.003.798.001	-	-	5.057.279.664.345	2.309.125.269.018
40.011.513.000	-	-	568.468.908.109	324.254.908.744

Belanja Pegawai TL	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
2.690.428.814.773	5.108.753.406	-	5.138.580.999.438	164.802.381.505
815.183.268.233	-	-	60.622.239.536	2.079.879.000
1.005.725.339.435	-	-	94.690.869.952	11.270.125.000
959.366.258.673	-	-	115.570.028.800	3.721.361.000
937.549.323.042	-	209.000.000	27.389.868.540	19.533.615.000
655.196.822.581	-	600.000.000	43.710.255.067	6.670.053.727
706.915.344.010	329.156.539	-	107.818.513.200	16.870.050.000
1.320.232.887.227	8.744.465	-	66.726.801.563	38.738.296.500
841.131.549.537	16.068.497.195	-	86.724.676.066	5.322.850.000
1.003.156.843.102	91.998.511	-	14.508.202.720	24.350.665.173
930.796.185.193	2.006.201.716	-	49.742.064.061	24.842.448.300
744.657.040.994	5.487.605	-	88.015.853.766	8.764.834.901
700.091.156.095	7.414.705	363.030.000	27.243.346.181	11.337.911.426
778.885.766.966	-	-	52.344.448.454	5.354.935.000
1.326.448.684.146	-	-	85.708.808.180	66.234.873.200
818.483.238.187	1.944.442	-	23.221.808.000	12.580.116.000
921.425.257.195	-	-	48.389.956.350	1.170.811.000
848.166.495.342	6.437.144	-	23.369.720.000	5.652.740.000
607.673.757.744	-	-	24.769.472.900	4.544.127.410
650.175.115.911	2.041.838	-	127.931.585.622	30.330.687.658
928.530.385.168	-	-	94.269.706.121	12.324.463.100
930.856.906.211	-	-	120.618.938.763	7.618.048.000
753.237.130.042	-	-	57.485.605.975	19.829.420.350
573.933.449.252	-	-	71.645.379.963	27.805.798.990
1.256.762.207.746	-	-	96.542.699.428	61.860.121.347
619.282.087.404	-	-	37.477.962.940	8.488.500.000
781.443.146.179	-	-	95.522.755.500	5.227.312.000
736.223.412.778	-	481.261.300	46.951.995.279	2.802.526.750
831.275.361.827	974.482	-	74.355.491.430	23.392.683.850
1.074.079.062.716	1.053.606.518	-	78.707.549.935	18.847.753.500
285.368.629.488	-	-	29.782.772.220	13.737.150.096
433.860.233.046	-	-	33.478.908.352	21.937.183.976
377.924.830.928	-	-	19.145.410.060	21.844.516.419
767.298.084.806	36.157.841	-	83.046.361.500	129.250.000
247.916.864.831	-	-	27.363.793.419	1.518.750.000
257.402.875.474	-	-	28.119.626.000	9.937.089.150
301.273.207.632	-	-	22.000.794.406	10.509.120.000
2.049.262.468.475	-	-	253.316.709.085	853.703.500
261.241.902.427	-	-	37.689.967.512	8.016.903.305

Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Belanja Tidak Terduga	Belanja Langsung	Belanja Pegawai L
3.081.718.245.832	986.232.679.029	60.252.217.760	4.611.533.135.416	-
-	29.622.409.633	424.000.000	523.565.835.529	-
1.023.802.850	66.855.441.390	-	706.743.491.224	44.112.292.750
5.726.262.538	46.450.319.500	416.768.000	506.001.054.663	-
1.076.494.800	160.146.928.337	1.176.192.692	887.038.773.173	-
-	69.463.894.963	610.156.195	490.054.012.962	27.841.842.809
-	160.020.833.800	761.601.000	904.554.607.907	120.755.307.751
886.584.593	101.755.513.493	1.880.534.000	817.899.742.241	-
-	77.236.032.470	174.771.300	532.388.680.059	80.028.032.548
6.051.592.299	72.290.056.300	2.508.316.000	472.486.807.717	-
2.557.386.436	107.045.385.766	-	489.792.858.784	-
-	62.510.525.744	2.139.620.276	331.157.500.818	-
969.089.400	57.797.634.639	47.470.000	343.139.745.222	-
52.170.057.262	857.925.960	-	299.041.227.129	-
14.631.182.317	103.721.015.227	1.695.673.632	842.069.158.690	-
8.310.915.529	59.396.331.195	-	510.534.800.847	-
27.903.519.445	39.370.379.000	94.397.000	448.542.425.694	-
576.346.800	68.421.877.171	646.000.000	407.042.088.679	18.183.369.996
3.300.666.461	82.534.550.520	1.632.623.700	312.524.900.155	36.427.365.750
1.780.000.000	39.326.990.750	1.327.875.600	316.697.379.661	-
43.346.700.000	47.390.543.942	2.072.342.906	611.311.676.810	-
1.369.638.860	69.115.832.900	2.915.078.340	264.420.211.720	-
-	73.339.886.979	8.988.018.020	416.530.515.786	-
-	35.820.815.341	821.805.000	375.301.338.850	-
42.274.714.015	100.104.209.034	22.361.000	1.012.250.687.572	-
-	35.420.850.977	1.060.930.423	448.372.735.909	-
-	61.718.842.475	1.277.221.000	476.624.174.618	29.964.859.974
3.295.446.363	48.602.688.312	660.184.100	325.816.975.200	-
11.562.842.729	70.901.732.965	3.533.300	478.335.320.329	-
67.535.375.321	860.688.468	1.340.828.500	437.907.494.847	-
-	312.462.745	-	265.393.919.566	-
-	564.697.925	-	381.638.615.535	79.733.436.605
-	494.903.000	-	355.677.541.407	40.926.987.003
73.314.450	663.728.700	17.022.672	635.104.846.917	-
-	487.949.950	10.000.000	233.794.187.246	-
-	1.960.138.320	-	254.919.259.332	70.225.904.973
-	622.972.777	856.058.600	320.669.885.045	65.612.242.153
5.088.082.959	604.305.000	-	2.748.154.395.327	-
16.718.600.000	456.035.500	131.500.000	244.213.999.366	-

Belanja Barang dan jasa	Belanja Modal	Pembiayaan	Penerimaan	SiLPA TA sebelumnya
3.435.782.089.282	1.175.751.046.134	1.212.675.810.785	1.753.509.144.119	1.153.509.144.119
227.623.001.449	295.942.834.080	113.533.581.921	131.865.179.963	115.335.621.389
257.770.995.465	404.860.203.009	196.931.722.469	201.931.722.469	201.772.632.469
175.187.970.862	330.813.083.801	141.596.247.148	143.596.247.148	142.669.268.568
571.411.480.492	315.627.292.681	363.653.566.220	398.485.066.220	386.607.524.376
211.067.522.577	251.144.647.576	96.091.909.951	96.211.341.951	74.766.776.855
366.033.201.747	417.766.098.409	235.946.731.139	249.199.940.539	249.199.940.539
339.322.344.929	478.577.397.312	285.644.500.802	286.439.279.890	286.344.134.890
235.387.735.592	216.972.911.919	226.904.720.247	231.904.720.247	214.067.716.949
180.204.547.101	292.282.260.615	234.891.816.135	266.088.042.205	248.404.996.253
249.721.086.302	240.071.772.482	57.326.297.240	108.355.241.506	86.063.877.506
168.101.662.089	163.055.838.729	164.721.383.941	166.797.759.406	145.697.973.559
157.625.020.871	185.514.724.351	117.395.792.916	118.521.686.974	97.377.943.740
167.975.464.332	131.065.762.797	99.940.783.273	115.256.783.273	92.972.848.273
405.567.656.162	436.501.502.528	105.440.315.408	123.134.944.547	123.124.944.547
280.308.297.692	230.226.503.155	187.065.601.689	197.098.335.845	197.098.335.845
209.159.819.779	239.382.605.915	155.743.041.130	158.743.041.130	156.287.361.747
199.622.617.127	189.236.101.556	96.658.146.240	104.766.510.615	104.369.029.415
143.242.808.806	132.854.725.599	47.316.292.447	48.768.292.447	48.439.392.447
170.605.521.143	146.091.858.518	146.584.700.198	157.407.250.323	157.242.822.723
364.063.843.880	247.247.832.930	181.925.899.262	185.655.821.916	185.326.956.400
153.572.070.405	110.848.141.315	63.871.761.818	65.871.761.818	65.494.424.718
205.270.787.216	211.259.728.570	108.855.533.744	112.712.304.394	99.519.632.644
119.928.418.725	255.372.920.126	93.121.541.955	93.121.541.955	92.121.541.955
493.567.850.052	518.682.837.520	358.838.088.239	369.082.088.239	360.723.769.348
183.801.741.013	264.570.994.896	123.188.888.140	128.588.888.140	127.645.485.684
225.284.994.203	221.374.320.441	215.312.223.787	220.912.223.787	220.649.230.447
119.056.580.978	206.760.394.222	77.778.968.541	84.778.968.541	84.370.129.672
211.182.526.386	267.152.793.943	122.780.509.210	187.005.117.499	184.273.733.033
284.812.357.076	153.095.137.771	87.067.204.359	94.377.204.359	83.845.373.991
158.218.481.303	107.175.438.263	45.001.566.061	45.047.106.061	45.044.331.061
177.406.623.311	124.498.555.620	118.087.856.803	119.337.856.803	119.337.856.803
134.639.233.409	180.111.320.995	135.488.087.324	135.488.087.324	135.478.393.523
281.840.013.159	353.264.833.758	144.272.064.765	161.443.965.225	161.443.965.225
166.147.866.882	67.646.320.365	61.269.605.576	65.764.105.576	63.673.795.576
106.581.424.970	78.111.929.389	26.436.576.196	43.936.576.196	43.750.948.053
186.895.963.009	68.161.679.883	48.489.039.926	48.489.039.926	45.989.039.926
1.466.759.779.178	1.281.394.616.149	799.075.102.176	805.523.587.176	805.419.392.938
88.371.418.666	155.842.580.700	98.178.280.857	99.155.725.898	99.155.725.898

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Pencairan dana cadangan	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Pengeluaran
-	600.000.000.000	-	-	540.833.333.333
16.022.478.474	-	-	507.080.100	18.331.598.042
-	-	-	159.090.000	5.000.000.000
492.445.550	-	-	434.533.030	2.000.000.000
-	-	-	11.877.541.844	34.831.500.000
-	21.343.464.996	-	101.100.100	119.432.000
-	-	-	-	13.253.209.400
-	-	-	95.145.000	794.779.088
-	17.500.000.000	-	337.003.298	5.000.000.000
-	-	17.683.045.952	-	31.196.226.070
-	-	22.291.364.000	-	51.028.944.266
-	20.145.744.347	-	954.041.500	2.076.375.465
-	20.000.000.000	-	1.143.743.234	1.125.894.058
-	11.500.000.000	-	10.783.935.000	15.316.000.000
-	-	-	10.000.000	17.694.629.139
-	-	-	-	10.032.734.156
-	-	-	2.455.679.384	3.000.000.000
-	-	-	397.481.200	8.108.364.375
-	-	328.900.000	-	1.452.000.000
-	-	-	164.427.600	10.822.550.125
-	-	326.565.516	2.300.000	3.729.922.654
-	-	377.337.100	-	2.000.000.000
-	9.000.000.000	-	4.192.671.750	3.856.770.650
-	1.000.000.000	-	-	-
-	-	-	8.358.318.891	10.244.000.000
-	-	-	943.402.456	5.400.000.000
-	-	-	262.993.340	5.600.000.000
-	-	-	408.838.869	7.000.000.000
-	-	233.302.711	2.498.081.755	64.224.608.289
665.990.635	3.208.100.612	6.657.739.120	-	7.310.000.000
-	-	-	2.775.000	45.540.000
-	-	-	-	1.250.000.000
-	-	-	9.693.801	-
-	-	-	-	17.171.900.460
-	-	-	2.090.310.000	4.494.500.000
-	-	-	185.628.143	17.500.000.000
-	2.500.000.000	-	-	-
-	-	-	104.194.238	6.448.485.000
-	-	-	-	977.445.041

Pembentukan Dana Cadangan	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Pembayaran Pokok Utang	Pemberian Pinjaman Daerah	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
500.000.000.000	30.100.000.000	10.733.333.333	-	-
-	18.331.598.042	-	-	-
-	5.000.000.000	-	-	-
2.000.000.000	-	-	-	-
-	15.000.000.000	-	19.831.500.000	-
-	-	119.432.000	-	-
-	10.680.000.000	2.573.209.400	-	-
-	-	794.779.088	-	-
-	5.000.000.000	-	-	-
30.000.000.000	1.000.000.000	196.226.070	-	-
-	36.900.000.000	14.128.944.266	-	-
-	500.000.000	91.375.465	1.485.000.000	-
-	1.048.993.600	76.900.458	-	-
-	5.400.000.000	-	9.916.000.000	-
16.694.629.139	-	1.000.000.000	-	-
10.000.000.000	-	32.734.156	-	-
-	3.000.000.000	-	-	-
8.000.000.000	-	108.364.375	-	-
-	1.452.000.000	-	-	-
-	10.788.550.975	33.999.150	-	-
-	1.050.000.000	2.679.922.654	-	-
2.000.000.000	-	-	-	-
-	200.000.000	181.770.650	3.475.000.000	-
-	-	-	-	-
-	10.244.000.000	-	-	-
5.000.000.000	400.000.000	-	-	-
4.000.000.000	1.600.000.000	-	-	-
4.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-
61.985.443.289	-	15.165.000	2.224.000.000	-
-	2.500.000.000	4.810.000.000	-	-
-	-	45.540.000	-	-
-	1.250.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	16.100.000.000	1.071.900.460	-	-
-	2.244.500.000	-	2.250.000.000	-
17.500.000.000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	6.448.485.000	-	-	-
-	977.445.041	-	-	-

Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2014

No	Daerah	Pendapatan	PAD	Pajak daerah
1	Prov. Jawa Timur	20.772.483.892.731	14.442.216.534.959	11.517.684.926.169
2	Kab. Bangkalan	1.643.100.601.431	135.785.489.734	23.470.520.177
3	Kab. Banyuwangi	2.418.962.318.839	283.488.703.181	94.133.355.280
4	Kab. Blitar	1.927.712.093.450	188.827.430.091	47.934.618.069
5	Kab. Bojonegoro	2.517.680.283.550	291.244.903.352	68.677.391.510
6	Kab. Bondowoso	1.534.483.291.062	134.684.701.402	21.279.683.953
7	Kab. Gresik	2.206.389.315.225	700.587.792.877	386.741.657.665
8	Kab. Jember	2.797.468.559.470	440.462.012.491	116.578.557.516
9	Kab. Jombang	1.905.860.374.275	304.065.301.093	66.769.253.998
10	Kab. Kediri	2.065.936.833.905	295.295.340.021	110.469.021.143
11	Kab. Lamongan	1.969.782.922.683	272.409.285.216	62.762.113.777
12	Kab. Lumajang	1.545.618.399.754	194.076.104.164	31.623.242.556
13	Kab. Madiun	1.386.252.157.502	121.390.771.374	27.933.559.849
14	Kab. Magetan	1.471.812.527.967	141.162.943.324	33.247.378.505
15	Kab. Malang	3.058.671.277.833	411.185.107.107	153.924.838.046
16	Kab. Mojokerto	1.894.423.212.191	357.924.994.262	185.724.705.657
17	Kab. Nganjuk	1.827.532.214.643	255.880.471.469	55.590.857.339
18	Kab. Ngawi	1.684.599.358.255	169.237.013.272	33.899.833.398
19	Kab. Pacitan	1.260.505.396.064	101.276.945.022	20.684.068.973
20	Kab. Pamekasan	1.527.493.494.941	171.518.204.167	19.835.563.015
21	Kab. Pasuruan	2.207.797.617.491	421.442.629.861	212.494.387.702
22	Kab. Ponorogo	1.704.809.253.589	198.730.421.480	44.956.557.768
23	Kab. Probolinggo	1.655.881.524.751	195.263.627.246	32.996.575.752
24	Kab. Sampang	1.364.735.643.012	123.039.103.223	14.548.343.522
25	Kab. Sidoarjo	3.273.379.955.995	1.115.332.938.500	608.692.188.164
26	Kab. Situbondo	1.359.193.724.049	129.640.577.934	24.287.378.394
27	Kab. Sumenep	1.647.362.227.719	162.371.865.154	14.513.053.555
28	Kab. Trenggalek	1.498.350.372.381	132.951.069.332	22.945.799.432
29	Kab. Tuban	1.823.513.656.640	291.079.944.393	143.821.505.016
30	Kab. Tulungagung	2.114.558.431.869	276.577.973.500	56.750.760.218
31	Kota Blitar	703.295.836.804	102.757.907.576	21.258.883.283
32	Kota Kediri	1.190.617.578.862	207.529.193.679	68.984.286.098
33	Kota Madiun	938.517.341.039	134.584.344.293	54.173.502.033
34	Kota Malang	1.764.864.689.655	372.545.396.292	278.885.189.549
35	Kota Mojokerto	689.559.351.473	105.277.492.018	25.092.877.550
36	Kota Pasuruan	701.582.534.365	100.647.029.803	21.748.647.451
37	Kota Probolinggo	872.815.764.198	135.062.805.888	24.457.670.693
38	Kota Surabaya	6.052.441.118.039	3.307.323.863.978	2.427.647.860.148
39	Kota Batu	703.680.192.404	80.493.920.959	62.807.445.882

Retribusi daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Daper	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
148.638.035.645	342.920.271.075	2.432.973.302.070	3.485.336.767.166	1.516.912.612.166
20.284.222.228	1.504.641.370	90.526.105.959	1.048.610.699.394	94.751.334.394
67.276.765.522	15.562.622.841	106.515.959.538	1.387.611.468.719	85.075.009.719
23.965.271.566	2.012.683.601	114.914.856.855	1.161.109.878.332	62.441.061.332
31.925.205.919	18.408.829.313	172.233.476.610	1.761.753.712.013	796.681.977.013
12.644.635.114	3.541.490.768	97.218.891.567	979.336.957.137	66.690.180.156
111.030.586.229	21.557.353.347	181.258.195.636	1.065.300.023.150	129.851.244.150
62.592.167.396	8.591.234.368	252.700.053.212	1.746.847.365.217	119.173.767.217
32.556.616.839	2.523.181.128	202.216.249.128	1.131.290.917.695	76.832.644.695
38.697.619.262	8.233.062.494	137.895.637.122	1.291.562.467.696	95.324.429.696
32.608.916.648	20.206.034.556	156.832.220.235	1.209.760.803.838	89.791.289.838
37.721.873.041	2.924.550.487	121.806.438.080	1.015.127.007.111	64.966.007.111
19.755.024.935	3.446.556.400	70.255.630.190	929.365.868.564	57.681.958.564
18.519.788.296	2.886.343.503	86.509.433.019	953.331.478.618	54.279.901.618
51.905.681.732	12.670.468.248	192.684.119.081	1.831.998.927.025	129.756.776.025
43.173.235.090	3.916.336.411	125.110.717.105	1.028.168.843.301	73.503.004.301
21.654.463.260	3.223.184.051	175.411.966.819	1.132.151.189.738	77.274.457.738
15.798.713.271	8.769.518.837	110.768.947.766	1.116.680.126.031	70.152.944.031
20.455.509.921	2.333.710.205	57.803.655.923	808.252.090.951	55.639.206.951
13.474.841.523	1.772.989.806	136.434.809.823	985.006.999.351	94.870.232.351
60.930.673.696	2.379.236.071	145.638.332.393	1.596.421.782.193	1.253.192.693.993
12.937.647.804	985.445.754	139.850.770.154	1.099.675.841.581	63.196.253.581
36.371.140.953	5.218.666.347	120.677.244.195	1.057.795.334.195	58.707.302.195
68.925.957.552	5.891.497.578	33.673.304.571	920.167.207.243	75.015.909.243
96.645.390.260	30.401.391.941	379.593.968.136	1.402.935.437.170	145.046.925.170
15.183.322.856	4.092.920.659	86.076.956.024	930.133.128.794	71.518.089.794
15.794.071.399	11.907.362.459	120.157.377.742	1.219.793.909.333	171.384.264.333
32.332.499.189	4.004.401.044	73.668.369.668	940.434.484.091	63.241.651.091
37.234.345.284	9.937.161.274	100.086.932.820	1.089.336.814.742	114.084.687.742
27.359.032.048	3.794.012.832	188.674.168.402	1.228.749.107.704	71.137.985.704
8.303.057.104	921.913.877	72.274.053.312	469.115.316.257	53.795.745.257
8.469.711.723	785.635.047	129.289.560.811	778.752.526.381	118.165.747.381
19.450.075.983	9.422.703.368	51.538.062.909	605.215.256.742	62.203.043.742
45.557.675.300	13.385.924.500	34.716.606.943	956.695.776.132	116.943.891.132
10.886.961.500	3.317.593.067	65.980.059.901	438.838.612.641	39.502.270.641
9.523.550.038	5.197.263.383	64.177.568.932	472.477.515.564	52.592.541.564
15.330.543.060	762.559.815	94.512.032.319	532.707.444.981	54.015.790.981
270.112.725.497	120.856.635.210	488.706.643.123	1.488.374.891.545	267.630.863.545
4.480.985.852	2.189.729.440	11.015.759.785	501.994.753.265	59.265.138.265

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	Lain-lain	Belanja
-	2.799.451.943.146	-	-	20.006.319.305.426
81.883.837.054	242.042.833.000	-	17.686.853.665	1.563.613.835.058
297.118.768.168	304.287.104.000	-	-	2.299.307.896.458
122.310.580.027	341.876.688.000	-	113.587.517.000	1.803.200.913.471
115.737.760.185	258.359.458.000	-	90.584.450.000	2.416.229.249.526
188.430.431.000	160.162.277.000	743.863.000	4.878.600	1.471.104.168.998
185.113.366.954	234.108.077.000	-	21.280.055.244	2.172.823.788.644
171.208.231.312	414.816.348.000	-	22.707.570.000	2.695.939.576.095
128.828.664.413	283.632.541.000	-	56.899.298.063	1.780.114.993.045
148.750.864.520	317.081.363.000	13.223.370.000	23.428.668	1.826.897.145.025
130.980.970.629	263.654.692.000	-	92.977.171.000	1.913.817.056.084
100.547.531.041	219.603.361.000	-	16.264.396.438	1.472.595.339.059
86.191.381.564	206.078.519.000	-	41.225.617.000	1.313.906.804.803
117.262.340.768	259.961.301.000	-	94.464.257	1.378.803.787.285
206.032.406.701	452.738.931.000	-	155.766.250.000	2.864.314.173.736
126.440.556.828	236.923.694.000	-	144.732.977.000	1.714.068.693.264
141.310.977.736	295.455.134.000	-	-	1.736.787.185.572
90.047.480.952	251.131.221.000	-	57.503.517.000	1.585.266.460.836
63.881.618.091	182.420.105.000	104.672.537.000	-	1.202.651.576.766
76.633.946.523	180.547.989.000	-	113.786.355.900	1.385.107.527.776
155.362.088.437	-	-	34.571.117.000	2.000.790.721.323
96.515.192.875	254.715.661.000	-	55.172.136.653	1.626.511.374.280
96.869.211.016	235.015.190.494	-	70.451.637.000	1.524.038.393.412
67.271.395.555	125.764.629.000	-	-	1.273.260.757.435
346.353.169.325	354.710.934.000	-	42.480.477.000	3.891.267.451.395
75.372.229.321	150.779.050.000	-	73.003.250.000	1.305.647.017.406
44.641.376.307	173.152.039.000	-	-	1.607.328.844.636
77.928.011.018	290.528.322.000	-	53.508.485.940	1.372.622.453.315
121.698.998.505	288.298.642.000	-	33.099.257.000	1.768.024.608.472
129.038.262.665	340.981.971.000	-	139.211.117.000	2.046.805.679.450
60.996.073.971	70.065.539.000	-	-	659.079.331.973
83.510.636.802	116.856.415.000	-	3.968.807.000	979.743.351.878
62.882.287.004	111.629.826.000	24.205.627.000	-	853.473.318.174
154.505.481.231	217.906.979.000	-	44.188.057.000	1.602.999.850.132
69.564.731.410	72.405.672.000	-	3.472.843.404	631.979.414.510
71.437.581.998	57.020.407.000	-	-	637.201.523.936
64.595.377.329	86.059.278.000	-	54.390.858.000	778.254.103.608
784.772.947.516	448.340.154.000	-	23.629.261.000	5.707.378.466.054
64.874.807.180	55.665.432.000	-	651.279.000	632.737.653.584

Belanja Tidak Langsung	Belanja Pegawai TL	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah
14.646.939.451.266	2.280.156.502.319	3.921.186.921	-	4.947.402.742.998
1.013.832.863.943	912.407.063.815	2.008.384.138	-	67.070.112.911
1.304.329.355.135	1.147.862.041.953	-	-	72.860.137.523
1.196.367.047.071	1.016.728.197.141	9.721.202	-	120.549.512.335
1.262.117.176.625	1.055.118.376.043	-	208.600.000	38.874.191.395
833.125.691.307	721.890.059.507	-	-	26.309.290.750
1.227.529.971.582	886.676.823.148	67.000.868	-	119.160.768.016
1.681.733.808.312	1.443.987.470.786	1.734.751	-	85.525.239.100
1.114.131.997.346	922.751.440.369	-	-	108.748.946.621
1.215.021.290.697	1.075.894.818.008	64.270.170	-	20.710.531.295
1.242.710.160.895	980.120.709.526	640.804.648	-	105.066.336.691
1.028.866.773.770	821.757.416.522	1.015.211	-	124.429.865.324
879.599.604.846	778.675.469.733	-	363.000.000	26.332.926.700
988.537.317.802	843.729.950.903	-	-	77.552.674.187
1.747.792.581.472	1.499.632.101.394	-	-	115.434.068.600
1.056.284.998.024	886.565.050.277	-	-	44.978.075.000
1.124.004.122.388	1.008.005.145.731	-	-	10.935.590.165
1.099.676.115.041	946.911.551.733	-	-	72.983.630.450
804.818.701.450	667.847.218.506	-	-	25.308.799.701
945.940.307.108	711.181.906.429	-	-	159.780.364.808
1.254.387.947.929	1.034.282.540.371	-	-	90.382.785.000
1.155.157.006.929	1.019.979.311.886	-	-	28.354.831.857
945.502.228.052	813.164.704.111	-	-	31.164.277.900
717.278.816.852	574.828.002.694	-	-	73.783.150.567
2.509.235.777.530	1.347.461.191.154	-	-	72.551.570.150
745.889.403.146	682.568.345.810	-	-	19.254.915.000
1.090.276.008.096	883.891.037.228	-	-	116.662.694.907
944.295.426.106	827.937.453.201	-	337.492.600	45.162.390.517
1.146.587.728.554	926.348.580.147	-	-	102.065.431.594
1.381.484.204.681	1.180.536.451.345	492.624.722	-	105.664.594.669
351.925.545.030	305.254.679.792	-	-	27.109.483.912
632.895.961.981	552.405.590.002	-	-	53.073.273.830
438.415.869.720	413.686.359.144	-	-	17.392.000.508
923.536.196.618	877.246.394.702	-	-	44.148.137.498
296.744.006.839	268.740.132.667	-	-	25.641.947.500
400.095.596.075	355.843.748.795	-	-	32.921.657.800
440.719.755.775	422.615.706.461	-	-	12.223.966.000
2.488.949.668.923	2.187.887.736.524	-	-	300.184.342.399
379.115.406.227	282.582.652.610	-	-	61.671.275.164

Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Belanja Tidak Terduga	Belanja Langsung
24.750.170.429	4.934.876.837.720	2.362.512.570.627	93.319.440.251	5.359.379.854.161
2.304.905.600	-	29.835.015.579	207.381.900	549.780.971.116
10.026.215.000	3.171.740.750	70.409.219.909	-	994.978.541.323
3.348.000.000	52.328.752.536	835.910.000	2.566.953.857	606.833.866.400
8.649.280.000	1.128.378.150	157.138.170.037	1.000.181.000	1.154.112.072.900
4.595.857.462	79.346.313.588	-	984.170.000	637.978.477.691
28.132.648.700	638.334.900	192.277.210.950	577.185.000	945.293.817.062
47.261.831.500	849.380.490	104.108.151.684	-	1.014.205.767.783
7.737.150.000	73.744.060.392	999.999.964	150.400.000	665.982.995.699
14.096.057.436	15.123.063.811	87.292.249.482	1.840.300.495	611.875.854.329
11.496.508.240	2.637.736.163	142.748.065.627	-	671.106.895.189
18.740.111.966	-	63.574.254.747	364.110.000	443.728.565.289
12.842.694.051	723.686.400	60.661.827.962	-	434.307.199.958
4.810.219.500	57.121.491.379	5.322.981.833	-	390.266.469.483
15.115.149.000	15.303.673.890	99.808.213.588	2.499.375.000	1.116.521.592.264
10.229.361.000	15.881.615.891	98.630.895.857	-	657.783.695.240
5.320.564.250	2.146.885.150	97.240.080.500	355.856.592	612.783.063.184
12.591.580.000	673.983.950	66.490.368.908	25.000.000	485.590.345.795
6.617.811.731	3.376.507.901	100.542.199.110	1.126.164.500	397.832.875.316
31.455.911.671	2.081.065.300	38.337.803.900	3.103.255.000	439.167.220.668
12.214.800.000	53.362.250.000	62.234.730.216	1.910.842.342	746.402.773.393
10.845.841.150	1.536.248.184	90.834.880.100	3.605.893.752	471.354.367.351
18.654.046.000	-	80.888.322.041	1.630.878.000	578.536.165.360
32.319.725.400	34.995.479.470	738.503.721	613.955.000	555.981.940.583
48.738.240.000	1.037.848.315.564	842.689.718	1.793.770.944	1.382.031.673.865
5.257.780.000	-	37.043.573.336	1.764.789.000	559.757.614.260
3.820.550.000	-	83.979.354.960	1.922.371.000	517.052.836.541
7.331.482.500	7.046.547.506	56.480.059.782	-	428.327.027.209
38.740.948.200	78.954.624.100	471.924.963	6.219.550	621.436.879.918
13.866.821.300	79.418.389.996	941.953.100	563.369.550	665.321.474.768
19.044.680.574	-	386.238.752	130.462.000	307.153.786.943
26.363.003.478	-	557.947.900	496.146.771	346.847.389.897
6.798.292.500	-	539.217.568	-	415.057.448.454
1.402.739.630	78.330.600	647.332.838	13.261.351	679.463.653.514
1.702.250.000	-	452.105.072	207.571.600	335.235.407.671
9.457.477.100	-	1.872.712.380	-	237.105.927.861
4.205.450.000	-	643.396.802	1.031.236.512	337.534.347.833
89.670.000	-	787.920.000	-	3.218.428.797.131
14.489.062.453	-	20.372.416.000	-	253.622.247.357

Belanja Pegawai L	Belanja Barang dan jasa	Belanja Modal	Surplus/Defisit	Pembiayaan
-	4.151.923.220.787	1.207.456.633.374	1.684.053.794.144	1.846.787.127.478
-	217.952.338.645	331.828.632.471	107.639.089.245	114.439.089.245
-	436.431.864.175	558.546.677.148	214.793.037.694	227.693.037.694
-	221.573.412.648	385.260.453.752	100.651.996.147	108.825.788.357
-	616.425.271.012	537.686.801.888	268.681.783.996	364.294.283.996
21.008.432.750	305.474.554.812	311.495.490.129	96.221.772.448	96.721.772.448
-	421.488.919.880	523.804.897.182	176.890.979.645	179.282.766.311
-	476.684.511.754	537.521.256.029	302.056.926.725	304.000.236.252
-	310.933.877.436	355.049.118.263	229.449.735.109	235.949.735.109
29.430.724.950	257.248.037.810	325.197.091.568	397.739.625.491	413.030.795.206
-	317.671.279.911	353.435.615.278	109.247.797.620	149.599.484.089
-	206.971.829.138	236.756.736.151	224.141.352.836	229.334.126.486
-	194.836.826.560	239.470.373.397	154.440.768.669	159.803.580.031
-	199.333.913.789	190.932.555.694	130.215.267.799	147.057.267.799
-	615.017.918.830	501.503.673.434	196.600.005.954	217.172.991.116
-	292.313.694.620	365.470.000.620	240.437.375.712	252.726.738.598
-	335.343.602.106	277.439.461.078	225.340.108.543	230.400.215.543
-	241.601.991.236	243.988.354.559	148.482.661.898	157.482.661.898
35.969.228.877	161.434.465.274	200.429.181.165	71.371.982.405	72.121.982.405
-	198.349.135.489	240.818.085.179	192.798.794.197	199.384.047.467
-	419.634.986.913	326.767.786.480	261.655.595.394	262.527.557.894
-	294.370.652.289	176.983.715.062	111.231.235.373	119.231.235.373
-	359.336.695.112	219.199.470.248	170.310.706.209	174.450.170.509
-	201.925.219.215	354.056.721.368	110.745.826.175	110.745.826.175
-	690.868.186.166	691.163.487.699	447.780.358.404	492.543.358.404
-	234.704.576.637	325.053.037.623	75.409.804.986	82.818.930.324
-	239.267.478.309	277.785.358.232	235.701.343.090	290.885.683.090
-	147.364.657.355	280.962.369.854	112.182.662.893	120.182.662.893
-	259.034.642.991	362.402.236.927	194.942.906.146	211.249.906.146
-	349.775.308.719	315.546.166.050	170.582.163.283	181.608.908.283
-	180.827.459.380	126.326.327.563	62.958.324.232	62.958.324.232
-	193.298.337.751	153.549.052.146	224.554.931.923	226.554.931.923
44.328.666.318	169.194.840.387	201.533.941.749	169.485.451.427	169.485.451.427
-	361.001.601.092	318.462.052.422	161.120.910.855	182.754.567.308
-	193.643.459.740	141.591.947.931	109.414.109.727	121.081.809.727
-	128.127.281.800	108.978.646.061	33.288.270.755	50.788.270.755
-	230.610.989.994	106.923.357.839	74.163.283.602	74.913.283.602
-	1.814.062.371.710	1.404.366.425.421	966.481.888.081	977.118.888.081
-	116.995.361.823	136.626.885.534	114.545.766.880	114.971.695.680

Penerimaan	SILPA TA sebelumnya	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Pencairan dana cadangan	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
1.846.787.127.478	-	-	-	-
87.824.405.062	25.819.088.000	202.862.233	-	592.733.950
227.680.687.694	-	-	12.350.000	-
108.573.761.555	-	-	-	252.026.802
353.881.639.921	-	-	-	10.412.644.075
96.625.663.448	-	96.109.000	-	-
179.232.839.512	-	-	49.926.799	-
303.886.236.252	-	-	-	114.000.000
235.468.644.157	315.616.847	-	165.474.105	-
413.030.795.206	-	-	-	-
125.199.484.089	-	-	24.400.000.000	-
228.400.887.986	-	-	-	933.238.500
159.263.752.336	27.588.750	-	-	512.238.945
136.670.642.799	-	10.386.625.000	-	-
194.440.358.299	-	22.732.632.818	-	-
252.721.646.206	92.392	-	-	5.000.000
228.339.673.064	-	2.060.542.479	-	-
157.233.392.898	-	-	249.269.000	-
71.734.182.405	-	-	387.800.000	-
198.862.047.467	-	-	500.000.000	22.000.000
262.418.451.363	-	-	109.106.532	-
119.148.725.373	-	-	-	82.510.000
167.658.754.059	-	-	-	6.791.416.450
110.745.826.175	-	-	-	-
484.291.240.761	-	-	-	8.252.117.643
82.557.126.214	-	-	-	261.804.110
290.441.139.726	-	-	-	444.543.364
119.622.421.498	-	-	-	560.241.395
158.968.722.179	-	50.000.000.000	518.963.067	1.762.220.900
181.608.908.283	-	-	-	-
62.958.324.232	-	-	-	-
226.554.931.923	-	-	-	-
169.479.267.427	-	-	-	6.184.000
182.754.567.308	-	-	-	-
119.078.629.727	-	-	2.003.180.000	-
50.664.476.425	-	-	-	123.794.330
74.913.283.602	-	-	-	-
977.089.154.745	-	-	29.733.336	-
114.971.695.680	-	-	-	-

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Pengeluaran	Pembentukan Dana Cadangan	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Pembayaran Pokok Utang
162.733.333.333	-	152.000.000.000	10.733.333.333	-
6.800.000.000	2.500.000.000	4.300.000.000	-	-
12.900.000.000	-	12.900.000.000	-	-
8.173.792.210	8.173.792.210	-	-	-
95.612.500.000	-	85.000.000.000	-	10.612.500.000
500.000.000	-	500.000.000	-	-
2.391.786.667	-	-	2.391.786.667	-
1.943.309.527	-	-	1.943.309.527	-
6.500.000.000	6.500.000.000	-	-	-
15.291.169.716	2.328.943.646	11.000.000.000	1.962.226.070	-
40.351.686.469	-	25.900.000.000	14.451.686.469	-
5.192.773.650	-	800.000.000	2.907.773.650	1.485.000.000
5.362.811.362	-	5.362.811.362	-	-
16.842.000.000	-	2.000.000.000	-	14.842.000.000
20.572.985.162	19.572.985.162	-	1.000.000.000	-
12.289.362.885	6.289.362.885	6.000.000.000	-	-
5.060.107.000	-	5.060.107.000	-	-
9.000.000.000	9.000.000.000	-	-	-
750.000.000	-	750.000.000	-	-
6.585.253.270	6.085.253.270	-	-	500.000.000
871.962.500	-	871.962.500	-	-
8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	-
4.139.464.300	-	200.000.000	14.464.300	3.925.000.000
-	-	-	-	-
44.763.000.000	-	44.763.000.000	-	-
7.409.125.339	6.342.417.128	900.000.000	166.708.210	-
55.184.340.000	31.884.340.000	23.300.000.000	-	-
8.000.000.000	3.000.000.000	5.000.000.000	-	-
16.307.000.000	12.000.000.000	1.900.000.000	-	2.407.000.000
11.026.745.000	-	5.254.745.000	5.772.000.000	-
-	-	-	-	-
2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	-
-	-	-	-	-
21.633.656.454	-	19.000.000.000	2.633.656.454	-
11.667.700.000	-	8.637.700.000	-	3.030.000.000
17.500.000.000	17.500.000.000	-	-	-
750.000.000	-	750.000.000	-	-
10.637.000.000	-	10.637.000.000	-	-
425.928.800	-	-	425.928.800	-

Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2015

No	Daerah	Pendapatan	PAD	Pajak daerah	Retribusi daerah
1	Prov. Jawa Timur	22.228.450.227.975	15.402.647.674.503	12.497.148.704.551	176.559.902.959
2	Kab. Bangkalan	1.787.701.828.638	175.624.054.291	27.244.911.416	16.981.194.113
3	Kab. Banyuwangi	2.779.148.430.147	346.992.331.407	115.906.214.213	31.299.048.537
4	Kab. Blitar	2.121.588.164.367	216.648.256.570	55.117.136.562	20.935.300.666
5	Kab. Bojonegoro	2.898.769.750.254	337.695.825.017	78.756.423.256	42.663.222.358
6	Kab. Bondowoso	1.800.277.754.980	158.974.210.144	22.428.418.167	17.521.087.193
7	Kab. Gresik	2.436.173.613.495	799.884.870.103	450.326.075.140	117.641.024.546
8	Kab. Jember	3.116.544.378.911	461.882.363.147	123.210.707.077	34.452.393.109
9	Kab. Jombang	2.151.287.884.053	363.963.252.972	80.335.178.829	39.925.263.477
10	Kab. Kediri	2.317.562.354.065	314.229.578.679	124.579.058.350	21.295.646.313
11	Kab. Lamongan	2.436.090.963.267	321.667.133.176	77.548.886.579	24.724.667.995
12	Kab. Lumajang	1.707.539.550.204	212.585.093.436	39.218.956.514	24.282.298.136
13	Kab. Madiun	1.622.962.461.464	149.628.355.468	36.565.117.496	19.849.029.622
14	Kab. Magetan	1.544.927.313.562	164.564.899.426	33.753.964.990	20.017.394.985
15	Kab. Malang	3.471.281.006.611	461.887.704.825	170.108.822.450	40.403.196.760
16	Kab. Mojokerto	2.118.171.111.163	414.965.865.274	229.078.098.432	41.303.221.756
17	Kab. Nganjuk	2.017.545.802.498	287.881.055.210	60.555.034.760	24.266.970.618
18	Kab. Ngawi	1.912.183.743.923	191.166.217.182	38.537.158.480	15.952.419.996
19	Kab. Pacitan	1.426.596.968.333	126.449.078.417	21.789.927.222	20.411.292.110
20	Kab. Pamekasan	1.681.794.669.633	170.258.936.684	23.151.412.960	13.008.538.383
21	Kab. Pasuruan	2.518.560.295.177	478.269.057.788	244.114.168.295	46.806.938.916
22	Kab. Ponorogo	1.866.869.447.088	210.695.348.135	50.895.226.786	13.035.825.300
23	Kab. Probolinggo	1.842.200.787.638	207.370.345.161	40.127.956.899	20.620.171.850
24	Kab. Sampang	1.736.766.622.299	142.512.555.663	15.139.402.821	16.904.771.577
25	Kab. Sidoarjo	3.556.219.138.762	1.266.786.727.409	700.498.296.678	139.369.832.362
26	Kab. Situbondo	1.520.359.975.571	148.507.958.983	26.451.180.608	21.245.936.587
27	Kab. Sumenep	1.952.700.349.515	172.687.320.521	16.288.376.559	17.033.457.232
28	Kab. Trenggalek	1.545.252.147.340	155.254.334.899	24.294.430.023	25.330.219.892
29	Kab. Tuban	2.017.855.147.213	345.965.620.446	164.078.450.924	22.490.448.767
30	Kab. Tulungagung	2.369.737.223.685	309.646.333.189	62.340.809.295	19.332.326.783
31	Kota Blitar	769.743.723.208	121.264.917.468	24.054.196.461	8.808.457.273
32	Kota Kediri	1.227.985.595.702	221.927.133.610	70.437.104.843	9.445.300.595
33	Kota Madiun	973.919.348.172	164.681.136.058	58.947.358.146	16.537.857.463
34	Kota Malang	1.829.072.689.718	424.938.755.525	316.682.891.174	35.281.817.931
35	Kota Mojokerto	717.544.079.472	129.258.132.763	31.324.086.640	11.862.967.590
36	Kota Pasuruan	738.780.208.092	114.734.243.910	28.223.794.600	7.802.104.796
37	Kota Probolinggo	859.993.069.407	142.434.720.375	26.691.349.430	12.702.076.865
38	Kota Surabaya	6.619.031.160.937	4.035.649.478.398	2.738.899.424.558	537.319.752.463
39	Kota Batu	725.754.996.854	104.233.584.925	83.692.699.934	5.209.867.148

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Daper	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Dana Alokasi Umum
352.223.333.471	2.376.715.733.521	3.115.619.118.152	1.462.318.221.152	1.587.261.707.000
1.879.378.996	129.518.569.766	1.184.662.822.511	84.867.656.511	888.673.426.000
15.571.579.457	184.215.489.200	1.494.315.803.224	78.910.883.224	1.288.940.680.000
1.861.674.545	138.734.144.797	1.242.813.217.360	62.492.022.360	1.037.911.125.000
15.630.040.511	200.646.138.893	1.958.214.470.034	994.881.177.034	895.987.113.000
3.650.499.964	115.374.204.820	1.051.590.156.581	66.546.036.581	862.599.540.000
25.234.376.051	206.683.394.367	1.103.936.339.654	119.825.600.654	873.265.959.000
5.282.747.388	298.936.515.573	1.917.759.331.546	131.764.719.546	1.586.836.602.000
2.844.232.695	240.858.577.971	1.170.782.676.685	75.132.309.685	1.032.325.237.000
7.921.347.301	160.433.526.715	1.345.374.425.457	92.488.394.457	1.177.392.295.000
21.361.254.242	198.032.324.360	1.313.958.388.093	95.412.623.093	1.064.300.915.000
2.923.561.044	146.160.277.742	1.067.949.312.205	70.183.805.205	923.492.395.000
4.295.860.713	88.918.347.637	1.017.860.927.782	57.379.974.782	832.357.223.000
2.334.748.993	108.458.790.458	985.585.834.300	49.911.643.300	856.278.521.000
18.340.914.239	233.034.771.376	1.893.231.262.923	126.719.045.923	1.613.161.777.000
4.252.224.534	140.332.320.553	1.079.256.466.351	72.381.584.351	923.747.632.000
3.446.055.368	199.612.994.463	1.166.956.491.647	65.782.737.647	1.024.223.014.000
9.039.157.831	127.637.480.875	1.164.518.440.211	64.431.897.211	995.119.303.000
2.421.047.544	81.826.811.541	863.523.504.816	53.312.201.816	714.847.233.000
1.847.294.966	132.251.690.375	1.053.832.740.582	92.560.017.582	817.903.633.000
2.484.189.737	184.863.760.840	1.390.883.903.012	228.584.521.012	1.089.359.282.000
1.001.204.249	145.763.091.800	1.144.291.367.053	61.758.662.053	993.319.105.000
5.380.843.664	141.241.372.748	1.125.950.388.769	90.092.853.769	956.969.595.000
11.977.496.618	98.490.884.648	1.064.694.791.733	71.773.051.733	788.345.170.000
27.548.146.504	399.370.451.865	1.388.639.002.033	121.320.183.033	1.206.659.789.000
4.233.412.109	96.577.429.680	973.536.392.479	69.352.663.479	787.728.919.000
12.461.039.136	126.904.447.595	1.312.971.944.697	125.203.363.697	1.010.159.421.000
4.238.212.995	101.391.471.989	977.071.592.537	53.085.207.537	839.497.985.000
10.746.001.491	148.650.719.265	1.141.173.339.001	118.628.426.001	955.939.873.000
4.125.888.858	223.847.308.254	1.281.702.685.859	59.885.008.859	1.111.457.117.000
985.410.770	87.416.852.965	483.344.695.393	49.308.924.393	400.654.035.000
997.859.589	141.046.868.584	774.087.250.166	112.202.429.166	634.461.169.000
11.143.325.514	78.052.594.935	597.215.788.294	47.534.167.294	509.817.165.000
14.649.144.871	58.324.901.549	926.364.574.783	87.015.121.783	818.758.893.000
3.566.250.785	82.504.827.749	457.456.088.791	50.992.997.791	382.373.637.000
4.563.898.365	74.144.446.149	483.603.266.233	52.331.112.233	399.095.322.000
783.805.224	102.257.488.856	555.092.998.083	53.262.028.083	463.649.666.000
135.324.221.731	624.106.079.645	1.384.772.424.683	230.261.248.683	1.147.385.486.000
2.177.429.333	13.153.588.510	503.746.629.211	49.212.551.211	413.219.693.000

Dana Alokasi Khusus	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Hibah	Dana darurat	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya
66.039.190.000	3.710.183.435.320	40.499.137.959	-	-
211.121.740.000	427.414.951.836	6.348.838.000	-	78.958.933.524
126.464.240.000	937.840.295.516	167.303.683.047	-	157.872.562.469
142.410.070.000	662.126.690.437	10.121.887.000	-	115.848.145.437
67.346.180.000	602.859.455.203	-	-	114.699.995.203
122.444.580.000	589.713.388.255	1.677.952.078	-	68.585.413.177
110.844.780.000	532.352.403.738	780.671.260	-	169.826.577.478
199.158.010.000	736.902.684.218	5.425.336.300	-	168.780.357.918
63.325.130.000	616.541.954.396	2.049.108.600	-	121.442.923.796
75.493.736.000	657.958.349.929	-	-	138.872.731.194
154.244.850.000	800.465.441.998	-	-	146.003.833.998
74.273.112.000	427.005.144.563	6.303.224.000	-	94.557.096.563
128.123.730.000	455.473.178.214	3.498.000.000	-	83.030.851.214
79.395.670.000	394.776.579.836	3.947.000.000	-	68.911.992.295
153.350.440.000	1.116.162.038.863	19.994.558.900	-	163.989.032.065
83.127.250.000	623.948.779.538	179.217.292	-	140.639.713.246
76.950.740.000	562.708.255.641	8.599.721.313	-	101.489.806.478
104.967.240.000	556.499.086.530	-	-	86.339.242.530
95.364.070.000	436.624.385.100	1.050.000	-	60.742.249.100
143.369.090.000	457.702.992.367	-	101.654.468.000	79.376.702.367
72.940.100.000	649.407.334.377	846.344.750	-	151.831.474.677
89.213.600.000	511.882.731.900	-	-	93.212.116.900
78.887.940.000	508.880.053.708	1.299.209.000	-	93.342.194.708
204.576.570.000	529.559.274.903	923.986.087	-	73.140.027.816
60.659.030.000	900.793.409.320	9.487.077.000	-	-
116.454.810.000	398.315.624.109	4.958.901.000	-	73.891.540.109
177.609.160.000	467.041.084.297	1.032.665.900	-	80.260.013.397
84.488.400.000	412.926.219.904	5.000.000.000	-	74.385.752.904
66.605.040.000	530.716.187.766	5.097.448.000	-	103.916.766.766
110.360.560.000	778.388.204.637	8.437.716.000	-	122.118.397.637
33.381.736.000	165.134.110.347	-	-	54.056.306.347
27.423.652.000	231.971.211.926	-	-	72.682.839.926
39.864.456.000	212.022.423.820	-	-	58.907.047.820
20.590.560.000	477.769.359.410	14.781.000.000	-	152.348.658.410
24.089.454.000	130.829.857.918	-	-	38.991.755.918
32.176.832.000	140.442.697.949	-	-	56.569.151.949
38.181.304.000	162.465.350.949	5.819.040.000	-	60.256.691.949
7.125.690.000	1.198.609.257.856	-	-	707.673.658.856
41.314.385.000	117.774.782.718	-	-	53.169.725.718

Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	Lain-lain	Belanja	Belanja Tidak Langsung
3.669.684.297.361	-	-	22.946.307.569.746	16.033.230.100.446
302.653.315.000	-	39.453.865.312	1.838.357.542.933	1.203.620.952.257
451.403.887.000	161.260.163.000	-	2.741.772.556.678	1.512.413.698.635
425.305.705.000	110.850.953.000	-	2.072.628.708.228	1.283.436.283.366
429.082.087.000	-	59.077.373.000	2.844.471.915.139	1.549.041.369.262
271.902.640.000	-	247.547.383.000	1.776.098.167.403	986.327.477.933
343.523.352.000	-	18.221.803.000	2.529.213.281.777	1.385.351.661.479
539.166.157.000	-	23.530.833.000	3.083.637.991.191	2.054.800.795.175
325.278.336.000	82.334.153.000	85.437.433.000	2.164.953.026.633	1.250.258.205.803
453.740.321.000	-	65.345.297.735	2.274.442.061.439	1.543.479.788.978
454.713.285.000	199.748.323.000	-	2.407.389.245.871	1.561.684.071.855
318.596.691.000	7.548.133.000	-	1.660.465.122.739	1.172.673.116.918
296.551.214.000	-	72.393.113.000	1.581.057.648.337	979.915.783.760
282.090.755.000	9.156.426.589	30.670.405.952	1.589.421.037.874	1.070.629.606.649
581.206.056.000	350.972.391.898	-	3.538.236.408.629	2.127.135.338.638
278.109.244.000	-	205.020.605.000	2.179.606.828.112	1.332.388.956.007
420.428.419.000	32.190.308.850	-	1.983.727.931.370	1.217.634.799.118
388.259.091.000	-	81.900.753.000	1.836.690.671.905	1.260.151.185.602
281.230.973.000	94.650.113.000	-	1.408.458.278.765	933.987.006.968
276.671.822.000	-	-	1.751.155.310.592	1.070.540.009.844
399.247.641.950	-	97.481.873.000	2.443.728.058.573	1.420.897.382.596
394.572.262.000	24.098.353.000	-	1.894.974.865.711	1.273.278.953.472
349.472.777.000	-	64.765.873.000	1.879.876.712.132	1.106.099.375.565
169.581.504.000	227.529.193.000	58.384.564.000	1.704.171.539.547	847.617.492.856
494.588.507.000	306.138.652.320	90.579.173.000	3.662.799.265.945	1.923.283.189.248
242.278.310.000	-	77.186.873.000	1.480.028.872.079	891.075.739.752
334.852.752.000	50.895.653.000	-	1.958.131.572.633	1.250.082.405.898
262.481.394.000	-	71.059.073.000	1.552.970.281.991	1.012.656.506.267
391.297.020.000	-	30.404.953.000	1.998.111.557.092	1.341.200.578.394
459.351.838.000	188.480.253.000	-	2.317.348.435.617	1.441.414.047.962
81.694.661.000	29.383.143.000	-	782.148.792.597	392.771.853.302
115.436.169.000	43.852.203.000	-	1.120.702.813.857	528.261.178.165
151.367.873.000	1.747.503.000	-	877.219.888.409	444.356.543.616
224.102.748.000	86.536.953.000	-	1.803.420.540.918	999.348.785.461
75.302.399.000	-	16.535.703.000	706.783.751.689	335.763.175.823
61.192.073.000	-	22.681.473.000	740.796.890.630	376.482.160.755
67.335.536.000	-	29.054.083.000	731.680.260.277	459.321.844.328
463.025.317.000	3.107.400.000	24.802.882.000	6.490.359.759.532	2.579.261.371.006
62.659.864.000	1.945.193.000	-	819.751.076.487	390.297.503.879

Belanja Pegawai TL	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
2.468.088.258.022	2.761.251.968	-	5.701.353.955.824	15.641.066.925
945.701.250.184	4.181.837.822	-	92.629.045.306	613.817.800
1.243.906.467.979	-	-	122.750.256.472	6.131.490.319
1.016.008.559.230	-	-	75.221.600.350	675.480.000
1.121.005.879.711	-	188.000.000	23.004.548.196	4.643.500.000
793.099.322.243	-	-	16.964.720.000	3.225.176.669
842.577.219.740	-	-	173.435.489.980	22.676.087.600
1.483.314.995.117	-	-	266.059.396.325	45.047.427.775
955.864.129.231	-	-	51.340.643.428	1.480.050.000
1.147.619.780.264	40.893.377	-	74.718.226.268	11.853.042.454
989.650.519.920	-	-	238.961.050.464	12.724.137.377
864.868.967.576	-	-	105.794.408.500	19.069.692.457
808.710.481.634	-	484.645.000	9.388.245.325	2.590.785.000
881.677.484.134	-	-	22.727.405.000	4.427.620.000
1.575.118.616.176	-	-	207.260.510.179	20.105.658.000
947.587.710.973	-	-	90.151.393.500	5.660.300.000
1.007.459.513.658	-	-	9.403.547.594	7.419.455.600
970.457.880.634	-	-	100.571.749.589	4.333.780.000
679.871.590.702	-	-	38.213.105.970	8.549.874.647
747.549.026.076	-	-	138.660.118.465	26.444.910.418
1.072.059.337.669	-	-	72.704.915.250	5.445.875.125
1.008.658.321.697	-	-	44.610.254.407	9.029.726.450
848.797.591.615	-	-	37.335.131.000	9.109.560.000
609.805.116.931	-	-	92.585.261.824	21.585.373.386
1.409.353.897.553	-	-	151.649.747.780	47.585.295.000
708.700.690.190	-	-	40.743.020.800	5.792.140.000
882.378.406.236	-	-	116.290.056.573	12.784.340.000
808.359.366.775	-	-	52.918.804.619	4.336.239.700
947.885.746.241	-	-	153.579.987.387	26.528.405.900
1.135.619.984.356	43.447.320	-	90.808.473.193	14.002.629.340
332.921.686.109	-	546.600.000	31.959.577.404	26.863.078.749
490.502.785.924	-	-	21.711.780.000	15.202.566.312
425.637.798.494	-	-	-	12.534.419.422
931.090.867.802	-	-	66.492.877.500	397.500.000
289.483.975.217	-	-	43.811.835.500	1.988.500.000
323.868.144.835	-	-	40.672.167.600	10.041.527.900
439.586.833.405	-	-	15.377.755.000	2.230.815.925
2.326.417.553.360	-	-	252.111.246.646	-
279.791.171.091	-	-	72.101.770.068	15.157.874.146

Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Belanja Tidak Terduga	Belanja Langsung	Belanja Pegawai L
4.667.452.412.362	3.149.506.610.015	28.426.545.330	6.913.077.469.299	-
1.999.992.734	158.495.008.411	-	634.736.590.676	-
139.625.483.865	-	-	1.229.358.858.043	-
10.206.520.093	181.324.123.693	-	789.192.424.862	-
12.736.895.383	376.082.214.402	11.380.331.569	1.295.430.545.877	-
-	173.038.259.021	-	789.770.689.470	-
40.088.838.578	306.232.981.581	341.044.000	1.143.861.620.298	-
13.938.049.034	246.415.470.770	25.456.154	1.028.837.196.016	-
-	241.573.383.144	-	914.694.820.830	50.208.345.487
15.864.840.447	288.310.100.168	5.072.906.000	730.962.272.461	-
1.869.200.375	318.281.163.719	198.000.000	845.705.174.016	34.498.598.660
587.741.237	182.321.607.148	30.700.000	487.792.005.821	-
3.652.342.500	154.309.284.301	780.000.000	601.141.864.577	-
-	161.667.121.915	129.975.600	518.791.431.225	-
30.630.076.536	288.968.291.977	5.052.185.770	1.411.101.069.990	-
24.327.041.581	264.662.509.953	-	847.217.872.105	-
5.778.769.500	187.450.525.966	122.986.800	766.093.132.253	38.360.166.324
4.048.616.864	180.301.998.514	437.160.000	576.539.486.303	-
206.778.372.649	-	574.063.000	474.471.271.797	-
1.949.485.656	152.749.032.734	3.187.436.495	680.615.300.748	-
189.051.533.860	76.226.522.047	5.409.198.645	1.022.830.675.977	-
5.606.413.118	201.346.851.800	4.027.386.000	621.695.912.239	58.461.915.170
4.988.305.000	205.059.331.450	809.456.500	773.777.336.567	-
-	123.639.152.799	2.587.916	856.554.046.692	-
84.393.020.024	230.202.710.786	98.518.104	1.739.516.076.697	-
2.147.725.000	133.671.163.762	21.000.000	588.953.132.327	-
-	237.648.564.089	981.039.000	708.049.166.735	50.735.542.476
6.442.024.244	140.600.070.929	-	540.313.775.724	-
211.889.643.720	459.877.825	856.917.321	656.910.978.698	-
8.678.815.354	192.027.773.400	232.925.000	875.934.387.655	-
-	480.911.040	-	389.376.939.295	-
-	727.060.675	116.985.254	592.441.635.692	102.547.907.299
5.556.479.000	627.846.700	-	432.863.344.793	39.608.092.010
75.036.600	635.264.957	657.238.601	804.071.755.458	-
-	456.238.656	22.626.450	371.020.575.866	-
-	1.900.320.420	-	364.314.729.875	-
-	463.139.998	1.663.300.000	272.358.415.949	-
-	732.571.000	-	3.911.098.388.526	-
-	22.456.151.759	790.536.815	429.453.572.608	-

Belanja Barang dan jasa	Belanja Modal	Surplus/Defisit	Pembiayaan	Penerimaan
4.654.757.397.638	2.258.320.071.662	(717.857.341.771)	2.214.866.048.116	2.450.199.381.449
154.207.206.605	480.529.384.071	(50.655.714.295)	248.149.805.299	255.699.805.299
529.943.112.726	699.415.745.318	37.375.873.469	334.470.060.075	334.490.060.075
280.860.474.082	508.331.950.780	48.959.456.139	235.551.125.291	235.552.528.181
701.201.369.067	594.229.176.810	54.297.835.115	279.124.204.453	381.624.204.453
385.194.156.061	404.576.533.409	24.179.587.577	156.139.203.012	159.639.203.012
559.637.944.393	584.223.675.905	(93.039.668.282)	210.479.173.126	210.479.173.126
472.428.310.873	556.408.885.143	32.906.387.720	401.297.468.340	404.922.468.340
461.266.682.369	403.219.792.974	(13.665.142.580)	350.110.728.392	355.708.270.892
273.174.649.014	457.787.623.448	43.120.292.626	467.696.138.350	672.892.364.420
351.900.782.706	459.305.792.650	28.701.717.396	160.983.664.219	187.883.664.219
245.566.846.580	242.225.159.241	47.074.427.464	265.740.796.170	298.414.210.032
273.399.467.486	327.742.397.091	41.904.813.127	211.989.990.113	226.808.643.228
279.133.976.018	239.657.455.207	(44.493.724.312)	211.484.986.663	236.769.986.663
696.908.174.767	714.192.895.223	(66.955.402.018)	419.049.282.286	427.161.196.273
355.388.178.453	491.829.693.652	(61.435.716.949)	442.503.818.160	448.512.275.260
366.436.987.065	361.295.978.864	33.817.871.128	309.520.831.085	319.407.531.085
263.313.243.894	313.226.242.409	75.493.072.018	271.815.559.318	271.815.559.318
206.319.624.360	268.151.647.437	18.138.689.567	128.275.801.703	129.225.801.703
232.929.798.839	447.685.501.909	(69.360.640.958)	322.592.954.824	335.207.636.362
558.196.658.836	464.634.017.141	74.832.236.604	468.498.881.563	468.595.491.563
239.064.668.217	324.169.328.852	(28.105.418.623)	199.546.034.682	199.546.034.682
430.587.996.663	343.189.339.904	(37.675.924.494)	295.882.120.259	299.916.727.809
226.397.283.185	630.156.763.506	32.595.082.752	196.220.711.752	204.220.711.752
803.323.462.155	936.192.614.541	(106.580.127.182)	680.821.662.228	724.018.662.228
248.269.958.970	340.683.173.357	40.331.103.493	150.846.262.384	152.083.497.465
287.172.293.105	370.141.331.155	(5.431.223.118)	296.717.192.431	299.832.852.431
213.177.066.265	327.136.709.459	(7.718.134.651)	241.375.811.876	245.375.811.876
270.255.320.949	386.655.657.749	19.743.590.121	274.275.246.355	276.882.746.355
431.347.308.138	444.587.079.517	52.388.788.067	232.418.915.703	238.334.915.703
221.040.113.074	168.336.826.221	(12.405.069.389)	107.861.431.441	110.611.431.441
315.430.879.038	174.462.849.355	107.282.781.845	428.429.158.907	435.429.158.907
210.842.025.393	182.413.227.390	96.699.459.763	242.435.719.588	254.542.687.293
466.424.196.490	337.647.558.967	25.652.148.800	291.186.750.378	322.985.750.378
235.051.727.769	135.968.848.097	10.760.327.784	161.612.693.890	194.695.546.890
205.136.569.134	159.178.160.741	(2.016.682.538)	101.768.327.763	101.768.327.763
198.066.714.766	74.291.701.183	128.312.809.130	168.724.944.192	168.724.944.192
2.125.973.133.026	1.785.125.255.500	128.671.401.405	1.286.258.405.500	1.311.550.405.500
147.571.270.561	281.882.302.047	(93.996.079.633)	185.488.305.701	185.488.305.701

SILPA TA sebelumnya	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Pencairan dana cadangan	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
2.450.199.381.449	-	-	-	-
187.125.855.618	-	-	68.573.949.681	-
334.447.460.075	-	-	-	42.600.000
225.163.176.125	-	10.173.792.210	-	215.559.846
370.132.818.020	-	11.491.386.433	-	-
159.600.894.512	-	-	-	38.308.500
210.456.476.226	-	-	-	22.696.900
404.694.375.001	-	-	-	228.093.339
355.195.113.339	-	-	68.267.779	444.889.774
638.545.317.370	-	33.344.548.609	1.002.498.440	-
165.213.664.219	-	-	22.670.000.000	-
297.164.413.532	-	-	-	1.249.796.500
226.786.121.367	-	-	-	22.521.861
223.224.008.481	-	-	-	13.545.978.182
390.957.110.051	-	36.204.086.222	-	-
420.729.743.639	-	27.782.531.621	-	-
316.161.387.041	-	-	-	3.246.144.044
247.815.559.318	-	24.000.000.000	-	-
129.225.801.703	-	-	-	-
335.184.761.362	-	-	-	22.875.000
468.595.491.563	-	-	-	-
189.529.114.682	-	10.000.000.000	16.920.000	-
295.362.421.098	-	-	-	4.554.306.710
202.220.711.752	-	2.000.000.000	-	-
714.592.863.004	-	-	-	9.425.799.224
128.956.511.628	-	23.019.770.710	-	107.215.127
275.734.726.172	-	23.898.284.914	-	199.841.345
237.910.578.958	-	7.000.000.000	-	465.232.918
250.431.954.314	-	23.985.443.289	241.209.052	2.224.139.700
238.334.915.703	-	-	-	-
107.169.829.064	-	-	-	3.441.602.377
435.429.158.907	-	-	-	-
254.529.474.293	-	-	-	13.213.000
322.985.750.378	-	-	-	-
166.994.046.690	-	-	2.701.500.200	25.000.000.000
97.669.281.185	-	4.038.609.000	-	60.437.578
168.724.944.192	-	-	-	-
1.311.544.540.067	-	-	5.865.433	-
185.488.305.701	-	-	-	-

Pengeluaran	Pembentukan Dana Cadangan	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Pembayaran Pokok Utang	Pemberian Pinjaman Daerah
235.333.333.333	-	225.000.000.000	10.333.333.333	-
7.550.000.000	5.000.000.000	2.550.000.000	-	-
20.000.000	-	-	-	20.000.000
1.402.890	-	-	1.402.890	-
102.500.000.000	-	102.500.000.000	-	-
3.500.000.000	-	3.500.000.000	-	-
-	-	-	-	-
3.625.000.000	-	-	3.625.000.000	-
5.597.542.500	-	5.500.000.000	97.542.500	-
205.196.226.070	200.000.000.000	5.000.000.000	196.226.070	-
26.900.000.000	-	26.900.000.000	-	-
32.673.413.862	28.267.000.000	-	2.291.413.862	2.115.000.000
14.818.653.115	10.000.000.000	4.818.653.115	-	-
25.285.000.000	10.000.000.000	4.617.000.000	-	10.668.000.000
8.111.913.987	1.515.584.449	5.596.329.538	1.000.000.000	-
6.008.457.100	6.008.457.100	-	-	-
9.886.700.000	-	9.886.700.000	-	-
-	-	-	-	-
950.000.000	-	950.000.000	-	-
12.614.681.538	5.621.481.538	6.993.200.000	-	-
96.610.000	-	-	96.610.000	-
-	-	-	-	-
4.034.607.550	-	200.000.000	9.607.550	3.825.000.000
8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	-
43.197.000.000	-	43.197.000.000	-	-
1.237.235.081	687.235.081	550.000.000	-	-
3.115.660.000	3.115.660.000	-	-	-
4.000.000.000	-	4.000.000.000	-	-
2.607.500.000	-	-	-	2.607.500.000
5.916.000.000	-	3.998.000.000	1.918.000.000	-
2.750.000.000	-	2.750.000.000	-	-
7.000.000.000	-	7.000.000.000	-	-
12.106.967.705	-	12.106.967.705	-	-
31.799.000.000	-	31.799.000.000	-	-
33.082.853.000	33.082.853.000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
25.292.000.000	-	25.292.000.000	-	-
-	-	-	-	-

No	Daerah	Pendapatan	PAD	Pajak daerah	Retribusi daerah
0	Prov. Jawa Timur	24.962.122.477.070	15.817.795.024.797	12.772.227.117.585	133.587.973.920
1	Kab. Bangkalan	1.831.923.426.366	200.083.202.454	32.293.793.766	15.233.482.779
2	Kab. Banyuwangi	2.805.619.073.707	367.872.665.894	120.827.802.565	34.591.082.032
3	Kab. Blitar	2.240.251.740.265	224.106.765.169	60.225.564.852	20.571.025.214
4	Kab. Bojonegoro	3.004.084.557.599	340.407.679.609	79.130.307.792	47.942.264.034
5	Kab. Bondowoso	1.945.061.615.768	177.025.949.242	24.822.529.005	15.602.635.364
6	Kab. Gresik	2.522.076.193.169	715.480.938.191	412.112.744.757	77.108.109.541
7	Kab. Jember	3.192.000.871.973	524.137.897.017	136.545.418.829	36.311.518.801
8	Kab. Jombang	2.257.068.907.782	374.141.185.826	91.478.979.886	41.890.164.298
9	Kab. Kediri	2.395.721.451.016	339.113.897.822	135.729.306.115	29.143.172.326
10	Kab. Lamongan	2.719.031.205.757	403.474.462.147	114.982.290.275	27.118.546.726
11	Kab. Lumajang	1.842.511.574.633	242.111.541.252	47.424.601.696	26.736.374.317
12	Kab. Madiun	1.727.312.699.929	163.635.265.621	42.824.119.771	23.967.526.083
13	Kab. Magetan	1.670.356.413.328	165.617.751.404	36.794.662.287	18.487.561.106
14	Kab. Malang	3.439.632.063.349	502.754.981.975	191.399.578.173	40.830.674.619
15	Kab. Mojokerto	2.171.204.423.133	447.620.851.329	251.510.014.781	37.221.622.169
16	Kab. Nganjuk	2.097.461.647.981	323.045.177.742	74.267.774.969	23.449.787.948
17	Kab. Ngawi	1.977.837.459.069	195.606.461.847	41.867.576.220	15.637.879.459
18	Kab. Pacitan	1.527.531.210.971	150.466.067.821	26.909.423.085	25.854.036.797
19	Kab. Pamekasan	1.827.846.755.475	178.478.890.964	26.949.852.758	13.415.336.487
20	Kab. Pasuruan	2.821.450.055.077	480.758.720.671	239.596.481.122	46.002.640.748
21	Kab. Ponorogo	2.026.630.853.799	240.111.321.574	63.109.161.849	9.584.997.879
22	Kab. Probolinggo	1.973.351.632.760	221.719.364.518	44.177.889.178	24.754.164.125
23	Kab. Sampang	1.716.788.104.536	135.785.953.318	16.592.698.918	11.330.664.854
24	Kab. Sidoarjo	3.668.041.957.747	1.335.283.958.793	735.767.679.183	106.606.736.349
25	Kab. Situbondo	1.580.583.084.970	173.836.184.925	30.080.834.208	13.682.597.701
26	Kab. Sumenep	2.059.564.134.915	208.982.186.961	17.736.010.382	25.080.452.415
27	Kab. Trenggalek	1.632.638.563.154	182.174.291.709	27.137.030.741	16.332.361.143
28	Kab. Tuban	2.183.545.377.124	364.133.296.890	173.837.492.598	21.916.473.831
29	Kab. Tulungagung	2.570.279.524.128	342.570.756.799	67.457.168.815	22.674.086.533
30	Kota Blitar	847.187.760.012	131.920.190.721	26.001.646.560	9.658.868.726
31	Kota Kediri	1.179.920.839.071	238.318.315.508	87.639.179.628	9.989.929.185
32	Kota Madiun	998.282.330.538	173.235.929.828	64.045.559.079	16.762.538.293
33	Kota Malang	1.741.394.250.710	477.541.556.465	374.641.673.420	42.782.439.061
34	Kota Mojokerto	806.772.000.828	152.462.202.065	35.333.988.083	13.006.473.471
35	Kota Pasuruan	789.261.025.155	147.818.815.719	28.724.678.121	7.909.252.959
36	Kota Probolinggo	886.186.420.397	171.307.335.437	31.076.858.870	12.831.539.509
37	Kota Surabaya	6.825.754.275.892	4.090.206.769.388	3.000.152.384.487	339.453.230.306
38	Kota Batu	803.450.046.048	109.533.498.034	88.757.389.919	5.855.560.775

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Daper	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Dana Alokasi Umum
364.325.988.476	2.547.653.944.816	9.039.003.358.881	1.849.884.362.367	1.672.878.372.000
1.818.642.737	150.737.283.172	1.354.664.114.508	89.023.681.508	1.012.242.530.000
15.066.252.031	197.387.529.267	1.847.137.392.967	89.415.397.750	1.400.384.500.000
1.713.060.985	141.597.114.118	1.599.003.618.435	68.121.491.880	1.128.511.321.000
19.708.469.371	193.626.638.411	1.994.205.631.703	909.808.298.244	949.118.065.000
3.749.916.351	132.850.868.522	1.297.761.524.802	71.334.375.370	926.596.442.000
15.393.353.604	210.866.730.290	1.336.689.003.743	149.468.790.396	923.469.024.000
5.410.275.625	345.870.683.762	2.279.360.485.155	138.965.088.155	1.709.892.845.000
2.434.763.292	238.337.278.350	1.479.449.655.860	85.303.667.270	1.111.301.450.000
7.737.531.393	166.503.887.988	1.647.816.793.647	97.026.501.597	1.242.230.783.000
22.454.128.198	238.919.496.948	1.708.680.363.941	98.267.648.141	1.166.655.654.000
2.955.914.935	164.994.650.304	1.286.208.545.624	69.373.241.624	990.248.409.000
4.775.854.348	92.067.765.419	1.286.874.686.970	61.283.188.512	893.565.762.000
2.272.143.759	108.063.384.253	1.240.909.563.966	60.433.681.317	916.052.436.000
14.294.282.184	256.230.446.999	2.308.269.278.031	145.219.916.051	1.694.884.660.000
4.556.188.443	154.333.025.936	1.315.350.439.444	80.808.790.924	991.180.363.000
3.541.913.722	221.785.701.103	1.438.057.806.688	76.916.649.574	1.078.695.643.000
9.282.208.785	128.818.797.383	1.468.168.730.397	74.196.426.014	1.058.208.375.000
2.425.176.653	95.277.431.286	1.087.172.953.668	56.876.719.010	807.907.686.000
1.834.159.904	136.279.541.815	1.300.979.780.444	91.983.362.313	862.935.567.000
2.532.857.295	192.626.741.506	1.831.738.785.197	274.973.151.548	1.200.611.830.000
1.026.082.628	166.391.079.218	1.455.939.797.771	68.100.582.458	1.062.582.799.000
5.491.010.522	147.296.300.694	1.320.791.144.299	95.147.640.501	977.570.137.000
6.208.899.768	101.653.689.778	1.231.099.448.705	74.204.892.211	827.952.746.000
26.888.797.901	466.020.745.360	1.690.087.946.119	157.448.130.456	1.225.261.302.000
4.316.450.161	125.756.302.855	1.171.851.135.392	74.028.875.610	821.084.393.000
15.151.337.010	151.014.387.154	1.519.918.959.175	128.057.691.068	1.110.487.853.000
4.412.832.126	134.292.067.699	1.217.293.670.903	65.902.375.636	901.379.781.000
11.081.531.775	157.297.798.687	1.443.895.947.283	118.421.225.440	1.046.758.509.000
4.553.186.053	247.886.315.398	1.726.713.610.875	76.715.573.584	1.172.557.802.000
1.023.333.373	95.236.342.062	622.676.097.741	56.541.040.622	428.743.959.000
1.517.999.709	139.171.206.987	842.341.149.826	125.649.030.826	617.780.644.000
11.172.031.995	81.255.800.461	717.561.434.206	65.339.045.850	511.375.289.000
15.785.980.797	44.331.463.187	1.069.366.446.979	114.874.411.979	859.678.208.000
3.448.803.750	100.672.936.761	555.962.488.047	55.436.957.047	397.094.498.000
4.448.161.981	106.736.722.658	575.800.437.680	51.513.313.785	432.090.225.000
997.533.281	126.401.403.776	613.373.714.039	59.828.576.539	470.212.966.000
131.847.096.407	618.754.058.188	1.941.019.526.654	412.788.910.654	1.233.380.404.000
2.152.462.133	12.768.085.207	624.840.719.033	51.317.087.281	480.460.016.000

Dana Alokasi Khusus	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Hibah	Dana darurat	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya
5.516.240.624.514	105.324.093.392	42.958.979.806	-	-
253.397.903.000	277.176.109.404	2.546.046.600	-	83.383.225.377
357.337.495.217	590.609.014.846	160.993.637.741	-	169.192.796.505
402.370.805.555	417.141.356.661	18.643.741.720	-	125.626.082.941
135.279.268.459	669.471.246.287	10.000.000.000	-	119.702.111.287
299.830.707.432	470.274.141.724	90.156.129.297	-	73.290.896.927
263.751.189.347	469.906.251.235	21.439.914.873	-	181.169.348.862
430.502.552.000	388.502.489.801	-	-	178.117.385.301
282.844.538.590	403.478.066.096	1.598.448.599	-	131.311.278.997
308.559.509.050	408.790.759.547	13.425.279.000	-	150.428.818.358
443.757.061.800	606.876.379.669	33.798.834.669	-	136.756.685.000
226.586.895.000	314.191.487.757	33.341.808.344	-	101.201.945.513
332.025.736.458	276.802.747.338	15.498.000.000	-	89.588.628.338
264.423.446.649	263.829.097.958	1.998.000.000	-	88.926.125.958
468.164.701.980	628.607.803.343	25.316.252.600	-	173.895.369.122
243.361.285.520	408.233.132.360	912.718.058	229.523.905.000	136.065.134.302
282.445.514.114	336.358.663.551	6.878.233.400	-	110.411.191.701
335.763.929.383	314.062.266.825	16.872.809.625	-	92.583.401.600
222.388.548.658	289.892.189.482	10.000.000.000	-	64.636.665.482
346.060.851.131	348.388.084.067	11.300.665.000	-	82.085.357.067
356.153.803.649	508.952.549.209	34.162.409.766	-	157.800.347.443
325.256.416.313	330.579.734.454	25.815.065.567	-	101.885.068.887
248.073.366.798	430.841.123.942	41.936.856.978	-	97.492.599.464
328.941.810.494	349.902.702.513	1.283.126.355	-	72.648.406.158
307.378.513.663	642.670.052.835	6.471.000.000	-	337.206.831.360
276.737.866.782	234.895.764.653	6.709.843.000	-	78.067.243.653
281.373.415.107	330.662.988.779	1.277.697.500	-	83.029.447.279
250.011.514.267	233.170.600.542	3.000.000.000	-	80.536.962.542
278.716.212.843	375.516.132.951	-	-	123.720.213.951
477.440.235.291	500.995.156.454	16.683.429.868	-	134.852.032.586
137.391.098.119	92.591.471.551	19.284.423.542	-	60.846.898.009
98.911.475.000	99.261.373.737	-	-	79.760.622.737
140.847.099.356	107.484.966.504	-	-	64.431.714.504
94.813.827.000	194.486.247.266	12.606.000.000	-	171.619.907.266
103.431.033.000	98.347.310.716	-	-	57.047.057.716
92.196.898.895	65.641.771.756	267.000.000	-	-
83.332.171.500	101.505.370.921	-	-	65.288.012.921
294.850.212.000	794.527.979.850	-	-	786.702.579.850
93.063.615.752	69.075.828.981	-	-	66.842.910.981

Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	Lain-lain	Belanja	Belanja Tidak Langsung
62.365.113.586	-	-	23.859.953.926.118	17.167.107.103.864
178.481.051.000	12.494.320.000	271.466.427	1.944.897.677.149	1.166.015.889.005
174.389.854.100	86.032.726.500	-	3.095.291.585.673	1.621.811.336.737
175.933.652.000	-	96.937.880.000	2.368.672.195.620	1.328.482.850.693
516.169.848.500	23.599.286.500	-	3.244.665.911.399	1.650.497.139.000
142.509.649.000	164.317.466.500	-	1.992.640.093.665	1.080.558.699.043
241.940.391.000	25.354.766.500	1.830.000	2.552.245.208.369	1.466.012.473.505
195.535.358.000	-	14.849.746.500	2.979.940.928.164	2.006.405.230.046
45.777.657.000	33.044.866.500	191.745.815.000	2.364.581.573.271	1.469.294.238.230
218.640.097.000	-	26.296.565.189	2.617.072.095.866	1.632.634.447.321
-	-	436.320.860.000	2.796.049.237.223	1.747.596.897.580
171.061.506.000	8.571.046.500	15.181.400	1.934.507.119.990	1.264.660.984.906
166.637.279.000	-	5.078.840.000	1.834.089.868.120	1.124.852.578.187
132.243.618.000	39.641.320.000	1.020.034.000	1.775.919.398.050	1.210.531.334.316
285.647.131.000	143.749.050.621	-	3.543.281.420.694	2.198.443.984.557
41.731.375.000	-	-	2.259.797.937.481	1.427.336.411.509
211.259.059.000	7.810.179.450	-	2.201.118.780.939	1.361.026.275.302
182.608.675.600	-	21.997.380.000	2.036.077.500.396	1.349.615.479.845
144.932.284.000	70.323.240.000	-	1.644.719.320.619	1.004.123.019.404
162.546.242.000	-	92.455.820.000	1.864.638.211.689	1.067.178.958.263
256.245.292.000	-	60.744.500.000	3.159.908.257.413	1.644.151.080.983
183.007.020.000	19.872.580.000	-	2.100.639.906.306	1.392.279.000.410
253.157.681.000	-	38.253.986.500	2.038.786.352.784	1.193.656.853.802
172.731.350.000	103.239.820.000	-	1.778.548.485.251	980.766.526.878
243.578.494.975	-	55.413.726.500	3.651.619.251.558	2.020.301.091.404
87.460.278.000	-	62.658.400.000	1.659.809.374.323	955.812.128.018
213.894.164.000	32.461.680.000	-	2.048.692.697.927	1.345.634.676.875
98.943.538.000	-	50.690.100.000	1.514.164.750.369	863.769.682.552
198.514.339.000	-	53.281.580.000	2.219.079.048.791	1.437.767.548.935
203.796.214.000	145.663.480.000	-	2.606.293.854.903	1.534.651.124.833
5.000.000.000	7.460.150.000	-	857.795.223.708	375.002.227.438
439.121.000	-	19.061.630.000	1.484.725.405.962	757.369.499.872
41.382.622.000	1.670.630.000	-	1.031.564.193.296	467.715.646.396
5.000.000.000	5.260.340.000	-	1.710.077.444.260	934.400.017.851
39.955.923.000	-	1.344.330.000	944.717.143.505	344.294.332.081
-	61.639.671.756	3.735.100.000	785.408.101.775	431.583.720.518
-	-	36.217.358.000	911.768.784.365	454.230.206.759
-	-	7.825.400.000	7.151.661.549.430	2.775.577.114.891
-	1.580.120.000	652.798.000	819.686.549.126	446.489.275.384

Belanja Pegawai TL	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
2.889.889.317.480	1.753.220.486	-	7.436.283.341.899	16.443.941.870
844.953.144.449	7.318.366.927	-	20.993.126.000	137.000.000
1.313.530.781.770	-	-	60.034.851.251	8.063.209.736
1.035.116.254.396	-	-	21.513.900.000	675.480.000
1.031.086.513.509	-	125.000.000	49.423.026.849	4.036.080.000
795.481.546.926	-	-	31.423.560.000	3.320.000.000
846.627.176.219	-	-	162.942.989.794	24.661.099.009
1.551.146.463.350	-	-	45.445.193.486	52.317.524.000
1.024.973.451.933	-	-	63.783.125.400	2.778.574.000
1.141.457.233.145	17.580.629	-	47.155.724.370	17.295.843.139
1.083.598.717.969	-	-	162.208.019.801	33.702.488.504
850.460.391.092	-	-	100.026.167.533	24.016.354.509
846.792.238.082	-	473.435.500	35.854.880.085	6.214.400.000
893.998.549.611	-	-	71.897.995.970	4.759.120.000
1.629.860.712.508	-	-	90.587.169.480	12.476.650.000
1.020.082.759.743	-	-	27.190.514.455	6.459.760.000
1.052.985.490.168	-	-	20.965.736.811	6.762.925.600
1.005.208.091.446	-	-	49.453.446.192	3.253.980.000
700.953.390.724	-	-	24.282.642.656	6.599.373.506
779.736.858.382	-	-	58.476.986.475	8.281.116.000
1.129.377.649.345	-	-	91.230.627.250	13.250.602.828
1.016.699.662.533	-	-	16.019.522.152	15.199.269.500
811.471.972.352	-	-	41.031.420.000	10.442.100.000
654.882.443.581	-	-	92.510.078.163	14.369.662.959
1.408.072.999.732	-	-	132.100.932.100	46.763.307.000
747.090.164.125	-	-	21.802.863.000	609.200.000
921.858.081.259	-	-	40.157.930.800	15.736.630.000
825.606.271.287	-	-	24.990.553.314	6.016.137.000
976.169.868.729	-	-	104.214.938.190	19.808.542.250
1.168.271.210.637	-	-	55.278.056.240	14.173.071.920
333.338.074.738	-	1.311.840.000	15.471.036.250	23.723.011.500
629.313.602.735	-	-	87.667.886.906	38.955.935.001
457.736.983.096	-	-	4.895.131.600	4.455.685.000
875.928.415.559	-	-	57.425.620.000	-
311.304.558.357	-	-	30.641.818.992	1.829.303.500
389.444.110.348	-	-	29.638.140.800	11.948.446.950
428.462.320.552	-	33.060.000	22.092.733.000	1.298.850.000
2.540.955.293.099	-	19.005.408.000	214.488.143.792	-
308.088.979.621	-	-	90.188.121.331	7.905.270.639

Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Belanja Tidak Terduga	Belanja Langsung	Belanja Pegawai L
5.015.881.820.822	1.787.383.313.823	19.472.147.484	6.692.846.822.254	-
1.987.949.700	290.626.301.929	-	778.881.788.144	183.966.439.898
2.443.754.650	236.800.876.330	937.863.000	1.473.480.248.936	-
10.683.566.197	260.378.658.600	114.991.500	1.040.189.344.927	-
13.227.227.542	551.182.739.500	1.416.551.600	1.594.168.772.399	182.923.705.271
-	250.333.592.117	-	912.081.394.622	-
35.365.145.000	396.152.916.527	263.146.956	1.086.232.734.864	110.520.771.922
13.632.616.998	343.863.432.212	-	973.535.698.118	-
-	377.742.356.497	16.730.400	895.287.335.041	56.587.117.969
17.697.670.444	408.511.166.700	499.228.894	984.437.648.544	-
1.595.199.501	466.492.471.805	-	1.048.452.339.643	-
3.391.300.255	285.676.793.367	1.089.978.150	669.846.135.083	-
3.476.552.300	232.041.072.220	-	709.237.289.933	-
-	239.834.443.335	41.225.400	565.388.063.734	-
28.682.058.301	429.346.209.612	7.491.184.657	1.344.837.436.137	-
31.342.978.054	342.260.399.257	-	832.461.525.972	-
6.273.321.000	273.960.776.723	78.025.000	840.092.505.636	47.846.038.030
6.085.514.500	285.604.447.706	10.000.000	686.462.020.551	-
271.422.709.018	-	864.903.500	640.596.301.215	-
2.350.239.630	218.062.215.776	271.542.000	797.459.253.426	-
29.939.419.393	374.473.285.249	5.879.496.918	1.515.757.176.429	-
6.988.363.360	328.389.062.500	8.983.120.365	708.360.905.896	63.017.707.821
5.459.553.000	322.771.770.650	2.480.037.800	845.129.498.982	-
1.222.799.423	217.135.011.752	646.531.000	797.781.958.373	-
429.296.994.485	1.212.936.674	2.853.921.413	1.631.318.160.154	-
2.298.245.000	184.011.655.893	-	703.997.246.305	-
-	366.505.495.016	1.376.539.800	703.058.021.053	60.866.254.783
7.137.220.951	-	19.500.000	650.395.067.817	-
18.022.134.184	315.089.013.183	4.463.052.399	781.311.499.856	-
6.776.270.151	289.105.939.735	1.046.576.150	1.071.642.730.070	-
-	499.969.500	658.295.450	482.792.996.269	-
-	727.060.675	705.014.555	727.355.906.090	-
-	627.846.700	-	563.848.546.900	53.506.231.170
78.766.200	635.264.957	331.951.135	775.677.426.409	-
-	518.651.232	-	600.422.811.424	-
-	472.620.420	80.402.000	353.824.381.257	-
-	575.955.036	1.767.288.171	457.538.577.606	-
-	1.128.270.000	-	4.376.084.434.539	-
8.156.890.439	31.023.137.854	1.126.875.500	373.197.273.742	-

Belanja Barang dan jasa	Belanja Modal	Surplus/Defisit	Pembiayaan	Penerimaan
4.542.252.711.211	2.150.594.111.043	1.102.168.550.952	756.780.606.345	1.565.113.939.678
182.091.912.628	412.823.435.617	(112.974.250.783)	188.069.684.366	198.069.684.366
561.895.916.790	911.584.332.145	(289.672.511.966)	371.778.867.493	371.778.867.493
347.470.574.670	692.718.770.257	(128.420.455.355)	266.029.625.369	284.673.367.089
443.328.061.717	967.917.005.412	(240.581.353.800)	325.353.890.216	340.353.890.216
486.656.304.802	425.425.089.820	(47.578.477.897)	168.934.198.193	180.934.198.193
562.372.304.570	413.339.658.373	(30.169.015.200)	98.031.509.826	117.460.484.594
513.084.397.271	460.451.300.847	212.059.943.809	437.495.579.228	437.495.579.228
473.798.460.300	364.901.756.772	(107.512.665.490)	337.174.639.048	337.174.639.048
372.385.511.003	612.052.137.541	(221.350.644.850)	694.956.441.964	754.877.740.635
431.952.617.670	616.499.721.973	(77.018.031.466)	147.330.386.946	214.085.381.615
321.960.533.775	347.885.601.308	(91.995.545.357)	276.323.350.590	314.197.158.934
265.429.017.043	443.808.272.890	(106.777.168.191)	227.242.047.943	254.040.047.943
278.444.115.263	286.943.948.471	(105.562.984.721)	152.511.189.169	178.353.189.169
660.905.089.835	683.932.346.302	(103.649.357.345)	321.093.880.268	352.093.880.268
390.128.119.782	442.333.406.190	(88.593.514.348)	379.068.101.211	381.068.101.211
344.516.959.010	447.729.508.596	(103.657.132.958)	337.987.719.882	344.193.089.882
331.087.349.965	355.374.670.586	(58.240.041.327)	324.035.821.713	347.308.631.337
261.429.303.999	379.166.997.217	(117.188.109.649)	175.564.491.271	176.514.491.271
253.293.433.847	544.165.819.579	(36.791.456.214)	235.110.516.099	253.361.896.366
677.317.121.648	838.440.054.782	(338.458.202.335)	518.957.074.698	543.355.118.167
268.940.559.208	376.402.638.867	(74.009.052.507)	144.625.550.492	171.440.616.059
555.481.838.274	289.647.660.708	(65.434.720.024)	207.386.519.319	262.365.607.298
233.782.269.397	563.999.688.976	(61.760.380.715)	214.815.794.504	230.815.794.504
821.320.659.096	809.997.501.058	16.422.706.188	567.569.496.655	582.812.496.655
287.133.702.026	416.863.544.279	(79.226.289.353)	191.407.062.943	191.407.241.041
370.177.191.111	272.014.575.159	10.871.436.987	278.785.969.313	291.285.969.313
287.554.773.436	362.840.294.381	118.473.812.785	230.860.491.965	233.860.491.965
317.131.339.734	464.180.160.121	(35.533.671.667)	293.728.141.810	296.698.141.810
497.301.411.580	574.341.318.491	(36.014.330.776)	245.111.173.187	284.804.899.767
279.421.115.874	203.371.880.396	(10.607.463.695)	73.089.836.490	96.124.260.031
345.510.396.361	381.845.509.730	(304.804.566.891)	535.711.940.752	535.711.940.752
263.947.611.009	246.394.704.721	(33.281.862.759)	339.139.349.353	339.139.349.353
582.010.262.017	193.667.164.391	31.316.806.450	273.688.899.177	316.838.899.177
296.685.708.092	303.737.103.331	(137.945.142.677)	169.060.076.674	172.525.076.674
181.315.635.757	172.508.745.500	3.852.923.380	102.819.550.736	103.049.411.976
309.832.797.580	147.705.780.026	(25.582.363.968)	294.537.753.323	297.037.753.323
2.586.690.389.712	1.789.394.044.827	(325.907.273.539)	1.394.942.990.241	1.414.942.990.241
198.828.565.415	174.368.708.327	(16.236.503.078)	88.492.226.068	91.492.226.068

SILPA TA sebelumnya	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Pencairan dana cadangan	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1.497.008.706.345	-	-	-	68.105.233.333
197.494.091.004	-	-	-	575.593.362
371.732.557.493	-	-	-	46.310.000
284.511.344.286	-	-	-	162.022.803
333.422.039.568	-	-	6.931.850.648	-
180.837.794.993	-	-	-	96.403.200
117.439.504.844	-	-	-	20.979.750
437.466.356.061	-	-	-	29.223.167
336.445.575.812	-	-	708.278.761	20.784.475
510.816.430.976	-	241.500.000.000	-	2.561.309.660
189.685.381.615	-	-	-	24.400.000.000
312.815.223.634	-	-	1.381.935.300	-
253.894.803.240	-	-	-	145.244.703
166.991.262.351	-	-	11.361.926.818	-
352.093.880.268	-	-	-	-
381.068.101.211	-	-	-	-
343.338.702.213	-	-	854.387.670	-
347.308.631.337	-	-	-	-
146.414.491.271	-	-	-	30.100.000.000
253.232.313.866	-	-	-	129.582.500
543.331.118.167	-	-	-	24.000.000
171.440.616.059	-	-	-	-
258.206.195.765	-	-	-	4.159.411.533
228.815.794.504	-	-	-	2.000.000.000
574.241.435.046	-	-	-	8.571.061.609
191.177.365.877	-	-	-	229.875.164
291.285.969.313	-	-	-	-
233.657.677.225	-	-	-	202.814.740
294.018.836.475	-	-	400.059.135	2.279.246.200
284.804.899.767	-	-	-	-
95.456.361.952	-	-	-	667.898.079
535.711.940.752	-	-	-	-
339.135.179.353	-	-	-	4.170.000
316.838.899.177	-	-	-	-
172.373.021.674	-	-	152.055.000	-
99.751.645.225	-	3.192.691.000	-	105.075.751
297.037.753.323	-	-	-	-
1.414.929.806.905	-	-	-	13.183.336
91.492.226.068	-	-	-	-

Pengeluaran	Pembentukan Dana Cadangan	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Pembayaran Pokok Utang	Pemberian Pinjaman Daerah
808.333.333.333	400.000.000.000	-	8.333.333.333	400.000.000.000
10.000.000.000	7.500.000.000	2.500.000.000	-	-
-	-	-	-	-
18.643.741.720	-	18.643.741.720	-	-
15.000.000.000	-	15.000.000.000	-	-
12.000.000.000	10.000.000.000	2.000.000.000	-	-
19.428.974.768	-	19.428.974.768	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
59.921.298.671	41.500.000.000	18.225.072.601	196.226.070	-
66.754.994.669	-	66.698.834.669	-	56.160.000
37.873.808.344	3.367.000.000	33.341.808.344	-	1.165.000.000
26.798.000.000	20.000.000.000	6.798.000.000	-	-
25.842.000.000	10.000.000.000	5.998.000.000	-	9.844.000.000
31.000.000.000	-	30.000.000.000	1.000.000.000	-
2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	-
6.205.370.000	-	6.205.370.000	-	-
23.272.809.624	-	23.272.809.624	-	-
950.000.000	-	950.000.000	-	-
18.251.380.266	5.850.380.266	12.401.000.000	-	-
24.398.043.469	-	24.398.043.469	-	-
26.815.065.567	-	26.815.065.567	-	-
54.979.087.978	25.000.000.000	26.805.087.978	-	3.174.000.000
16.000.000.000	10.000.000.000	6.000.000.000	-	-
15.243.000.000	-	15.243.000.000	-	-
178.098	178.098	-	-	-
12.500.000.000	12.500.000.000	-	-	-
3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	-
2.970.000.000	-	2.970.000.000	-	-
39.693.726.580	21.010.296.712	18.683.429.868	-	-
23.034.423.542	-	23.034.423.542	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
43.150.000.000	-	43.150.000.000	-	-
3.465.000.000	-	3.465.000.000	-	-
229.861.240	-	-	229.861.240	-
2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	-
20.000.000.000	-	20.000.000.000	-	-
3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	-

Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2017

No.	Daerah	Pendapatan	PAD	Pajak daerah	Retribusi daerah
0.	Prov. Jawa Timur	29.879.141.546.244	17.326.461.167.059	14.350.601.626.319	131.444.291.907
1.	Kab. Bangkalan	2.150.707.945.802	288.169.316.521	41.923.843.163	14.604.898.610
2.	Kab. Banyuwangi	2.732.022.630.344	388.943.496.249	152.811.852.024	35.705.632.087
3.	Kab. Blitar	2.307.812.881.171	322.878.943.149	72.898.485.986	22.794.307.583
4.	Kab. Bojonegoro	3.024.029.866.919	448.017.580.391	87.889.266.165	54.288.552.382
5.	Kab. Bondowoso	1.924.903.618.064	229.151.109.431	29.749.104.709	16.743.731.887
6.	Kab. Gresik	2.742.201.536.264	872.228.498.248	496.995.074.543	78.798.888.987
7.	Kab. Jember	3.479.978.277.632	719.105.671.348	160.400.490.400	34.725.389.987
8.	Kab. Jombang	2.517.003.141.056	521.210.404.936	110.603.806.269	42.024.479.023
9.	Kab. Kediri	2.718.413.134.696	533.992.500.760	206.034.579.491	31.908.688.968
10.	Kab. Lamongan	2.701.131.869.974	428.950.822.806	142.025.801.530	30.574.992.331
11.	Kab. Lumajang	1.956.127.822.292	324.253.671.099	54.156.334.941	33.577.572.815
12.	Kab. Madiun	1.758.060.590.949	241.944.162.780	56.785.731.847	32.058.656.058
13.	Kab. Magetan	1.756.868.125.797	211.781.503.882	42.255.985.054	19.115.487.393
14.	Kab. Malang	3.741.308.774.032	743.172.086.456	255.851.109.884	38.438.995.560
15.	Kab. Mojokerto	2.335.531.986.035	500.518.075.937	312.444.817.424	41.026.808.823
16.	Kab. Nganjuk	2.300.163.558.717	332.497.755.198	81.975.131.175	23.644.104.388
17.	Kab. Ngawi	1.982.507.916.899	261.201.614.362	49.577.393.936	12.987.929.501
18.	Kab. Pacitan	1.655.537.179.548	202.090.671.761	29.748.463.837	25.989.347.391
19.	Kab. Pamekasan	1.906.188.051.044	243.296.609.520	35.053.956.091	15.433.251.468
20.	Kab. Pasuruan	3.063.763.102.812	759.943.107.968	383.743.763.643	41.354.143.308
21.	Kab. Ponorogo	2.214.480.664.192	307.514.848.129	72.556.475.111	11.196.255.819
22.	Kab. Probolinggo	2.102.334.365.784	295.143.262.357	58.008.585.644	24.541.325.700
23.	Kab. Sampang	1.602.900.659.350	207.333.596.907	20.557.363.425	10.917.030.412
24.	Kab. Sidoarjo	3.786.474.668.613	1.680.816.517.213	925.569.237.852	80.187.712.760
25.	Kab. Situbondo	1.618.467.260.084	226.534.569.456	38.950.555.757	9.402.292.498
26.	Kab. Sumenep	2.160.901.919.642	190.662.453.132	24.095.356.184	12.734.295.205
27.	Kab. Trenggalek	1.791.672.372.539	253.205.318.428	32.037.072.828	17.792.882.721
28.	Kab. Tuban	2.254.573.848.769	405.151.374.672	194.965.683.128	24.254.293.105
29.	Kab. Tulungagung	2.598.104.487.657	503.103.394.883	85.826.143.046	23.258.789.789
30.	Kota Blitar	850.942.358.241	194.764.731.103	38.995.899.849	7.776.649.664
31.	Kota Kediri	1.239.131.382.633	293.065.134.148	111.457.000.110	10.509.049.281
32.	Kota Madiun	957.624.973.325	230.608.717.369	75.224.831.585	18.407.218.017
33.	Kota Malang	1.904.539.343.502	520.899.647.926	414.961.528.718	45.493.054.750
34.	Kota Mojokerto	782.331.264.434	178.295.062.136	47.423.790.376	7.661.594.956
35.	Kota Pasuruan	839.164.715.189	165.782.962.386	36.680.884.915	8.114.466.290
36.	Kota Probolinggo	798.327.251.491	106.208.757.540	38.751.166.706	13.066.856.389
37.	Kota Surabaya	8.015.183.293.117	5.143.454.700.619	3.595.670.492.734	556.356.195.651

38.	Kota Batu	849.411.343.203	149.391.500.585	113.850.587.243	4.899.198.825
-----	-----------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Dana Perimbangan	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Dana alokasi umum
374.274.618.110	2.470.140.630.722	12.494.048.645.633	1.634.524.587.316	3.803.428.371.000
1.853.306.551	229.787.268.198	1.452.478.980.467	77.127.718.447	994.460.684.000
16.097.796.146	184.328.215.992	73.020.530.894		73.020.530.894
1.750.815.678	225.435.333.902	1.543.625.115.315	-	-
18.231.016.223	287.608.745.621	1.887.900.309.658		1.887.900.309.658
3.805.729.059	178.852.543.775	1.311.071.739.391		1.311.071.739.391
13.631.162.210	282.803.372.507	1.063.291.806.060		1.063.291.806.060
5.481.870.425	518.497.920.535	2.309.229.753.650	-	-
2.578.293.963	366.003.825.681	1.486.041.199.349		1.486.041.199.349
8.169.396.038	287.879.836.263	1.683.437.725.657	-	-
23.093.187.444	233.256.841.502	75.480.934.027		75.480.934.027
2.983.324.804	233.536.438.539	1.317.925.709.276	-	-
5.499.956.457	147.599.818.418	1.180.876.436.337		1.180.876.436.337
2.261.660.664	148.148.370.771	1.243.820.501.734	-	-
15.817.903.642	433.064.077.371	2.299.979.677.583	128.179.963.798	1.665.110.987.000
4.625.347.676	142.421.102.015	1.343.618.935.383		1.343.618.935.383
3.402.661.149	223.475.858.486	1.503.523.174.920		1.503.523.174.920
9.419.268.742	189.217.022.183	1.408.235.808.936	65.798.320.241	1.039.619.057.000
2.439.361.626	143.913.498.907	52.713.507.009		52.713.507.009
1.868.949.378	190.940.452.583	1.337.421.843.722	-	-
4.532.637.901	330.312.563.115	2.080.303.031.668	-	-
1.038.286.209	222.723.830.990	1.433.075.787.760		1.433.075.787.760
5.560.291.653	207.033.059.361	1.345.461.046.956		1.345.461.046.956
6.251.369.919	169.607.833.151	1.104.228.648.147	55.059.310.923	818.929.326.000
29.304.699.967	645.754.866.634	119.779.273.575		119.779.273.575
4.047.068.404	174.134.652.797	1.091.000.194.656	-	-
20.122.055.248	133.710.746.495	1.505.652.308.070	-	-
4.557.686.916	198.817.675.962	1.194.709.714.127		1.194.709.714.127
11.023.833.733	174.907.564.705	1.388.016.057.302		1.388.016.057.302
5.165.807.050	388.852.654.997	66.135.619.328		66.135.619.328
1.053.268.432	146.938.913.159	50.365.609.429		50.365.609.429
1.995.845.163	169.103.239.595	839.311.216.993	-	-
13.320.249.415	123.656.418.352	46.005.454.815		46.005.454.815
16.490.014.841	43.955.049.617	1.174.719.580.753	113.684.568.188	844.576.426.000
3.616.145.198	119.593.531.607	519.341.294.299	-	-
4.477.984.472	116.509.626.709	540.344.889.909		540.344.889.909
1.403.455.530	52.987.278.914	624.680.851.085	53.402.332.042	461.952.836.000

134.668.941.612	856.759.070.622	1.965.635.624.698	-	-
2.360.797.997	28.280.916.521	589.620.610.974	43.445.796.142	474.779.517.000

Dana alokasi khusus	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Hibah	Dana darurat	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya
7.056.095.687.317	58.631.733.553	38.179.701.449		
380.890.578.020	410.059.648.814	18.067.307.300		110.764.920.314
	2.270.058.603.202	131.298.817.821		344.859.911.663
-	441.308.822.707	-	-	157.631.493.707
	688.111.976.870			151.511.693.833
	384.680.769.242	114.536.341.500		96.235.994.742
	806.681.231.956	2.338.796.190		
-	451.642.852.634	2.389.386.868	-	227.388.231.722
	509.751.536.771	5.468.816.858		163.133.533.258
-	500.982.908.279	-	-	186.109.359.344
	2.196.700.113.141	70.445.520.000		373.133.021.067
-	313.948.441.917	4.141.000.000	-	136.800.676.492
	335.239.991.832	3.498.000.000		
-	301.266.120.181	4.647.000.000	-	111.247.186.181
506.688.726.785	698.157.009.993	24.743.464.000		266.908.922.493
	491.394.974.715	76.287.128.045		165.363.630.770
	464.142.628.599	105.879.911.848		137.446.689.751
302.818.431.695	313.070.493.601	398.362.000		116.295.387.332
	1.400.733.000.778			234.751.256.308
-	325.469.597.802	5.369.150.500	-	104.631.522.926
-	223.516.963.176	7.706.787.975	-	-
	473.890.028.303	3.273.000.000		126.846.036.303
	461.730.056.471	11.652.622.550		124.624.899.421
230.240.011.224	291.338.414.296	17.013.516.432		95.739.000.864
	1.985.878.877.825			385.370.458.019
-	300.932.495.972	-	-	189.497.908.972
-	464.587.158.440	71.085.723.000	-	111.373.876.585
	343.757.339.984	23.786.000.000		102.169.372.384
	461.406.416.795			151.014.483.795
	2.028.865.473.446	11.000.000.000		376.013.545.735
	605.812.017.709			91.001.449.167
-	106.755.031.492	-	-	96.657.021.492
	681.010.801.141			77.267.422.860
216.458.586.565	208.920.114.823	10.305.000.000		188.341.184.823
-	84.694.907.999	-	-	71.619.577.999
	133.036.862.894			76.120.868.894
109.325.683.043	67.437.642.866			66.838.652.866
-	906.092.967.800	-	-	856.071.202.800

71.395.297.832	110.399.231.644			83.033.220.644
----------------	-----------------	--	--	----------------

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	Lain-lain	Belanja	Belanja Tidak Langsung
20.452.032.104			28.893.245.170.348	19.418.903.694.701
270.865.863.000	10.347.200.000	14.358.200	1.923.182.870.268	1.204.677.669.473
1.555.467.613.000	31.081.486.500	207.350.774.218	2.858.102.929.215	1.527.980.589.398
221.178.229.000	62.499.100.000	-	2.350.585.581.536	1.297.930.220.715
524.895.096.537	11.705.186.500		2.243.571.363.271	1.096.053.516.650
173.908.433.000			1.935.627.796.905	1.088.120.300.282
575.545.417.210	15.694.486.500	213.102.532.056	2.712.511.866.842	1.558.016.638.677
212.205.147.544	-	9.660.086.500	3.558.375.056.144	2.028.870.337.222
51.330.514.000		289.818.672.655	2.401.430.893.003	1.514.091.991.893
278.633.039.000	15.925.000.000	20.315.509.935	2.768.989.737.774	1.593.670.773.413
1.538.659.582.000	50.012.900.000	164.449.090.074	2.817.812.895.001	1.707.614.128.537
172.636.155.000	-	370.610.425	1.998.722.819.796	1.318.569.606.943
209.413.783.000	9.765.980.000	112.562.228.832	1.790.817.628.208	1.063.314.364.588
169.734.334.000	15.637.600.000	-	1.641.801.911.178	1.106.076.725.008
320.479.737.000	86.023.086.500	1.800.000	3.615.801.374.520	1.908.748.437.209
7.500.000.000	8.135.886.500	234.108.329.400	2.326.306.874.254	1.296.605.077.392
215.210.307.000	5.605.720.000		2.219.043.550.068	1.351.154.577.189
185.903.394.269	10.473.350.000		2.068.385.000.191	1.223.410.326.646
1.007.307.197.000	74.515.000.000	84.159.547.470	1.658.796.235.692	999.308.291.901
161.483.324.376	-	53.985.600.000	1.719.486.833.055	1.042.361.118.830
193.641.375.201	-	22.168.800.000	3.100.104.104.199	1.760.608.137.210
233.021.779.000	23.541.600.000	87.207.613.000	2.238.087.006.061	1.402.792.297.278
278.986.142.000	44.825.686.500	1.640.706.000	1.885.128.808.123	1.198.674.981.634
	11.093.300.000	167.492.597.000	1.663.952.052.579	917.934.286.613
1.203.737.401.000	14.855.346.500	381.915.672.306	3.872.284.663.094	2.146.371.536.601
111.434.587.000	-	-	1.611.319.203.889	945.199.238.253
271.522.438.855	-	10.605.120.000	2.059.747.888.386	1.385.318.456.188
181.671.057.600	36.130.910.000		1.759.709.021.297	989.015.369.389
302.322.233.000	348.000.000	7.721.700.000	2.443.869.040.528	1.470.930.272.848
1.405.269.992.000	74.247.486.500	162.334.449.211	2.808.565.468.202	1.667.420.228.362
428.712.306.000	11.521.930.000	74.576.332.542	786.297.309.172	273.495.204.355
7.500.000.000	2.598.010.000	-	1.269.944.308.581	673.180.319.069
509.892.070.000	14.025.784.159	79.825.524.122	1.260.849.189.624	657.134.599.520
7.500.000.000	2.773.930.000		1.746.539.609.578	778.379.835.897
7.500.000.000	5.575.330.000	-	739.086.252.868	268.074.660.410
44.572.977.000	2.390.500.000	9.952.517.000	819.522.697.452	338.260.959.039
	598.990.000		829.115.101.014	341.104.857.077

-	-	50.021.765.000	7.912.939.952.726	2.509.173.637.619
26.352.611.000	1.013.400.000		764.886.224.699	394.795.440.050

Belanja Pegawai TL	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan sosial
5.677.525.981.401	872.130.815	29.655.626.000	6.424.967.007.189	5.004.632.441
757.539.565.912	6.391.842.311		57.321.599.850	125.000.000
1.017.866.867.666		85.370.178.480	3.945.356.300	7.324.051.250
926.439.303.277	-	-	55.354.212.308	6.513.700.000
995.662.927.381		156.800.000	76.903.266.568	1.708.500.000
741.385.627.382		1.183.163.800	55.512.299.780	16.355.570.600
787.851.400.388		152.177.016.913	21.692.800.000	45.761.911.000
1.469.407.831.845	-	-	69.254.725.000	465.217.423.006
971.233.123.722			103.606.926.496	4.152.650.000
1.069.728.539.964	-	-	54.334.257.817	22.153.558.126
930.778.901.712		121.092.529.577	17.156.540.000	1.590.394.800
859.639.514.584	-	-	84.670.257.207	32.208.214.188
704.715.055.376		457.283.500	45.750.475.760	1.504.750.000
787.417.471.860	-	-	43.447.672.577	3.861.500.000
1.281.183.135.632			84.410.140.940	26.284.800.000
840.053.375.181			35.601.860.000	2.507.880.000
920.521.309.887			57.684.961.397	14.918.600.000
865.084.507.376			36.685.401.500	606.100.000
613.359.536.719		30.704.144.100	12.912.131.865	3.916.790.996
705.931.702.074	-	-	68.536.768.711	8.066.182.700
1.116.464.815.822	-	-	132.214.781.144	21.321.974.000
893.408.598.470			41.357.364.535	61.142.676.214
735.345.383.434			66.836.188.700	2.893.300.000
588.450.299.460			40.915.325.750	11.614.500.179
1.264.759.726.622		140.683.304.442	47.732.025.000	101.321.451.160
696.344.488.130	-	-	31.224.614.000	7.280.000.000
908.572.226.255	-	-	39.690.414.600	9.624.440.000
724.723.034.082			25.185.384.845	2.570.100.000
948.515.418.896		115.834.295.017	31.339.303.000	
1.029.252.613.515		64.247.074.500	5.750.100.000	6.681.054.330
252.978.690.563		16.189.185.500	1.796.179.920	
543.243.179.141	-	-	80.743.267.995	49.193.871.933
334.828.576.837		11.924.689.389	3.896.000.000	
691.770.586.890			85.967.500.000	
237.099.914.204	-	-	27.205.538.350	3.191.760.000
294.061.832.219			33.940.146.700	9.745.453.080
316.694.569.472		48.450.000	21.843.899.892	1.706.522.850
2.396.292.364.564	-	-	111.504.410.055	1.376.863.000

269.112.371.165			65.647.496.950	8.192.726.796
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Belanja tidak terduga	Belanja Langsung	Belanja Pegawai L
6.073.122.184.703	1.155.579.574.823	52.176.557.330	9.474.341.475.647	594.491.324.565
4.418.222.300	378.881.439.100		718.505.200.795	218.110.985.219
82.072.711.541	328.453.673.160	2.947.751.000	1.330.122.339.817	
10.569.238.692	298.272.301.938	781.464.500	1.052.655.360.821	-
15.255.132.285	838.935.468	5.527.954.948	1.147.517.846.621	
-	273.683.638.720		847.507.496.623	
67.862.494.626	482.671.015.750		1.154.495.228.165	
-	21.724.257.371	3.266.100.000	1.529.504.718.923	-
-	435.091.226.174	8.065.500	887.338.901.110	
19.655.621.660	426.679.956.400	1.118.839.446	1.175.318.964.361	-
70.334.782.765	566.660.979.683		1.110.198.766.464	
3.102.582.797	335.438.542.432	3.510.495.735	680.153.212.853	-
4.411.684.400	306.175.115.552	300.000.000	727.503.263.620	
-	271.350.080.571	-	535.725.186.170	-
15.946.060.761	500.924.299.876		1.707.052.937.311	224.934.401.730
34.072.895.917	384.310.174.657	58.891.636	1.029.701.796.862	
7.656.774.005	348.000.879.900	2.372.052.000	867.888.972.879	
6.939.763.545	314.094.554.225		844.974.673.545	54.605.748.966
28.306.481.622	307.007.342.384	3.101.864.215	659.487.943.791	
5.488.073.521	251.565.503.725	2.772.888.100	677.125.714.224	-
36.655.290.800	444.028.505.835	9.922.769.609	1.339.495.966.989	-
7.857.890.501	397.309.729.358	1.716.038.200	835.294.708.783	
7.306.161.000	384.321.375.000	1.972.573.500	686.453.826.489	
2.275.053.174	274.456.553.050	222.555.000	746.017.765.966	15.762.552.757
583.992.202.844	7.010.000.000	872.826.534	1.725.913.126.493	
2.506.981.000	207.518.974.893	324.180.230	666.119.965.636	-
-	426.053.446.148	1.377.929.185	674.429.432.199	-
7.051.341.895	227.705.784.178	1.779.724.389	770.693.651.908	
8.953.879.218	366.264.276.023	23.100.694	972.938.767.680	
209.096.842.411	352.384.662.606	7.881.000	1.141.145.239.841	
-	2.499.984.500	31.163.872	512.802.104.818	
-	-	-	596.763.989.512	-
305.857.486.594	627.846.700		603.714.590.104	
6.484.050	635.264.957		968.159.773.681	165.043.060.976
-	562.049.856	15.398.000	471.011.592.458	-
-	513.527.040		481.261.738.413	
	752.045.863	59.369.000	488.010.243.937	42.412.055.941

-	-	-	5.403.766.315.107	-
8.656.890.340	42.364.390.799	821.564.000	370.090.784.649	45.347.994.894

Belanja Barang dan jasa	Belanja Modal	Surplus/Defisit	Pembiayaan	Penerimaan
5.789.794.467.328	3.090.055.683.754	985.896.375.896	1.779.055.007.145	1.987.388.340.479
214.440.384.698	285.953.830.878	227.525.075.534	41.392.653.779	74.476.333.007
	1.330.122.339.817	(126.080.298.870)	-	-
459.210.921.869	593.444.438.952	(42.772.700.364)	275.288.291.956	275.288.291.956
574.061.177.467	573.456.669.154	780.458.503.648	79.051.687.856	79.051.687.856
463.933.122.860	383.574.373.763	(10.724.178.841)	110.781.616.626	120.781.616.626
	1.154.495.228.165	29.689.669.423	-	-
820.633.743.739	708.870.975.184	(78.396.778.513)	1.297.238.760.073	1.299.238.760.073
500.016.341.488	387.322.559.622	115.572.248.053	228.373.317.014	228.373.317.014
500.039.688.306	675.279.276.055	(50.576.603.078)	949.713.490.936	950.713.490.936
	1.110.198.766.464	(116.681.025.026)	-	-
421.895.061.849	258.258.151.004	(42.594.997.504)	367.367.721.617	372.748.221.617
353.186.335.530	374.316.928.090	(32.757.037.259)	114.419.840.763	120.464.879.752
334.509.505.683	201.215.680.487	115.066.214.620	103.254.213.895	103.254.213.895
741.895.192.629	740.223.342.953	125.507.399.513	167.444.522.923	217.444.522.923
453.055.452.654	576.646.344.208	9.225.111.781	290.474.586.996	290.474.586.996
547.898.729.958	319.990.242.921	81.120.008.649	227.495.326.570	233.495.326.570
410.594.612.864	379.774.311.715	(85.877.083.292)	135.867.888.746	136.367.888.746
	659.487.943.791	(3.259.056.144)	-	-
305.094.291.493	372.031.422.732	186.701.217.990	387.113.576.389	396.613.576.389
847.401.887.244	492.094.079.745	(36.341.001.387)	356.889.822.226	360.997.744.726
370.038.895.164	465.255.813.619	(23.606.341.868)	67.316.497.985	70.616.497.985
521.127.015.572	165.326.810.918	217.205.557.661	159.000.799.295	181.951.799.295
355.384.043.059	374.871.170.149	(61.051.393.229)	145.432.253.909	157.432.253.909
	1.725.913.126.493	(85.809.994.482)	-	-
320.737.549.618	345.382.416.018	7.148.056.195	222.065.340.814	222.065.340.814
382.544.767.628	291.884.664.571	101.154.031.256	643.348.826.098	656.043.826.098
418.094.701.207	352.598.950.701	31.963.351.241	142.545.048.550	153.545.048.550
491.313.161.893	481.625.605.787	(189.295.191.759)	-	-
	1.141.145.239.841	(210.460.980.546)	-	-
	512.802.104.818	64.645.049.069	-	-
353.568.431.385	243.195.558.126	(30.812.925.948)	461.814.747.722	461.814.747.722
	603.714.590.104	(303.224.216.299)	-	-
471.402.444.266	331.714.268.439	157.999.733.924	(62.400.000.000)	-
349.866.675.729	121.144.916.729	43.245.011.566	62.280.287.991	62.280.287.991
261.260.721.587	220.001.016.826	19.642.017.737	107.605.013.263	109.105.013.263
218.232.932.997	227.365.254.999	(30.787.849.523)	-	-
2.885.792.566.222	2.517.973.748.885	102.243.340.391	2.136.284.955.985	2.136.284.955.985

182.937.643.867	141.805.145.888	84.525.118.504	68.215.722.990	72.255.722.990
-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

SiLPA TA sebelumnya	Pencairan dana cadangan	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1.858.949.157.296	88.453.509.300		38.547.107.216	1.438.566.667
59.467.999.707	15.000.000.000			8.333.300
			-	
137.679.121.942	137.609.170.014	-	-	-
79.051.687.856			-	
120.781.616.626			-	
			-	
649.619.380.036	649.555.523.036	-	-	63.857.000
228.373.317.014			-	
477.107.693.822	473.605.797.114	-	-	-
			-	
186.753.214.808	185.995.006.808	-	-	-
120.464.879.752			-	
56.306.009.448	46.948.204.448	-	-	-
217.444.522.923				
290.474.586.996			-	
233.495.326.570			-	
136.367.888.746				
			-	
198.311.788.195	198.301.788.195	-	-	-
180.498.872.363	180.498.872.363	-	-	-
70.616.497.985			-	
141.951.799.295	40.000.000.000		-	
157.432.253.909				
			-	
111.134.318.208	110.931.022.607	-	-	-
328.106.720.555	289.410.514.391	38.526.591.151	-	-
153.545.048.550			-	
			-	
			-	
			-	
230.907.373.861	230.907.373.861	-	-	-
			-	
31.165.353.996	31.114.933.996	-	-	-
106.703.390.263	2.401.623.000		-	

1.068.144.127.993	1.068.140.827.993	-	-	-
72.255.722.990				

Pengeluaran	Pembentukan Dana Cadangan	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Pembayaran Pokok Utang
208.333.333.333	200.000.000.000		8.333.333.333
33.083.679.228		1.850.000.000	31.233.679.228
-		-	-
-	-	-	-
-		-	-
10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
-		-	-
2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
-		-	-
1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
-		-	-
5.380.500.000	3.449.000.000	-	1.931.500.000
6.045.038.989		5.998.000.000	47.038.989
-	-	-	-
50.000.000.000	15.000.000.000	34.000.000.000	1.000.000.000
-		-	-
6.000.000.000		6.000.000.000	-
500.000.000		500.000.000	
-		-	-
9.500.000.000	9.500.000.000	-	-
4.107.922.500	4.107.922.500	-	-
3.300.000.000		3.300.000.000	-
22.951.000.000	15.000.000.000	6.200.000.000	-
12.000.000.000	12.000.000.000		
-		-	-
-	-	-	-
12.695.000.000	12.695.000.000	-	-
11.000.000.000	4.000.000.000	7.000.000.000	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-	-	-	-
-		-	-
62.400.000.000		62.400.000.000	
-	-	-	-

1.500.000.000		1.500.000.000	-
-			
-	-	-	-
4.040.000.000		4.040.000.000	



Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2018

No.	Daerah	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah
1	Prov. Jawa Timur	29.024.306.233.760	15.675.894.291.960	12.728.000.000.000	76.451.501.000
2	Kab. Bangkalan	2.070.154.832.021	207.660.709.800	31.885.127.134	15.867.770.427
3	Kab. Banyuwangi	2.980.735.899.320	527.381.378.135	205.679.911.410	61.855.457.748
4	Kab. Blitar	2.295.059.148.754	224.735.540.984	68.750.022.640	24.237.733.245
5	Kab. Bojonegoro	3.385.914.477.856	368.155.780.017	79.204.005.459	24.512.415.982
6	Kab. Bondowoso	1.861.114.791.191	186.418.196.552	31.628.328.621	20.427.158.394
7	Kab. Gresik	2.897.503.571.000	947.570.465.000	517.050.000.000	126.010.881.000
8	Kab. Jember	3.598.355.742.534	589.281.013.091	169.978.251.525	33.368.615.775
9	Kab. Jombang	2.454.935.104.052	402.072.289.955	94.370.000.000	45.495.075.890
10	Kab. Kediri	2.690.173.435.129	452.807.503.128	160.405.400.000	28.999.378.200
11	Kab. Lamongan	2.798.401.732.700	471.567.901.740	157.275.812.000	17.132.670.212
12	Kab. Lumajang	2.048.029.834.932	264.052.715.555	64.340.000.000	42.934.050.355
13	Kab. Madiun	1.788.177.228.001	185.513.458.691	51.243.461.000	32.531.528.200
14	Kab. Magetan	1.734.634.561.110	165.659.270.710	43.762.052.212	25.808.768.500
15	Kab. Malang	3.719.088.768.103	489.326.953.004	205.066.250.000	35.547.501.460
16	Kab. Mojokerto	2.316.893.080.242	474.788.909.899	287.330.000.000	45.255.023.615
17	Kab. Nganjuk	2.123.694.100.685	329.469.629.273	74.522.080.250	23.747.517.023
18	Kab. Ngawi	1.974.210.947.202	180.775.429.818	44.042.100.000	9.259.133.600
19	Kab. Pacitan	1.580.697.580.829	155.224.528.463	27.963.000.000	25.248.369.959
20	Kab. Pamekasan	1.724.975.522.500	163.640.118.924	29.558.477.580	14.301.851.578
21	Kab. Pasuruan	3.166.461.394.537	572.573.271.057	349.375.738.700	38.740.762.696
22	Kab. Ponorogo	2.254.959.372.850	235.841.311.850	63.094.817.500	9.500.000.000
23	Kab. Probolinggo	2.156.454.895.486	220.813.229.602	43.829.000.000	26.260.197.325
24	Kab. Sampang	1.669.914.866.347	137.245.157.950	24.881.500.000	14.761.767.150
25	Kab. Sidoarjo	4.046.261.300.437	1.431.052.747.437	868.940.000.000	84.092.006.340
26	Kab. Situbondo	1.500.271.941.152	185.007.911.643	36.892.335.639	11.790.917.074
27	Kab. Sumenep	2.180.556.865.477	221.296.639.290	24.426.278.662	15.034.812.792
28	Kab. Trenggalek	1.759.995.116.000	199.000.000.000	32.015.950.000	19.898.833.000
29	Kab. Tuban	2.279.700.867.753	378.158.981.063	176.764.213.000	28.135.341.862
30	Kab. Tulungagung	2.476.066.215.891	359.281.145.891	77.095.360.000	24.602.210.141
31	Kota Blitar	872.168.550.095	140.058.770.620	33.797.000.000	8.721.807.590
32	Kota Kediri	1.130.510.377.625	225.912.159.759	85.318.325.000	10.930.505.000
33	Kota Madiun	908.658.018.337	196.797.930.337	64.018.000.000	13.772.474.337
34	Kota Malang	1.964.509.407.190	486.330.772.375	375.000.000.000	46.389.744.050
35	Kota Mojokerto	892.128.798.000	200.642.757.500	37.410.105.000	8.754.856.000
36	Kota Pasuruan	879.468.756.827	139.467.647.062	27.820.670.466	8.103.908.220
37	Kota Probolinggo	913.792.192.492	167.525.785.311	30.228.525.834	12.679.156.799
38	Kota Surabaya	8.128.207.032.782	4.712.856.394.887	3.512.731.272.026	351.339.733.611
39	Kota Batu	935.194.903.030	143.500.209.241	111.000.000.000	11.345.074.530

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Dana Perimbangan	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Dana Alokasi Umum
380.115.629.760	2.491.327.161.200	13.270.911.941.800	2.306.650.360.800	3.813.411.928.000
1.853.306.551	158.054.505.688	1.391.402.927.491	88.627.666.491	994.460.684.000
21.965.034.996	237.880.973.981	1.918.404.570.033	100.026.880.033	1.375.784.247.000
2.144.939.537	129.602.845.562	1.603.200.160.000	83.221.286.000	1.109.812.753.000
22.713.535.000	241.725.823.576	2.237.436.083.394	1.154.735.089.394	932.445.113.000
3.805.729.059	130.556.980.477	1.316.234.333.200	76.254.429.200	910.319.122.000
13.157.353.000	291.352.231.000	1.438.593.338.000	177.133.682.000	909.888.092.000
6.219.552.081	379.714.593.710	2.410.366.320.000	153.190.272.000	1.709.892.845.000
2.949.999.180	259.257.214.885	1.549.958.374.000	94.087.134.000	1.091.779.457.000
5.998.180.928	257.404.544.000	1.764.717.390.000	114.601.161.000	1.225.331.641.000
25.260.000.000	271.899.419.528	1.707.337.516.000	106.674.180.000	1.146.161.266.000
4.254.316.000	152.524.349.200	1.391.339.674.000	88.433.197.000	972.852.929.000
5.791.034.441	95.947.435.050	1.276.829.781.650	78.658.491.650	877.868.685.000
2.251.267.618	93.837.182.380	1.263.276.931.983	57.251.004.983	899.960.340.000
16.924.114.019	231.789.087.525	2.411.639.617.000	158.199.390.000	1.665.195.901.000
4.936.093.584	137.267.792.700	1.420.731.992.893	77.929.881.893	973.768.511.000
3.385.963.000	227.814.069.000	1.372.697.398.412	73.324.614.412	1.059.746.429.000
9.419.268.742	118.054.927.476	1.455.059.811.950	64.977.319.950	1.039.619.057.000
2.425.176.653	99.587.981.851	1.138.058.590.000	61.904.063.000	793.715.346.000
1.847.294.966	117.932.494.800	1.227.591.312.000	88.701.152.000	849.764.469.000
2.532.857.295	181.923.912.366	1.870.262.218.600	274.678.946.600	1.179.777.625.000
1.026.000.000	162.220.494.350	1.560.581.988.000	82.164.681.000	1.043.916.636.000
5.491.010.522	145.233.021.755	1.378.139.879.502	108.676.393.502	967.345.237.000
6.514.215.800	91.087.675.000	1.201.195.857.000	81.536.959.000	825.443.163.000
29.847.768.975	448.172.972.122	1.833.192.381.000	180.391.473.000	1.203.737.401.000
4.735.361.417	131.589.297.514	1.038.651.064.000	-	894.774.430.000
20.378.513.125	161.457.034.711	1.543.243.835.700	102.201.062.700	1.110.487.853.000
4.715.000.000	142.370.217.000	1.270.019.510.000	78.219.615.000	885.545.437.000
11.081.531.775	162.177.894.426	1.459.881.198.690	107.703.758.690	1.028.370.328.000
5.165.807.050	252.417.768.700	1.698.599.191.000	74.744.000.000	1.151.959.732.000
1.053.268.345	96.486.694.685	624.443.967.975	76.254.538.975	421.212.306.000
2.041.389.411	127.621.940.348	788.802.597.570	119.643.450.570	606.928.225.000
12.093.398.000	106.914.058.000	650.494.828.000	70.682.233.000	502.392.070.000
15.716.683.768	49.224.344.557	1.142.708.691.950	95.496.145.950	844.576.426.000
3.723.450.000	150.754.346.500	549.700.250.000	74.580.997.000	390.118.825.000
4.715.851.613	98.827.216.763	648.773.479.000	72.284.604.000	424.499.789.000
1.608.706.158	123.009.396.520	656.428.314.514	75.109.270.514	461.952.836.000
151.461.786.575	697.323.602.675	2.200.611.081.799	548.177.895.799	1.211.713.876.000
2.760.797.997	18.394.336.714	636.003.033.000	71.011.838.000	474.881.106.000

Dana Alokasi Khusus	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Dana darurat	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
7.150.849.653.000	77.500.000.000	-	-	-
308.314.577.000	471.091.194.730	122.547.600.000	-	69.078.083.230
442.593.443.000	534.949.951.152	128.751.117.989	-	150.532.440.663
410.166.121.000	467.123.447.770	86.142.600.000	-	122.138.194.770
150.255.881.000	780.322.614.445	91.547.602.037	-	124.969.201.408
329.660.782.000	358.462.261.439	66.373.000.000	-	70.112.330.439
351.571.564.000	511.339.768.000	-	-	214.548.840.000
547.283.203.000	598.708.409.443	180.341.284.690	-	171.903.591.753
364.091.783.000	502.904.440.097	105.327.870.000	-	140.506.682.097
424.784.588.000	472.648.542.001	-	-	165.757.337.001
454.502.070.000	619.496.314.960	85.078.080.000	-	165.687.000.560
330.053.548.000	392.637.445.377	77.727.000.000	-	107.963.039.377
320.302.605.000	325.833.987.660	57.215.400.000	-	103.432.422.660
306.065.587.000	305.698.358.417	52.634.600.000	-	69.601.855.417
588.244.326.000	818.122.198.099	200.678.600.000	-	243.838.853.599
369.033.600.000	421.372.177.450	75.390.600.000	-	128.469.173.450
239.626.355.000	421.527.073.000	101.424.000.000	-	104.817.766.000
350.463.435.000	338.375.705.434	65.559.920.000	-	86.917.867.434
282.439.181.000	287.414.462.366	46.742.000.000	-	77.118.934.366
289.125.691.000	333.744.091.576	57.862.940.000	-	62.486.766.576
415.805.647.000	723.625.904.880	131.530.600.000	-	187.333.554.380
434.500.671.000	458.536.073.000	76.052.600.000	-	91.026.000.000
302.118.249.000	557.501.786.382	80.196.000.000	-	92.192.267.882
294.215.735.000	331.473.851.397	69.304.200.000	-	66.961.335.397
449.063.507.000	782.016.172.000	140.000.000.000	-	337.000.000.000
143.876.634.000	276.612.965.509	-	-	86.411.288.509
330.554.920.000	416.016.390.487	59.331.600.000	-	80.300.134.487
306.254.458.000	290.975.606.000	5.000.000.000	-	82.924.551.000
323.807.112.000	441.660.688.000	84.657.200.000	-	97.133.300.000
471.895.459.000	418.185.879.000	-	-	123.851.000.000
126.977.123.000	107.665.811.500	17.409.920.000	-	62.503.361.500
62.230.922.000	115.795.620.296	27.345.620.296	-	70.200.000.000
77.420.525.000	61.365.260.000	-	-	60.648.410.000
202.636.120.000	335.469.942.865	82.528.840.000	-	218.785.177.135
85.000.428.000	141.785.790.500	14.927.600.000	-	59.103.660.500
151.989.086.000	91.227.630.765	20.539.400.000	-	59.983.530.765
119.366.208.000	89.838.092.667	20.907.800.000	-	65.371.492.667
440.719.310.000	1.214.739.556.096	200.911.208.209	-	961.378.947.887
90.110.089.000	155.691.660.789	14.814.592.918	-	63.472.031.871

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Pendapatan Lain-Lain	Belanja Daerah	Belanja Tidak Langsung
77.500.000.000	-	-	30.762.055.983.826	20.747.811.244.657
268.326.025.000	11.139.486.500	-	2.193.477.193.357	1.272.006.691.037
246.094.506.000	9.571.886.500	-	3.009.735.899.320	1.647.943.755.682
200.447.753.000	58.394.900.000	-	2.346.826.469.046	1.382.663.966.074
563.705.811.000	100.000.000	-	3.361.286.721.056	1.840.827.606.612
221.976.931.000	-	-	1.890.378.486.748	1.207.909.941.259
280.565.128.000	16.225.800.000	-	2.983.138.197.036	1.649.634.926.500
236.182.333.000	10.281.200.000	-	3.775.909.109.662	1.886.182.209.535
18.500.000.000	238.569.888.000	-	2.577.935.104.052	1.640.046.665.650
306.756.205.000	75.000.000	60.000.000	2.889.969.835.129	1.743.779.904.034
365.762.143.000	2.921.400.000	47.691.400	2.825.651.732.700	1.636.181.243.608
199.055.106.000	7.892.300.000	-	2.259.749.834.932	1.270.906.229.873
160.881.185.000	4.304.980.000	-	1.812.000.389.361	1.103.581.398.755
181.440.103.000	2.021.800.000	-	1.769.952.792.351	1.137.031.126.636
346.590.658.000	27.014.086.500	-	3.919.235.773.458	2.106.513.788.581
9.000.000.000	50.000.000	208.462.404.000	2.341.043.020.124	1.334.375.084.960
215.210.307.000	75.000.000	-	2.278.619.726.787	1.412.914.892.295
185.822.918.000	75.000.000	-	2.044.533.711.368	1.291.620.057.394
163.503.528.000	50.000.000	-	1.585.993.583.925	992.911.765.926
191.686.185.000	21.708.200.000	-	1.907.989.956.731	1.122.876.309.019
328.321.464.000	76.440.286.500	-	3.223.907.498.339	1.876.472.699.943
243.559.473.000	47.898.000.000	-	2.255.259.372.850	1.386.635.559.165
340.685.332.000	44.428.186.500	-	2.243.874.485.291	1.373.109.134.991
-	15.612.100.000	179.596.216.000	1.809.414.866.347	1.013.597.161.540
298.643.547.000	6.372.625.000	-	4.472.131.300.437	2.303.299.555.393
142.164.807.000	48.036.870.000	-	1.572.429.855.400	938.553.123.556
276.309.656.000	75.000.000	-	2.230.608.130.562	1.439.132.132.754
144.827.455.000	3.720.000.000	54.503.600.000	1.784.697.931.000	1.070.325.375.050
252.148.488.000	7.721.700.000	-	2.399.873.839.202	1.285.783.386.873
205.680.279.000	88.654.600.000	-	2.518.273.778.879	1.544.597.917.165
26.000.000.000	1.752.530.000	-	889.777.119.543	327.572.593.473
18.250.000.000	-	-	1.286.436.587.918	594.722.854.882
-	716.850.000	-	1.089.762.466.572	471.859.212.932
30.818.595.730	3.337.330.000	-	2.063.184.731.617	920.075.736.401
66.750.000.000	1.004.530.000	-	968.279.120.000	358.854.134.350
8.000.000.000	2.704.700.000	-	952.150.851.120	390.811.827.694
-	3.558.800.000	-	1.016.530.845.501	402.464.159.081
-	3.699.400.000	48.750.000.000	9.117.196.864.653	2.390.254.727.237
76.391.636.000	1.013.400.000	-	935.194.903.030	480.778.233.582

Belanja Pegawai TL	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
6.503.706.183.043	4.506.000.000	87.000.000.000	7.539.047.245.139	5.000.000.000
826.758.908.185	3.383.431.682	-	56.463.159.206	200.000.000
1.166.662.960.641	-	-	109.866.198.764	19.811.860.764
1.034.305.599.211	-	-	43.745.200.000	4.985.000.000
1.074.399.514.232	-	223.000.000	129.247.452.293	5.755.000.000
798.119.107.886	-	1.183.163.800	87.356.876.000	17.071.500.000
865.620.340.750	242.613.836.250	-	-	28.703.050.000
1.297.318.612.356	-	-	68.409.309.100	95.651.872.000
1.099.020.555.013	-	-	123.511.673.090	6.446.000.000
1.207.269.413.209	-	-	52.302.600.000	28.186.070.000
979.470.293.271	-	-	121.666.520.000	23.220.140.000
730.256.671.711	-	-	118.442.066.000	53.289.675.000
748.240.102.555	-	515.000.000	66.106.274.360	3.958.500.000
809.702.422.199	-	-	57.918.304.000	4.335.000.000
1.459.209.807.019	-	-	87.808.166.940	29.651.650.000
905.711.747.875	-	-	23.100.000.000	4.605.000.000
1.010.886.952.919	-	-	35.502.961.440	7.179.400.000
968.181.203.537	-	-	21.270.000.000	-
679.634.483.250	-	-	30.735.871.500	11.478.696.000
770.681.700.382	-	-	78.216.404.200	8.150.220.000
1.061.434.537.722	-	-	200.693.558.293	25.855.000.000
923.625.748.293	-	-	50.645.003.158	15.406.214.000
814.935.135.691	-	-	92.133.244.300	2.495.000.000
647.499.375.825	-	-	79.581.484.000	12.916.000.000
1.500.148.114.317	-	-	218.717.350.000	64.304.720.000
702.016.369.663	-	-	13.588.670.000	6.677.500.000
952.061.867.952	-	-	39.151.850.000	16.841.700.000
784.479.848.350	-	-	27.522.040.000	10.284.200.000
840.691.155.504	-	-	61.808.520.000	4.468.000.000
1.062.313.538.665	-	-	122.229.749.000	8.772.500.000
304.002.463.513	-	-	16.092.530.000	5.977.600.000
479.197.173.980	-	-	48.258.287.150	63.540.333.077
425.753.550.365	-	-	24.753.685.100	13.456.500.000
823.830.050.101	-	-	86.159.145.600	500.000.000
314.012.674.800	-	-	37.433.007.700	5.218.600.000
324.830.639.654	-	-	42.002.481.000	10.914.700.000
360.750.636.967	-	75.000.000	35.086.476.250	2.800.000.000
2.154.203.040.522	-	-	223.001.686.715	-
330.398.781.165	-	-	56.551.052.000	17.522.060.000

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Tidak Terduga	Belanja Langsung	Belanja Pegawai L
5.421.870.038.025	1.086.681.778.450	100.000.000.000	10.014.244.739.169	914.052.926.515
4.788.289.757	379.412.902.207	1.000.000.000	921.470.502.321	277.897.884.966
10.000.000.000	336.602.735.513	5.000.000.000	1.361.792.143.638	116.455.195.200
9.874.218.963	284.753.947.900	5.000.000.000	964.162.502.972	19.584.491.512
12.287.742.146	615.714.897.941	3.200.000.000	1.520.459.114.444	234.663.702.552
-	302.304.865.422	1.874.428.151	682.468.545.489	35.103.640.119
64.306.089.000	446.891.610.500	1.500.000.000	1.333.503.270.536	114.697.206.246
21.994.853.252	397.807.562.827	5.000.000.000	1.889.726.900.127	301.431.017.010
-	410.068.437.547	1.000.000.000	937.888.438.402	91.541.294.732
22.961.355.925	429.060.464.900	4.000.000.000	1.146.189.931.095	59.116.054.004
3.399.070.000	507.425.220.337	1.000.000.000	1.189.470.489.092	49.598.723.689
5.001.076.206	361.916.740.956	2.000.000.000	988.843.605.059	47.725.355.074
4.927.282.000	277.834.239.840	2.000.000.000	708.418.990.606	26.381.870.100
-	261.075.400.437	4.000.000.000	632.921.665.715	45.922.540.706
18.664.375.146	506.179.789.476	5.000.000.000	1.812.721.984.877	249.354.816.671
33.609.889.203	366.348.447.882	1.000.000.000	1.006.667.935.164	104.804.691.218
6.963.160.000	344.951.352.861	7.431.065.075	865.704.834.492	86.506.305.900
6.525.817.400	294.643.036.457	1.000.000.000	752.913.653.974	27.236.779.500
5.683.477.441	263.379.237.735	2.000.000.000	593.081.817.999	38.701.875.300
4.928.211.637	257.399.772.800	3.500.000.000	785.113.647.712	40.947.168.920
41.943.235.139	536.546.368.790	10.000.000.000	1.347.434.798.396	121.581.302.915
7.544.386.331	386.177.519.098	3.236.688.284	868.623.813.685	85.495.845.378
7.008.919.000	449.036.836.000	7.500.000.000	870.765.350.300	116.073.950.200
2.068.801.715	270.031.500.000	1.500.000.000	795.817.704.807	20.472.431.620
103.051.633.634	410.641.929.595	6.435.807.847	2.168.831.745.044	151.461.281.141
2.929.190.000	211.148.893.893	2.192.500.000	633.876.731.844	72.997.798.620
2.319.564.504	425.757.150.298	3.000.000.000	791.475.997.808	76.920.432.562
6.686.486.600	231.352.800.100	10.000.000.000	714.372.555.950	126.167.595.860
21.897.379.086	352.466.089.092	4.452.243.191	1.114.090.452.329	161.403.676.051
8.219.050.500	337.063.079.000	6.000.000.000	973.675.861.714	92.358.831.500
-	499.999.960	1.000.000.000	562.204.526.070	14.138.636.300
-	727.060.675	3.000.000.000	691.713.733.036	132.339.187.098
-	6.278.510.000	1.616.967.467	617.903.253.640	72.645.099.242
-	663.728.700	8.922.812.000	1.143.108.995.215	184.781.217.700
-	562.050.500	1.627.801.350	609.424.985.650	42.538.316.500
-	11.064.007.040	2.000.000.000	561.339.023.426	70.957.072.996
-	752.045.864	3.000.000.000	614.066.686.420	62.846.011.655
750.000.000	2.300.000.000	10.000.000.000	6.726.942.137.416	502.583.376.418
9.685.651.734	64.620.688.683	2.000.000.000	454.416.669.448	59.878.729.761

Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Surplus/Defisit	Pembiayaan Daerah	Penerimaan Pembiayaan Daerah
6.253.344.468.572	2.846.847.344.082	(1.737.749.750.066)	1.737.749.750.066	1.744.280.750.066
305.597.435.789	337.975.181.566	(123.322.361.336)	123.322.361.336	154.556.040.564
686.082.346.216	559.254.602.222	(29.000.000.000)	29.000.000.000	279.000.000.000
474.928.643.890	469.649.367.570	(51.767.320.292)	51.767.320.292	51.767.320.292
550.974.107.921	734.821.303.972	24.627.756.800	372.243.200	372.243.200
427.699.079.656	219.665.825.714	(29.263.695.557)	29.263.695.557	32.263.695.557
703.363.971.552	515.442.092.738	(85.634.626.036)	85.634.626.036	85.634.626.036
931.793.856.758	656.502.026.359	(177.553.367.128)	177.553.367.128	184.553.367.128
576.107.504.749	270.239.638.921	(123.000.000.000)	123.000.000.000	123.000.000.000
533.155.469.302	553.918.407.789	(199.796.400.000)	199.796.400.000	200.200.000.000
624.086.471.523	515.785.293.880	(27.250.000.000)	27.250.000.000	59.300.000.000
583.099.031.814	358.019.218.171	(211.720.000.000)	211.720.000.000	219.250.000.000
384.877.267.704	297.159.852.802	(23.823.161.360)	23.823.161.360	30.821.161.360
373.793.198.131	213.205.926.878	(35.318.231.241)	35.318.231.242	42.818.231.242
785.461.831.340	777.905.336.866	(200.147.005.355)	200.147.005.354	238.147.005.354
453.641.169.880	448.222.074.066	(24.149.939.882)	24.149.939.882	41.149.939.882
503.002.561.751	276.195.966.841	(154.925.626.102)	154.925.626.102	162.425.626.102
423.835.719.156	301.841.155.318	(70.322.764.166)	70.322.764.166	81.322.764.166
291.270.128.085	263.109.814.614	(5.296.003.096)	5.296.003.096	8.246.003.096
362.365.242.323	381.801.236.469	(183.014.434.231)	183.014.434.231	198.014.434.231
822.167.518.715	403.685.976.766	(57.446.103.802)	57.446.103.802	82.000.000.000
357.187.435.300	425.940.533.008	(300.000.000)	300.000.000	300.000.000
499.142.127.797	255.549.272.303	(87.419.589.805)	87.419.589.805	91.869.589.805
438.578.849.040	336.766.424.147	(139.500.000.000)	139.500.000.000	139.500.000.000
1.152.421.325.478	864.949.138.425	(425.870.000.000)	425.870.000.000	438.770.000.000
303.063.057.870	257.815.875.354	(72.157.914.247)	72.157.914.247	72.157.914.247
405.043.849.010	309.511.716.236	(50.051.265.085)	50.051.265.085	62.551.265.085
312.992.682.095	275.212.277.995	(24.702.815.000)	24.702.815.000	37.202.815.000
479.220.828.366	473.465.947.912	(120.172.971.449)	120.172.971.449	120.172.971.449
513.594.057.469	367.722.972.745	(42.207.562.988)	42.207.562.988	50.207.562.988
344.319.864.867	203.746.024.903	(17.608.569.448)	17.608.569.448	17.608.569.448
425.791.739.703	133.582.806.235	(155.926.210.293)	155.926.210.293	165.926.210.293
300.185.596.418	245.072.557.980	(181.104.448.235)	181.104.448.235	181.104.448.235
644.255.855.989	314.071.921.527	(98.675.324.426)	98.675.324.427	129.392.008.195
367.449.876.050	199.436.793.100	(76.150.322.000)	76.150.322.000	76.150.322.000
242.910.484.481	247.471.465.949	(72.682.094.293)	72.682.094.293	74.182.094.293
357.170.953.556	194.049.721.209	(102.738.653.009)	102.738.653.009	102.738.653.009
3.517.733.125.869	2.706.625.635.129	(988.989.831.871)	988.989.831.871	998.989.831.871
276.828.174.705	117.709.764.982	-	-	-

SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	Pencairan Dana Cadangan	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1.157.734.259.366	511.546.490.700	-	75.000.000.000	-
154.556.040.564	-	-	-	-
29.000.000.000	-	-	250.000.000.000	-
51.767.320.292	-	-	-	-
372.243.200	-	-	-	-
12.263.695.557	20.000.000.000	-	-	-
85.634.626.036	-	-	-	-
184.553.367.128	-	-	-	-
123.000.000.000	-	-	-	-
200.000.000.000	-	-	-	-
35.000.000.000	-	-	-	-
183.000.000.000	35.000.000.000	-	-	1.250.000.000
-	30.321.161.360	-	-	-
22.818.231.242	20.000.000.000	-	-	-
238.147.005.354	-	-	-	-
41.149.939.882	-	-	-	-
162.425.626.102	-	-	-	-
81.322.764.166	-	-	-	-
8.246.003.096	-	-	-	-
177.014.434.231	21.000.000.000	-	-	-
82.000.000.000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
88.884.062.805	-	-	-	2.985.527.000
107.500.000.000	30.000.000.000	-	-	-
425.870.000.000	-	-	-	-
72.157.914.247	-	-	-	-
62.551.265.085	-	-	-	-
37.000.000.000	-	-	-	202.815.000
117.427.971.449	-	-	-	2.250.000.000
25.207.562.988	25.000.000.000	-	-	-
17.608.569.448	-	-	-	-
165.926.210.293	-	-	-	-
181.104.448.235	-	-	-	-
129.392.008.195	-	-	-	-
75.850.322.000	-	-	-	-
54.005.872.858	20.000.000.000	-	-	176.221.435
92.238.653.009	10.500.000.000	-	-	-
998.989.831.871	-	-	-	-

Lampiran 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2013-2018

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2013-2018

Daerah	Tahun	BelanjaModal	PAD	DAU	DAK
Kab.Bangkalan	2013	113.533.581.921	92.722.219.766	778.024.112.000	105.241.400.000
Kab.Bangkalan	2014	331.828.632.471	135.785.489.734	854.873.885.000	98.985.480.000
Kab.Bangkalan	2015	480.529.384.071	175.624.054.291	888.673.426.000	211.121.740.000
Kab.Bangkalan	2016	412.823.435.617	200.083.202.454	1.012.242.530.000	253.397.903.000
Kab.Bangkalan	2017	375.711.258.060	191.264.289.113	1.012.242.530.000	354.197.441.000
Kab.Bangkalan	2018	337.975.181.566	207.660.709.800	994.460.684.000	308.314.577.000
Kab.Banyuwangi	2013	196.931.722.469	183.235.877.414	1.154.495.171.000	76.997.760.000
Kab.Banyuwangi	2014	558.546.677.148	283.488.703.181	1.254.496.229.000	48.040.230.000
Kab.Banyuwangi	2015	699.415.745.318	346.992.331.407	1.288.940.680.000	126.464.240.000
Kab.Banyuwangi	2016	911.584.332.145	367.872.665.894	1.400.384.500.000	357.337.495.217
Kab.Banyuwangi	2017	776.793.143.634	388.617.461.648	1.400.384.500.000	358.964.222.000
Kab.Banyuwangi	2018	559.254.602.222	527.381.378.135	1.375.784.247.000	442.593.443.000
Kab.Blitar	2013	141.596.247.148	115.670.863.817	944.297.542.000	70.322.560.000
Kab.Blitar	2014	385.260.453.752	188.827.430.091	1.027.251.687.000	71.417.130.000
Kab.Blitar	2015	508.331.950.780	216.648.256.570	1.037.911.125.000	142.410.070.000
Kab.Blitar	2016	692.718.770.257	224.106.765.169	1.128.511.321.000	402.370.805.555
Kab.Blitar	2017	529.370.750.706	216.039.706.560	1.189.811.233.102	377.435.257.000
Kab.Blitar	2018	469.649.367.570	224.735.540.984	1.109.812.753.000	410.166.121.000
Kab.Bojonegoro	2013	363.653.566.220	215.766.157.632	876.021.914.000	46.545.623.000
Kab.Bojonegoro	2014	537.686.801.888	291.244.903.352	920.522.357.000	44.549.378.000
Kab.Bojonegoro	2015	594.229.176.810	337.695.825.017	895.987.113.000	67.346.180.000
Kab.Bojonegoro	2016	967.917.005.412	340.407.679.609	949.118.065.000	135.279.268.459
Kab.Bojonegoro	2017	667.711.508.375	329.003.732.182	949.118.065.000	126.970.390.000
Kab.Bojonegoro	2018	734.821.303.972	368.155.780.017	932.445.113.000	150.255.881.000
Kab.Bondowoso	2013	96.091.909.951	79.559.722.884	752.776.704.000	80.710.600.000
Kab.Bondowoso	2014	311.495.490.129	134.684.701.402	821.583.706.981	91.063.070.000
Kab.Bondowoso	2015	404.576.533.409	158.974.210.144	862.599.540.000	122.444.580.000
Kab.Bondowoso	2016	425.425.089.820	177.025.949.242	926.596.442.000	299.830.707.432
Kab.Bondowoso	2017	409.242.154.767	153.751.999.039	976.928.484.858	347.784.906.000
Kab.Bondowoso	2018	219.665.825.714	186.418.196.552	910.319.122.000	329.660.782.000
Kab.Gresik	2013	235.946.731.139	502.767.029.904	804.903.511.000	49.106.180.000

Daerah	Tahun	BelanjaModal	PAD	DAU	DAK
Kab.Gresik	2014	523.804.897.182	700.587.792.877	863.397.519.000	72.051.260.000
Kab.Gresik	2015	584.223.675.905	799.884.870.103	873.265.959.000	110.844.780.000
Kab.Gresik	2016	413.339.658.373	715.480.938.191	923.469.024.000	263.751.189.347
Kab.Gresik	2017	594.467.449.390	949.661.505.000	923.469.024.000	320.180.699.000
Kab.Gresik	2018	515.442.092.738	947.570.465.000	909.888.092.000	351.571.564.000
Kab.Jember	2013	285.644.500.802	308.376.581.786	1.417.603.982.000	74.410.890.000
Kab.Jember	2014	537.521.256.029	440.462.012.491	1.539.722.508.000	87.951.090.000
Kab.Jember	2015	556.408.885.143	461.882.363.147	1.586.836.602.000	199.158.010.000
Kab.Jember	2016	460.451.300.847	524.137.897.017	1.709.892.845.000	430.502.552.000
Kab.Jember	2017	535.010.487.285	526.360.208.506	1.895.653.108.130	547.283.203.000
Kab.Jember	2018	656.502.026.359	589.281.013.091	1.709.892.845.000	547.283.203.000
Kab.Jombang	2013	226.904.720.247	185.091.678.240	920.097.938.000	43.717.035.000
Kab.Jombang	2014	355.049.118.263	304.065.301.093	1.007.166.193.000	47.292.080.000
Kab.Jombang	2015	403.219.792.974	363.963.252.972	1.032.325.237.000	63.325.130.000
Kab.Jombang	2016	364.901.756.772	374.141.185.826	1.111.301.450.000	282.844.538.590
Kab.Jombang	2017	354.732.629.861	344.415.880.840	1.111.301.450.000	369.279.742.000
Kab.Jombang	2018	270.239.638.921	402.072.289.955	1.091.779.457.000	364.091.783.000
Kab.Kediri	2013	234.891.816.135	203.212.445.366	1.056.481.076.000	69.281.810.000
Kab.Kediri	2014	325.197.091.568	295.295.340.021	1.144.878.533.000	51.359.505.000
Kab.Kediri	2015	457.787.623.448	314.229.578.679	1.177.392.295.000	75.493.736.000
Kab.Kediri	2016	612.052.137.541	339.113.897.822	1.242.230.783.000	308.559.509.050
Kab.Kediri	2017	622.196.539.568	291.321.442.095	1.242.230.783.000	403.599.943.000
Kab.Kediri	2018	553.918.407.789	452.807.503.128	1.225.331.641.000	424.784.588.000
Kab.Lamongan	2013	57.326.297.240	161.087.916.085	958.344.988.000	75.665.880.000
Kab.Lamongan	2014	353.435.615.278	272.409.285.216	1.042.124.514.000	77.845.000.000
Kab.Lamongan	2015	459.305.792.650	321.667.133.176	1.064.300.915.000	154.244.850.000
Kab.Lamongan	2016	616.499.721.973	403.474.462.147	1.166.655.654.000	443.757.061.800
Kab.Lamongan	2017	407.084.790.225	413.033.141.634	1.166.655.654.000	423.408.476.000
Kab.Lamongan	2018	515.785.293.880	471.567.901.740	1.146.161.266.000	454.502.070.000
Kab.Lumajang	2013	164.721.383.941	112.406.824.133	828.524.528.000	44.000.685.000
Kab.Lumajang	2014	236.756.736.151	194.076.104.164	898.217.627.000	51.943.373.000
Kab.Lumajang	2015	242.225.159.241	212.585.093.436	923.492.395.000	74.273.112.000
Kab.Lumajang	2016	347.885.601.308	242.111.541.252	990.248.409.000	226.586.895.000
Kab.Lumajang	2017	323.230.479.684	254.660.837.000	990.248.409.000	311.517.163.000
Kab.Lumajang	2018	358.019.218.171	264.052.715.555	972.852.929.000	330.053.548.000
Kab.Madiun	2013	117.395.792.916	83.428.636.445	734.152.390.000	51.129.000.000
Kab.Madiun	2014	239.470.373.397	121.390.771.374	808.842.790.000	62.841.120.000
Kab.Madiun	2015	327.742.397.091	149.628.355.468	832.357.223.000	128.123.730.000

Daerah	Tahun	BelanjaModal	PAD	DAU	DAK
Kab.Madiun	2016	443.808.272.890	163.635.265.621	893.565.762.000	332.025.736.458
Kab.Madiun	2017	360.780.153.189	179.019.529.130	893.565.762.000	305.865.889.000
Kab.Madiun	2018	297.159.852.802	185.513.458.691	877.868.685.000	320.302.605.000
Kab.Magetan	2013	99.940.783.273	87.859.707.871	761.637.391.000	46.164.370.000
Kab.Magetan	2014	190.932.555.694	141.162.943.324	840.086.597.000	58.964.980.000
Kab.Magetan	2015	239.657.455.207	164.564.899.426	856.278.521.000	79.395.670.000
Kab.Magetan	2016	286.943.948.471	165.617.751.404	916.052.436.000	264.423.446.649
Kab.Magetan	2017	224.892.458.699	147.000.000.000	916.052.436.000	264.424.624.000
Kab.Magetan	2018	213.205.926.878	165.659.270.710	899.960.340.000	306.065.587.000
Kab.Malang	2013	105.440.315.408	262.267.260.455	1.439.234.034.000	112.312.350.000
Kab.Malang	2014	501.503.673.434	411.185.107.107	1.572.191.571.000	130.050.580.000
Kab.Malang	2015	714.192.895.223	461.887.704.825	1.613.161.777.000	153.350.440.000
Kab.Malang	2016	683.932.346.302	502.754.981.975	1.694.884.660.000	468.164.701.980
Kab.Malang	2017	581.999.864.183	426.295.772.668	1.694.884.660.000	551.346.516.000
Kab.Malang	2018	777.905.336.866	489.326.953.004	1.665.195.901.000	588.244.326.000
Kab.Mojokerto	2013	187.065.601.689	219.013.234.739	832.266.682.000	35.577.547.000
Kab.Mojokerto	2014	365.470.000.620	357.924.994.262	899.109.179.000	55.556.660.000
Kab.Mojokerto	2015	491.829.693.652	414.965.865.274	923.747.632.000	83.127.250.000
Kab.Mojokerto	2016	442.333.406.190	447.620.851.329	991.180.363.000	243.361.285.520
Kab.Mojokerto	2017	615.019.535.248	436.206.710.186	1.062.967.289.124	332.005.549.000
Kab.Mojokerto	2018	448.222.074.066	474.788.909.899	973.768.511.000	369.033.600.000
Kab.Nganjuk	2013	155.743.041.130	153.130.115.173	928.265.611.000	59.433.923.000
Kab.Nganjuk	2014	277.439.461.078	255.880.471.469	1.004.037.764.000	50.838.968.000
Kab.Nganjuk	2015	361.295.978.864	287.881.055.210	1.024.223.014.000	76.950.740.000
Kab.Nganjuk	2016	447.729.508.596	323.045.177.742	1.078.695.643.000	282.445.514.114
Kab.Nganjuk	2017	390.863.779.724	308.555.890.313	1.137.289.603.378	386.935.852.000
Kab.Nganjuk	2018	276.195.966.841	329.469.629.273	1.059.746.429.000	239.626.355.000
Kab.Ngawi	2013	96.658.146.240	85.636.138.389	896.052.870.000	71.219.840.000
Kab.Ngawi	2014	243.988.354.559	169.237.013.272	980.530.132.000	65.997.050.000
Kab.Ngawi	2015	313.226.242.409	191.166.217.182	995.119.303.000	104.967.240.000
Kab.Ngawi	2016	355.374.670.586	195.606.461.847	1.058.208.375.000	335.763.929.383
Kab.Ngawi	2017	360.385.510.839	166.811.807.956	1.058.208.375.000	329.548.302.000
Kab.Ngawi	2018	301.841.155.318	180.775.429.818	1.039.619.057.000	350.463.435.000
Kab.Pacitan	2013	47.316.292.447	62.988.926.126	647.293.403.000	51.937.520.000
Kab.Pacitan	2014	200.429.181.165	101.276.945.022	700.743.024.000	51.869.860.000
Kab.Pacitan	2015	268.151.647.437	126.449.078.417	714.847.233.000	95.364.070.000
Kab.Pacitan	2016	379.166.997.217	150.466.067.821	807.907.686.000	222.388.548.658
Kab.Pacitan	2017	256.832.816.938	139.134.812.456	807.907.686.000	264.285.272.000

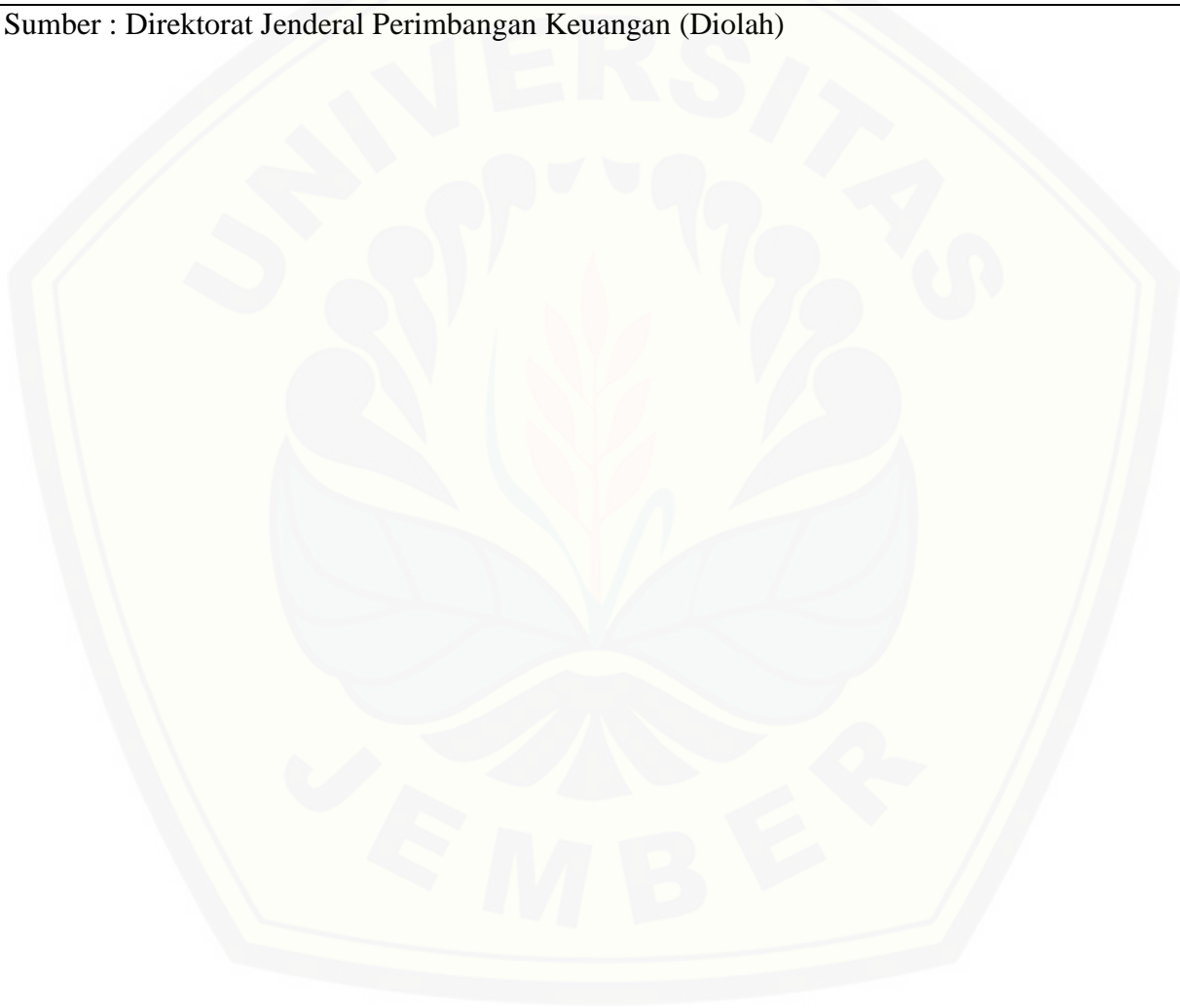
Daerah	Tahun	BelanjaModal	PAD	DAU	DAK
Kab.Pacitan	2018	263.109.814.614	155.224.528.463	793.715.346.000	282.439.181.000
Kab.Pamekasan	2013	146.584.700.198	89.462.536.536	702.610.217.000	97.071.780.000
Kab.Pamekasan	2014	240.818.085.179	171.518.204.167	788.617.777.000	101.518.990.000
Kab.Pamekasan	2015	447.685.501.909	170.258.936.684	817.903.633.000	143.369.090.000
Kab.Pamekasan	2016	544.165.819.579	178.478.890.964	862.935.567.000	346.060.851.131
Kab.Pamekasan	2017	426.722.923.737	146.871.696.103	862.935.567.000	377.160.980.000
Kab.Pamekasan	2018	381.801.236.469	163.640.118.924	849.764.469.000	289.125.691.000
Kab.Pasuruan	2013	181.925.899.262	278.165.169.902	992.689.474.000	77.421.870.000
Kab.Pasuruan	2014	326.767.786.480	421.442.629.861	83.588.340.000	259.640.748.200
Kab.Pasuruan	2015	464.634.017.141	478.269.057.788	1.089.359.282.000	72.940.100.000
Kab.Pasuruan	2016	838.440.054.782	480.758.720.671	1.200.611.830.000	356.153.803.649
Kab.Pasuruan	2017	511.280.692.555	498.908.320.334	1.265.828.188.512	399.698.888.000
Kab.Pasuruan	2018	403.685.976.766	572.573.271.057	1.179.777.625.000	415.805.647.000
Kab.Ponorogo	2013	63.871.761.818	134.097.320.781	890.922.311.000	65.307.550.000
Kab.Ponorogo	2014	176.983.715.062	198.730.421.480	970.788.118.000	65.691.470.000
Kab.Ponorogo	2015	324.169.328.852	210.695.348.135	993.319.105.000	89.213.600.000
Kab.Ponorogo	2016	376.402.638.867	240.111.321.574	1.062.582.799.000	325.256.416.313
Kab.Ponorogo	2017	383.445.795.955	225.131.830.350	1.062.582.799.000	368.334.225.000
Kab.Ponorogo	2018	425.940.533.008	235.841.311.850	1.043.916.636.000	434.500.671.000
Kab.Probolinggo	2013	108.855.533.744	108.513.200.489	848.994.313.000	62.235.420.000
Kab.Probolinggo	2014	219.199.470.248	195.263.627.246	929.380.602.000	69.707.430.000
Kab.Probolinggo	2015	343.189.339.904	207.370.345.161	956.969.595.000	78.887.940.000
Kab.Probolinggo	2016	289.647.660.708	221.719.364.518	977.570.137.000	248.073.366.798
Kab.Probolinggo	2017	291.024.654.259	219.687.300.522	977.570.137.000	308.263.287.000
Kab.Probolinggo	2018	255.549.272.303	220.813.229.602	967.345.237.000	302.118.249.000
Kab.Sampang	2013	93.121.541.955	66.415.376.671	683.242.704.000	105.384.510.000
Kab.Sampang	2014	354.056.721.368	123.039.103.223	753.954.218.000	91.197.080.000
Kab.Sampang	2015	630.156.763.506	142.512.555.663	788.345.170.000	204.576.570.000
Kab.Sampang	2016	563.999.688.976	135.785.953.318	827.952.746.000	328.941.810.494
Kab.Sampang	2017	363.121.216.315	133.545.721.725	887.917.797.172	198.499.971.000
Kab.Sampang	2018	336.766.424.147	137.245.157.950	825.443.163.000	294.215.735.000
Kab.Sidoarjo	2013	358.838.088.239	858.433.670.218	1.104.580.340.000	54.281.080.000
Kab.Sidoarjo	2014	691.163.487.699	1.115.332.938.500	1.199.036.154.000	58.852.358.000
Kab.Sidoarjo	2015	936.192.614.541	1.266.786.727.409	1.206.659.789.000	60.659.030.000
Kab.Sidoarjo	2016	809.997.501.058	1.335.283.958.793	1.225.261.302.000	307.378.513.663
Kab.Sidoarjo	2017	911.483.241.169	1.310.069.237.292	1.314.001.701.000	470.482.611.000
Kab.Sidoarjo	2018	864.949.138.425	1.431.052.747.437	1.203.737.401.000	449.063.507.000
Kab.Situbondo	2013	123.188.888.140	78.043.407.932	692.549.026.000	81.427.290.000

Daerah	Tahun	BelanjaModal	PAD	DAU	DAK
Kab.Situbondo	2014	325.053.037.623	129.640.577.934	766.542.999.000	92.072.040.000
Kab.Situbondo	2015	340.683.173.357	148.507.958.983	787.728.919.000	116.454.810.000
Kab.Situbondo	2016	416.863.544.279	173.836.184.925	821.084.393.000	276.737.866.782
Kab.Situbondo	2017	326.904.948.114	170.400.633.480	821.084.393.000	243.657.327.000
Kab.Situbondo	2018	257.815.875.354	185.007.911.643	894.774.430.000	143.876.634.000
Kab.Sumenep	2013	215.312.223.787	97.052.073.113	917.539.019.000	79.219.770.000
Kab.Sumenep	2014	277.785.358.232	162.371.865.154	984.839.445.000	63.570.200.000
Kab.Sumenep	2015	370.141.331.155	172.687.320.521	1.010.159.421.000	177.609.160.000
Kab.Sumenep	2016	272.014.575.159	208.982.186.961	1.110.487.853.000	281.373.415.107
Kab.Sumenep	2017	381.315.862.386	191.950.484.569	1.110.487.853.000	325.508.724.000
Kab.Sumenep	2018	309.511.716.236	221.296.639.290	1.110.487.853.000	330.554.920.000
Kab.Trenggalek	2013	77.778.968.541	77.799.518.146	737.814.627.000	64.974.660.000
Kab.Trenggalek	2014	280.962.369.854	132.951.069.332	815.508.143.000	61.684.690.000
Kab.Trenggalek	2015	327.136.709.459	155.254.334.899	839.497.985.000	84.488.400.000
Kab.Trenggalek	2016	362.840.294.381	182.174.291.709	901.379.781.000	250.011.514.267
Kab.Trenggalek	2017	322.717.358.755	175.917.809.821	901.379.781.000	277.455.574.000
Kab.Trenggalek	2018	275.212.277.995	199.000.000.000	885.545.437.000	306.254.458.000
Kab.Tuban	2013	122.780.509.210	227.120.525.358	849.399.312.000	49.173.770.000
Kab.Tuban	2014	362.402.236.927	291.079.944.393	926.685.197.000	48.566.930.000
Kab.Tuban	2015	386.655.657.749	345.965.620.446	955.939.873.000	66.605.040.000
Kab.Tuban	2016	464.180.160.121	364.133.296.890	1.046.758.509.000	278.716.212.843
Kab.Tuban	2017	412.846.032.126	327.384.245.109	1.103.617.667.914	329.627.478.000
Kab.Tuban	2018	473.465.947.912	378.158.981.063	1.028.370.328.000	323.807.112.000
Kab.Tulungagung	2013	87.067.204.359	174.981.706.538	996.300.694.000	71.687.640.000
Kab.Tulungagung	2014	315.546.166.050	276.577.973.500	1.083.859.022.000	73.752.100.000
Kab.Tulungagung	2015	444.587.079.517	309.646.333.189	1.111.457.117.000	110.360.560.000
Kab.Tulungagung	2016	574.341.318.491	342.570.756.799	1.172.557.802.000	477.440.235.291
Kab.Tulungagung	2017	279.933.125.939	300.115.595.404	1.257.481.115.000	393.073.418.000
Kab.Tulungagung	2018	367.722.972.745	359.281.145.891	1.151.959.732.000	471.895.459.000
KotaBatu	2013	98.178.280.857	59.544.940.728	374.362.261.000	23.431.815.000
KotaBatu	2014	136.626.885.534	80.493.920.959	412.378.255.000	30.351.360.000
KotaBatu	2015	281.882.302.047	104.233.584.925	413.219.693.000	41.314.385.000
KotaBatu	2016	174.368.708.327	109.533.498.034	480.460.016.000	93.063.615.752
KotaBatu	2017	167.854.286.399	124.057.978.289	480.460.016.000	87.743.632.000
KotaBatu	2018	117.709.764.982	143.500.209.241	474.881.106.000	90.110.089.000
KotaBlitar	2013	45.001.566.061	72.853.545.668	355.673.006.000	29.707.730.000
KotaBlitar	2014	126.326.327.563	102.757.907.576	392.221.911.000	23.097.660.000
KotaBlitar	2015	168.336.826.221	121.264.917.468	400.654.035.000	33.381.736.000

Daerah	Tahun	BelanjaModal	PAD	DAU	DAK
KotaBlitar	2016	203.371.880.396	131.920.190.721	428.743.959.000	137.391.098.119
KotaBlitar	2017	159.455.031.471	123.002.774.937	428.743.959.000	90.146.688.000
KotaBlitar	2018	203.746.024.903	140.058.770.620	421.212.306.000	126.977.123.000
KotaKediri	2013	118.087.856.803	144.562.729.327	562.943.089.000	29.999.610.000
KotaKediri	2014	153.549.052.146	207.529.193.679	634.351.539.000	26.235.240.000
KotaKediri	2015	174.462.849.355	221.927.133.610	634.461.169.000	27.423.652.000
KotaKediri	2016	381.845.509.730	238.318.315.508	617.780.644.000	98.911.475.000
KotaKediri	2017	295.719.469.622	202.308.331.248	640.152.240.170	118.537.553.000
KotaKediri	2018	133.582.806.235	225.912.159.759	606.928.225.000	62.230.922.000
KotaMadiun	2013	135.488.087.324	96.011.481.200	474.093.362.000	27.544.290.000
KotaMadiun	2014	201.533.941.749	134.584.344.293	511.089.913.000	31.922.300.000
KotaMadiun	2015	182.413.227.390	164.681.136.058	509.817.165.000	39.864.456.000
KotaMadiun	2016	246.394.704.721	173.235.929.828	511.375.289.000	140.847.099.356
KotaMadiun	2017	215.501.393.000	159.324.617.000	529.893.643.000	97.665.700.000
KotaMadiun	2018	245.072.557.980	196.797.930.337	502.392.070.000	77.420.525.000
KotaMalang	2013	144.272.064.765	317.772.985.191	746.686.937.000	30.315.710.000
KotaMalang	2014	318.462.052.422	372.545.396.292	808.447.825.000	31.304.060.000
KotaMalang	2015	337.647.558.967	424.938.755.525	818.758.893.000	20.590.560.000
KotaMalang	2016	193.667.164.391	477.541.556.465	859.678.208.000	94.813.827.000
KotaMalang	2017	301.774.150.344	409.473.763.216	859.678.208.000	197.460.865.000
KotaMalang	2018	314.071.921.527	486.330.772.375	844.576.426.000	202.636.120.000
KotaMojokerto	2013	61.269.605.576	74.944.029.536	354.452.407.000	19.389.310.000
KotaMojokerto	2014	141.591.947.931	105.277.492.018	380.779.789.000	18.556.553.000
KotaMojokerto	2015	135.968.848.097	129.258.132.763	382.373.637.000	24.089.454.000
KotaMojokerto	2016	303.737.103.331	152.462.202.065	397.094.498.000	103.431.033.000
KotaMojokerto	2017	241.443.033.300	163.307.274.780	397.094.498.000	82.758.699.000
KotaMojokerto	2018	199.436.793.100	200.642.757.500	390.118.825.000	85.000.428.000
KotaPasuruan	2013	26.436.576.196	66.110.651.059	353.127.853.000	25.890.580.000
KotaPasuruan	2014	108.978.646.061	100.647.029.803	391.843.124.000	28.041.850.000
KotaPasuruan	2015	159.178.160.741	114.734.243.910	399.095.322.000	32.176.832.000
KotaPasuruan	2016	172.508.745.500	147.818.815.719	432.090.225.000	92.196.898.895
KotaPasuruan	2017	295.752.336.750	129.627.447.315	447.737.442.000	95.639.430.000
KotaPasuruan	2018	247.471.465.949	139.467.647.062	424.499.789.000	151.989.086.000
KotaProbolinggo	2013	48.489.039.926	78.355.777.788	414.534.284.000	32.341.470.000
KotaProbolinggo	2014	106.923.357.839	135.062.805.888	454.208.196.000	24.483.458.000
KotaProbolinggo	2015	74.291.701.183	142.434.720.375	463.649.666.000	38.181.304.000
KotaProbolinggo	2016	147.705.780.026	171.307.335.437	470.212.966.000	83.332.171.500
KotaProbolinggo	2017	165.817.271.871	152.482.694.841	470.212.966.000	154.909.962.688

Daerah	Tahun	BelanjaModal	PAD	DAU	DAK
KotaProbolinggo	2018	194.049.721.209	167.525.785.311	461.952.836.000	119.366.208.000
KotaSurabaya	2013	799.075.102.176	2.791.580.050.710	1.160.025.693.000	29.928.308.000
KotaSurabaya	2014	1.404.366.425.421	3.307.323.863.978	1.200.889.359.000	19.854.669.000
KotaSurabaya	2015	1.785.125.255.500	4.035.649.478.398	1.147.385.486.000	7.125.690.000
KotaSurabaya	2016	1.789.394.044.827	4.090.206.769.388	1.233.380.404.000	294.850.212.000
KotaSurabaya	2017	2.663.386.532.200	4.212.569.176.921	1.345.040.944.092	458.989.128.000
KotaSurabaya	2018	2.706.625.635.129	4.712.856.394.887	1.211.713.876.000	440.719.310.000

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

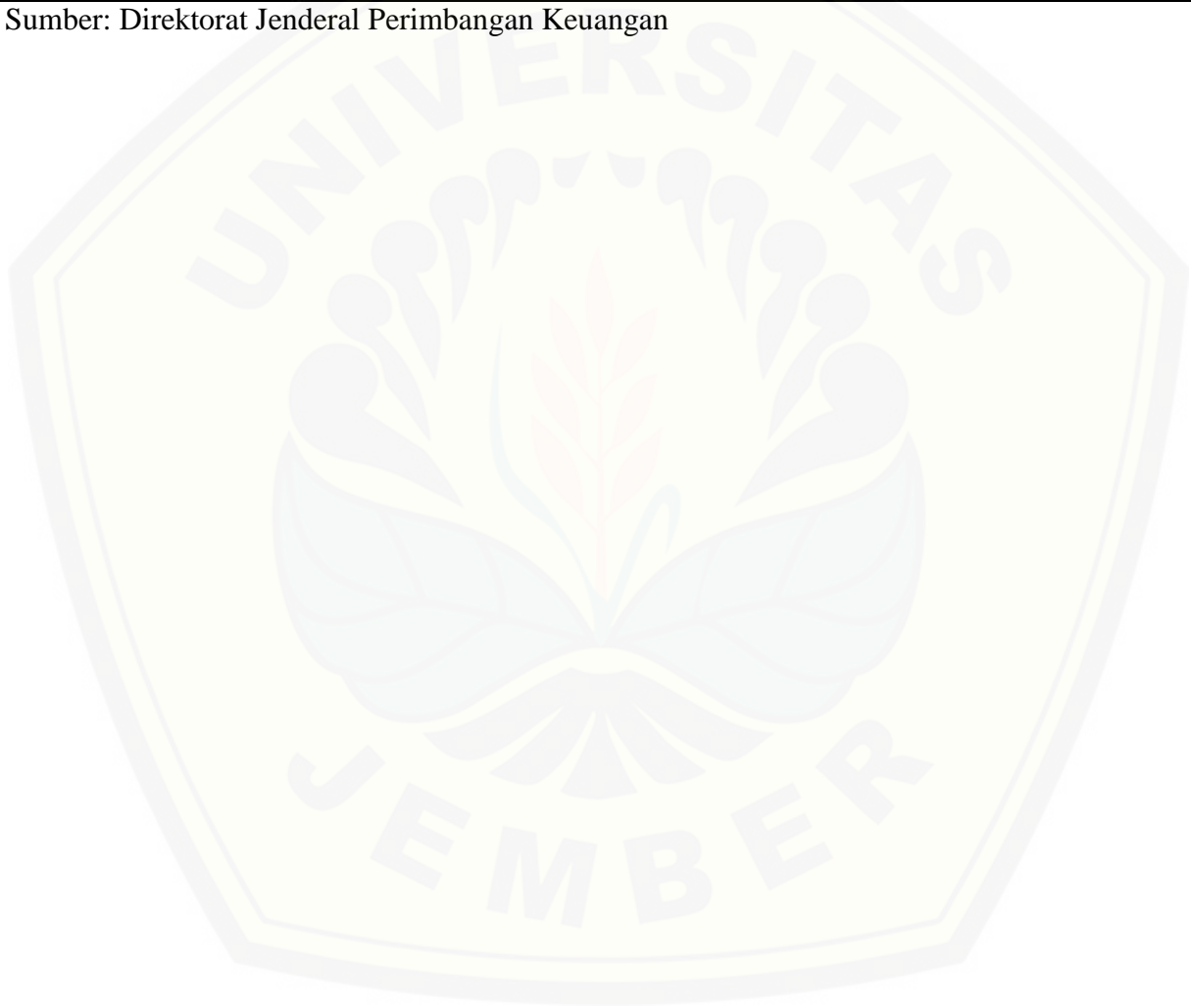


Lampiran 4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 (Juta Rupiah)

No	Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Bangkalan	92722.22	135785.49	175624.05	200083.20	191264.29	207660.71
2	Kab. Banyuwangi	183235.88	283488.70	346992.33	367872.67	388617.46	527381.38
3	Kab. Blitar	115670.86	188827.43	216648.26	224106.77	216039.71	224735.54
4	Kab. Bojonegoro	215766.16	291244.90	337695.83	340407.68	329003.73	368155.78
5	Kab. Bondowoso	79559.72	134684.70	158974.21	177025.95	153752.00	186418.20
6	Kab. Gresik	502767.03	700587.79	799884.87	715480.94	949661.51	947570.47
7	Kab. Jember	308376.58	440462.01	461882.36	524137.90	526360.21	589281.01
8	Kab. Jombang	185091.68	304065.30	363963.25	374141.19	344415.88	402072.29
9	Kab. Kediri	203212.45	295295.34	314229.58	339113.90	291321.44	452807.50
10	Kab. Lamongan	161087.92	272409.29	321667.13	403474.46	413033.14	471567.90
11	Kab. Lumajang	112406.82	194076.10	212585.09	242111.54	254660.84	264052.72
12	Kab. Madiun	83428.64	121390.77	149628.36	163635.27	179019.53	185513.46
13	Kab. Magetan	87859.71	141162.94	164564.90	165617.75	147000.00	165659.27
14	Kab. Malang	262267.26	411185.11	461887.70	502754.98	426295.77	489326.95
15	Kab. Mojokerto	219013.23	357924.99	414965.87	447620.85	436206.71	474788.91
16	Kab. Nganjuk	153130.12	255880.47	287881.06	323045.18	308555.89	329469.63
17	Kab. Ngawi	85636.14	169237.01	191166.22	195606.46	166811.81	180775.43
18	Kab. Pacitan	62988.93	101276.95	126449.08	150466.07	139134.81	155224.53
19	Kab. Pamekasan	89462.54	171518.20	170258.94	178478.89	146871.70	163640.12
20	Kab. Pasuruan	278165.17	421442.63	478269.06	480758.72	498908.32	572573.27
21	Kab. Ponorogo	134097.32	198730.42	210695.35	240111.32	225131.83	235841.31
22	Kab. Probolinggo	108513.20	195263.63	207370.35	221719.36	219687.30	220813.23
23	Kab. Sampang	66415.38	123039.10	142512.56	135785.95	133545.72	137245.16
24	Kab. Sidoarjo	858433.67	1115332.94	1266786.73	1335283.96	1310069.24	1431052.75
25	Kab. Situbondo	78043.41	129640.58	148507.96	173836.18	170400.63	185007.91
26	Kab. Sumenep	97052.07	162371.87	172687.32	208982.19	191950.48	221296.64
27	Kab. Trenggalek	77799.52	132951.07	155254.33	182174.29	175917.81	199000.00
28	Kab. Tuban	227120.53	291079.94	345965.62	364133.30	327384.25	378158.98
29	Kab. Tulungagung	174981.71	276577.97	309646.33	342570.76	300115.60	359281.15
30	Kota Batu	59544.94	80493.92	104233.58	109533.50	124057.98	143500.21
31	Kota Blitar	72853.55	102757.91	121264.92	131920.19	123002.77	140058.77
32	Kota Kediri	144562.73	207529.19	221927.13	238318.32	202308.33	225912.16
33	Kota Madiun	96011.48	134584.34	164681.14	173235.93	159324.62	196797.93
34	Kota Malang	317772.99	372545.40	424938.76	477541.56	409473.76	486330.77

35	Kota Mojokerto	74944.03	105277.49	129258.13	152462.20	163307.27	200642.76
36	Kota Pasuruan	66110.65	100647.03	114734.24	147818.82	129627.45	139467.65
37	Kota Probolinggo	78355.78	135062.81	142434.72	171307.34	152482.69	167525.79
38	Kota Surabaya	2791580.05	3307323.86	4035649.48	4090206.77	4212569.18	4712856.39
	Total	9006042.03	12563155.62	14573766.79	15412882.28	15237291.66	17139464.62
	Maksimum	2791580.05	3307323.86	4035649.48	4090206.77	4212569.18	4712856.39
	Minimum	59544.94	80493.92	104233.58	109533.50	123002.77	137245.16
	Rata-rata	237001.11	330609.36	383520.18	405602.17	400981.36	451038.54

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 5 Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 (Juta Rupiah)

No	Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Bangkalan	778024.11	854873.89	888673.43	1012242.53	1012242.53	994460.68
2	Kab. Banyuwangi	1154495.17	1254496.23	1288940.68	1400384.50	1400384.50	1375784.25
3	Kab. Blitar	944297.54	1027251.69	1037911.13	1128511.32	1189811.23	1109812.75
4	Kab. Bojonegoro	876021.91	920522.36	895987.11	949118.07	949118.07	932445.11
5	Kab. Bondowoso	752776.70	821583.71	862599.54	926596.44	976928.48	910319.12
6	Kab. Gresik	804903.51	863397.52	873265.96	923469.02	923469.02	909888.09
7	Kab. Jember	1417603.98	1539722.51	1586836.60	1709892.85	1895653.11	1709892.85
8	Kab. Jombang	920097.94	1007166.19	1032325.24	1111301.45	1111301.45	1091779.46
9	Kab. Kediri	1056481.08	1144878.53	1177392.30	1242230.78	1242230.78	1225331.64
10	Kab. Lamongan	958344.99	1042124.51	1064300.92	1166655.65	1166655.65	1146161.27
11	Kab. Lumajang	828524.53	898217.63	923492.40	990248.41	990248.41	972852.93
12	Kab. Madiun	734152.39	808842.79	832357.22	893565.76	893565.76	877868.69
13	Kab. Magetan	761637.39	840086.60	856278.52	916052.44	916052.44	899960.34
14	Kab. Malang	1439234.03	1572191.57	1613161.78	1694884.66	1694884.66	1665195.90
15	Kab. Mojokerto	832266.68	899109.18	923747.63	991180.36	1062967.29	973768.51
16	Kab. Nganjuk	928265.61	1004037.76	1024223.01	1078695.64	1137289.60	1059746.43
17	Kab. Ngawi	896052.87	980530.13	995119.30	1058208.38	1058208.38	1039619.06
18	Kab. Pacitan	647293.40	700743.02	714847.23	807907.69	807907.69	793715.35
19	Kab. Pamekasan	702610.22	788617.78	817903.63	862935.57	862935.57	849764.47
20	Kab. Pasuruan	992689.47	83588.34	1089359.28	1200611.83	1265828.19	1179777.63
21	Kab. Ponorogo	890922.31	970788.12	993319.11	1062582.80	1062582.80	1043916.64
22	Kab. Probolinggo	848994.31	929380.60	956969.60	977570.14	977570.14	967345.24
23	Kab. Sampang	683242.70	753954.22	788345.17	827952.75	887917.80	825443.16
24	Kab. Sidoarjo	1104580.34	1199036.15	1206659.79	1225261.30	1314001.70	1203737.40
25	Kab. Situbondo	692549.03	766543.00	787728.92	821084.39	821084.39	894774.43
26	Kab. Sumenep	917539.02	984839.45	1010159.42	1110487.85	1110487.85	1110487.85
27	Kab. Trenggalek	737814.63	815508.14	839497.99	901379.78	901379.78	885545.44
28	Kab. Tuban	849399.31	926685.20	955939.87	1046758.51	1103617.67	1028370.33
29	Kab. Tulungagung	996300.69	1083859.02	1111457.12	1172557.80	1257481.12	1151959.73
30	Kota Batu	374362.26	412378.26	413219.69	480460.02	480460.02	474881.11
31	Kota Blitar	355673.01	392221.91	400654.04	428743.96	428743.96	421212.31
32	Kota Kediri	562943.09	634351.54	634461.17	617780.64	640152.24	606928.23
33	Kota Madiun	474093.36	511089.91	509817.17	511375.29	529893.64	502392.07
34	Kota Malang	746686.94	808447.83	818758.89	859678.21	859678.21	844576.43

35	Kota Mojokerto	354452.41	380779.79	382373.64	397094.50	397094.50	390118.83
36	Kota Pasuruan	353127.85	391843.12	399095.32	432090.23	447737.44	424499.79
37	Kota Probolinggo	414534.28	454208.20	463649.67	470212.97	470212.97	461952.84
38	Kota Surabaya	1160025.69	1200889.36	1147385.49	1233380.40	1345040.94	1211713.88
Total		30943014.78	32668785.74	34318214.95	36641144.88	37592819.97	36168000.19
Maksimum		1439234.03	1572191.57	1613161.78	1709892.85	1895653.11	1709892.85
Minimum		353127.85	83588.34	382373.64	397094.50	397094.50	390118.83
Rata-rata		814289.86	859704.89	903110.92	964240.65	989284.74	951789.48

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

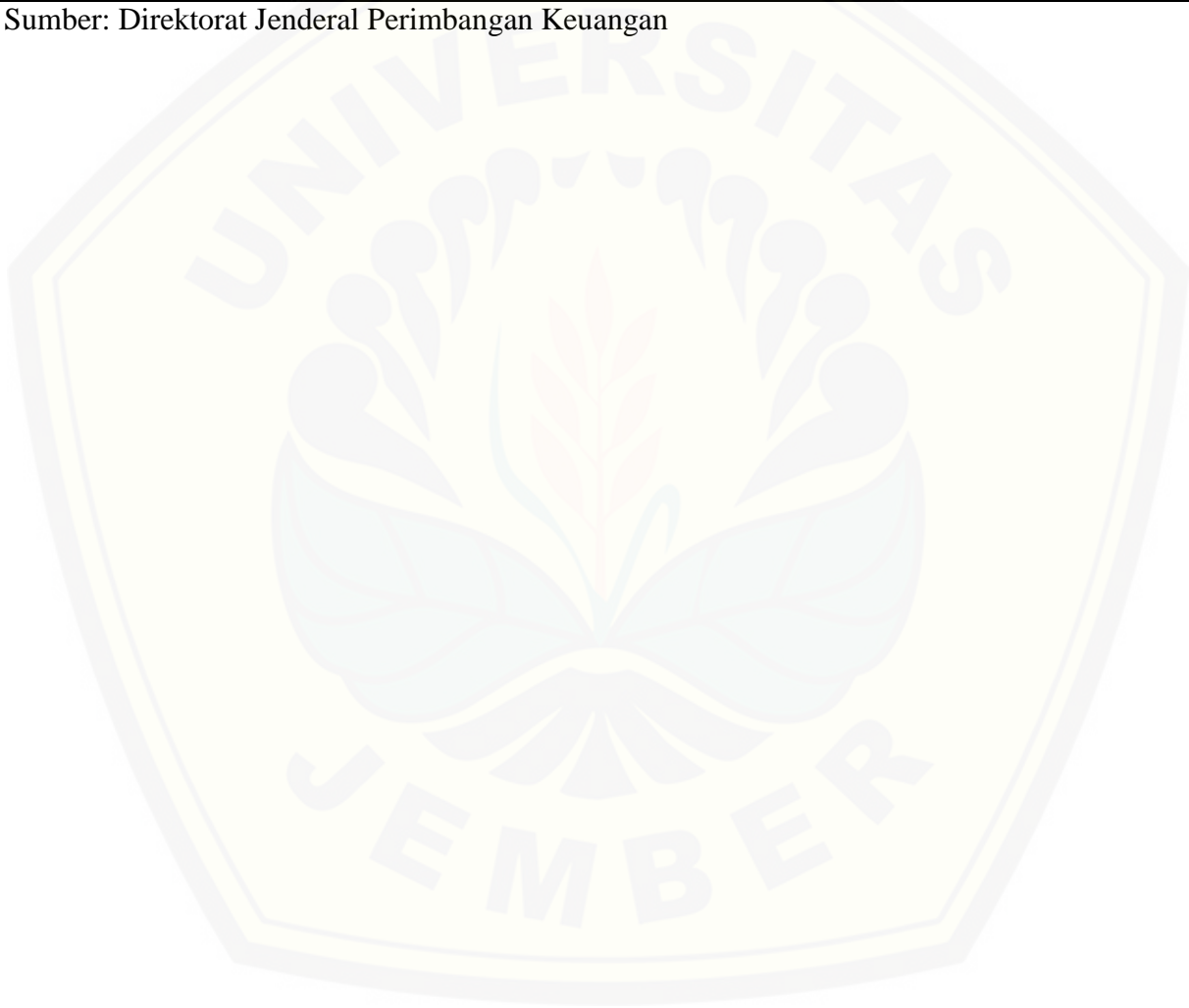


Lampiran 6 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 (Juta Rupiah)

No	Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Bangkalan	105241.40	98985.48	211121.74	253397.90	354197.44	308314.58
2	Kab. Banyuwangi	76997.76	48040.23	126464.24	357337.50	358964.22	442593.44
3	Kab. Blitar	70322.56	71417.13	142410.07	402370.81	377435.26	410166.12
4	Kab. Bojonegoro	46545.62	44549.38	67346.18	135279.27	126970.39	150255.88
5	Kab. Bondowoso	80710.60	91063.07	122444.58	299830.71	347784.91	329660.78
6	Kab. Gresik	49106.18	72051.26	110844.78	263751.19	320180.70	351571.56
7	Kab. Jember	74410.89	87951.09	199158.01	430502.55	547283.20	547283.20
8	Kab. Jombang	43717.04	47292.08	63325.13	282844.54	369279.74	364091.78
9	Kab. Kediri	69281.81	51359.51	75493.74	308559.51	403599.94	424784.59
10	Kab. Lamongan	75665.88	77845.00	154244.85	443757.06	423408.48	454502.07
11	Kab. Lumajang	44000.69	51943.37	74273.11	226586.90	311517.16	330053.55
12	Kab. Madiun	51129.00	62841.12	128123.73	332025.74	305865.89	320302.61
13	Kab. Magetan	46164.37	58964.98	79395.67	264423.45	264424.62	306065.59
14	Kab. Malang	112312.35	130050.58	153350.44	468164.70	551346.52	588244.33
15	Kab. Mojokerto	35577.55	55556.66	83127.25	243361.29	332005.55	369033.60
16	Kab. Nganjuk	59433.92	50838.97	76950.74	282445.51	386935.85	239626.36
17	Kab. Ngawi	71219.84	65997.05	104967.24	335763.93	329548.30	350463.44
18	Kab. Pacitan	51937.52	51869.86	95364.07	222388.55	264285.27	282439.18
19	Kab. Pamekasan	97071.78	101518.99	143369.09	346060.85	377160.98	289125.69
20	Kab. Pasuruan	77421.87	259640.75	72940.10	356153.80	399698.89	415805.65
21	Kab. Ponorogo	65307.55	65691.47	89213.60	325256.42	368334.23	434500.67
22	Kab. Probolinggo	62235.42	69707.43	78887.94	248073.37	308263.29	302118.25
23	Kab. Sampang	105384.51	91197.08	204576.57	328941.81	198499.97	294215.74
24	Kab. Sidoarjo	54281.08	58852.36	60659.03	307378.51	470482.61	449063.51
25	Kab. Situbondo	81427.29	92072.04	116454.81	276737.87	243657.33	143876.63
26	Kab. Sumenep	79219.77	63570.20	177609.16	281373.42	325508.72	330554.92
27	Kab. Trenggalek	64974.66	61684.69	84488.40	250011.51	277455.57	306254.46
28	Kab. Tuban	49173.77	48566.93	66605.04	278716.21	329627.48	323807.11
29	Kab. Tulungagung	71687.64	73752.10	110360.56	477440.24	393073.42	471895.46
30	Kota Batu	23431.82	30351.36	41314.39	93063.62	87743.63	90110.09
31	Kota Blitar	29707.73	23097.66	33381.74	137391.10	90146.69	126977.12
32	Kota Kediri	29999.61	26235.24	27423.65	98911.48	118537.55	62230.92
33	Kota Madiun	27544.29	31922.30	39864.46	140847.10	97665.70	77420.53
34	Kota Malang	30315.71	31304.06	20590.56	94813.83	197460.87	202636.12

35	Kota Mojokerto	19389.31	18556.55	24089.45	103431.03	82758.70	85000.43
36	Kota Pasuruan	25890.58	28041.85	32176.83	92196.90	95639.43	151989.09
37	Kota Probolinggo	32341.47	24483.46	38181.30	83332.17	154909.96	119366.21
38	Kota Surabaya	29928.31	19854.67	7125.69	294850.21	458989.13	440719.31
	Total	2220509.14	2438718.00	3537717.94	10167772.53	11450647.59	11687120.54
	Maksimum	112312.35	259640.75	211121.74	477440.24	551346.52	588244.33
	Minimum	19389.31	18556.55	7125.69	83332.17	82758.70	62230.92
	Rata-rata	58434.45	64176.79	93097.84	267572.96	301332.83	307555.80

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

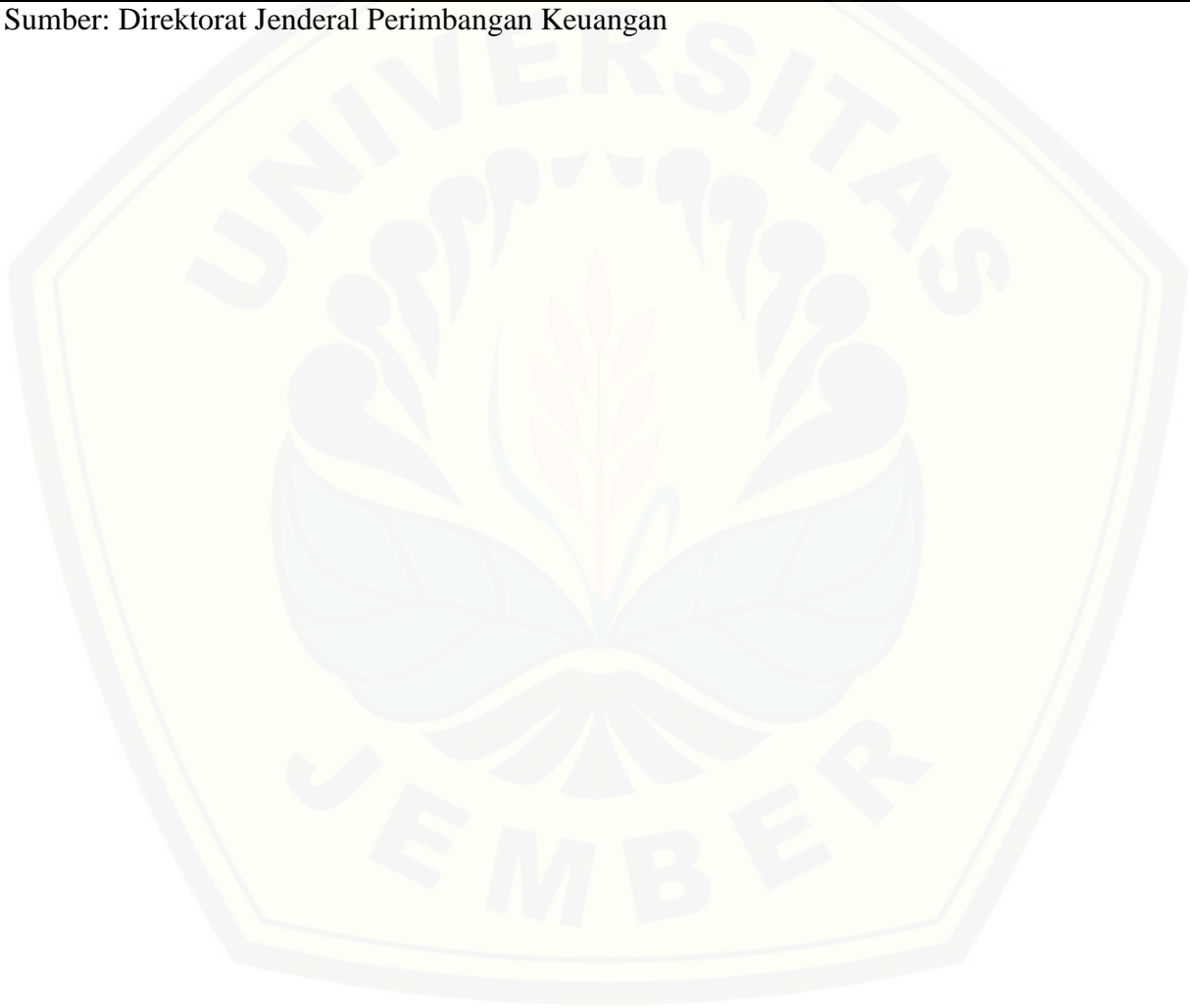


Lampiran 7 Belanja Modal (BM) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 (Juta Rupiah)

No	Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Bangkalan	113533.58	331828.63	480529.38	412823.44	375711.26	337975.18
2	Kab. Banyuwangi	196931.72	558546.68	699415.75	911584.33	776793.14	559254.60
3	Kab. Blitar	141596.25	385260.45	508331.95	692718.77	529370.75	469649.37
4	Kab. Bojonegoro	363653.57	537686.80	594229.18	967917.01	667711.51	734821.30
5	Kab. Bondowoso	96091.91	311495.49	404576.53	425425.09	409242.15	219665.83
6	Kab. Gresik	235946.73	523804.90	584223.68	413339.66	594467.45	515442.09
7	Kab. Jember	285644.50	537521.26	556408.89	460451.30	535010.49	656502.03
8	Kab. Jombang	226904.72	355049.12	403219.79	364901.76	354732.63	270239.64
9	Kab. Kediri	234891.82	325197.09	457787.62	612052.14	622196.54	553918.41
10	Kab. Lamongan	57326.30	353435.62	459305.79	616499.72	407084.79	515785.29
11	Kab. Lumajang	164721.38	236756.74	242225.16	347885.60	323230.48	358019.22
12	Kab. Madiun	117395.79	239470.37	327742.40	443808.27	360780.15	297159.85
13	Kab. Magetan	99940.78	190932.56	239657.46	286943.95	224892.46	213205.93
14	Kab. Malang	105440.32	501503.67	714192.90	683932.35	581999.86	777905.34
15	Kab. Mojokerto	187065.60	365470.00	491829.69	442333.41	615019.54	448222.07
16	Kab. Nganjuk	155743.04	277439.46	361295.98	447729.51	390863.78	276195.97
17	Kab. Ngawi	96658.15	243988.35	313226.24	355374.67	360385.51	301841.16
18	Kab. Pacitan	47316.29	200429.18	268151.65	379167.00	256832.82	263109.81
19	Kab. Pamekasan	146584.70	240818.09	447685.50	544165.82	426722.92	381801.24
20	Kab. Pasuruan	181925.90	326767.79	464634.02	838440.05	511280.69	403685.98
21	Kab. Ponorogo	63871.76	176983.72	324169.33	376402.64	383445.80	425940.53
22	Kab. Probolinggo	108855.53	219199.47	343189.34	289647.66	291024.65	255549.27
23	Kab. Sampang	93121.54	354056.72	630156.76	563999.69	363121.22	336766.42
24	Kab. Sidoarjo	358838.09	691163.49	936192.61	809997.50	911483.24	864949.14
25	Kab. Situbondo	123188.89	325053.04	340683.17	416863.54	326904.95	257815.88
26	Kab. Sumenep	215312.22	277785.36	370141.33	272014.58	381315.86	309511.72
27	Kab. Trenggalek	77778.97	280962.37	327136.71	362840.29	322717.36	275212.28
28	Kab. Tuban	122780.51	362402.24	386655.66	464180.16	412846.03	473465.95
29	Kab. Tulungagung	87067.20	315546.17	444587.08	574341.32	279933.13	367722.97
30	Kota Batu	98178.28	136626.89	281882.30	174368.71	167854.29	117709.76
31	Kota Blitar	45001.57	126326.33	168336.83	203371.88	159455.03	203746.02
32	Kota Kediri	118087.86	153549.05	174462.85	381845.51	295719.47	133582.81
33	Kota Madiun	135488.09	201533.94	182413.23	246394.70	215501.39	245072.56
34	Kota Malang	144272.06	318462.05	337647.56	193667.16	301774.15	314071.92

35	Kota Mojokerto	61269.61	141591.95	135968.85	303737.10	241443.03	199436.79
36	Kota Pasuruan	26436.58	108978.65	159178.16	172508.75	295752.34	247471.47
37	Kota Probolinggo	48489.04	106923.36	74291.70	147705.78	165817.27	194049.72
38	Kota Surabaya	799075.10	1404366.43	1785125.26	1789394.04	2663386.53	2706625.64
	Total	5982425.95	12744913.44	16420888.28	18390774.86	17503824.67	16483101.15
	Maksimum	799075.10	1404366.43	1785125.26	1789394.04	2663386.53	2706625.64
	Minimum	26436.58	106923.36	74291.70	147705.78	159455.03	117709.76
	Rata-rata	157432.26	335392.46	432128.64	483967.76	460626.96	433765.82

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 8 Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: MODEL3				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	68.438430	3	0.0000	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD	0.937095	0.451594	0.003745	0.0000
DAU	0.307210	0.151413	0.006135	0.0467
DAK	0.137066	0.423452	0.001729	0.0000
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: BM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/16/19 Time: 22:56				
Sample: 2013 2018				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 38				
Total panel (balanced) observations: 228				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-266741.577757.49	-3.4304290.0007		
PAD	0.937095	0.064521	14.52382	0.0000
DAU	0.307210	0.090171	3.406968	0.0008
DAK	0.137066	0.072796	1.882882	0.0613
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.920025	Mean dependent var	383885.7	
Adjusted R-squared	0.902918	S.D. dependent var	326314.7	
S.E. of regression	101673.0	Akaike info criterion	26.05832	
Sum squared resid	1.93E+12	Schwarz criterion	26.67500	
Log likelihood	-2929.649	Hannan-Quinn criter.	26.30714	
F-statistic	53.78086	Durbin-Watson stat	1.910740	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 9 Hasil Uji *Multikolinieritas*

	PAD	DAU	DAK
PAD	1.000000	0.321281	0.174505
DAU	0.321281	1.000000	0.567817
DAK	0.174505	0.567817	1.000000

Lampiran 10 Hasil Uji *Heteroskedastisitas*

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/24/19 Time: 16:47
 Sample: 2013 2018
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36222.51	28178.55	1.285464	0.2002
PAD	-0.024779	0.023382	-1.059761	0.2906
DAU	0.019723	0.032677	0.603586	0.5469
DAK	0.015570	0.026380	0.590209	0.5558

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.411350	Mean dependent var	47956.87
Adjusted R-squared	0.285436	S.D. dependent var	43587.43
S.E. of regression	36845.29	Akaike info criterion	24.02826
Sum squared resid	2.54E+11	Schwarz criterion	24.64494
Log likelihood	-2698.221	Hannan-Quinn criter.	24.27707
F-statistic	3.266900	Durbin-Watson stat	2.591257
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 11 Hasil Regresi dengan *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: BM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/29/19 Time: 15:22
 Sample: 2013 2018
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-266741.5	77757.49	-3.430429	0.0007
PAD	0.937095	0.064521	14.52382	0.0000
DAU	0.307210	0.090171	3.406968	0.0008
DAK	0.137066	0.072796	1.882882	0.0613

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.920025	Mean dependent var	383885.7
Adjusted R-squared	0.902918	S.D. dependent var	326314.7
S.E. of regression	101673.0	Akaike info criterion	26.05832
Sum squared resid	1.93E+12	Schwarz criterion	26.67500
Log likelihood	-2929.649	Hannan-Quinn criter.	26.30714
F-statistic	53.78086	Durbin-Watson stat	1.910740
Prob(F-statistic)	0.000000		

Fixed Effect (Cross)

Kab. Bangkalan	138040.4
Kab. Banyuwangi	120816.7
Kab. Blitar	172701.9
Kab. Bojonegoro	321259.5
Kab. Bondowoso	140861.1
Kab. Gresik	-274275.8
Kab. Jember	-221125.6
Kab. Jombang	-60326.91
Kab. Kediri	44898.30
Kab. Lamongan	-23102.71
Kab. Lumajang	35017.52
Kab. Madiun	141124.5
Kab. Magetan	50805.49



Kab. Malang	-112652.0
Kab. Mojokerto	8085.550
Kab. Nganjuk	-18136.22
Kab. Ngawi	53452.48
Kab. Pacitan	136582.8
Kab. Pamekasan	206601.2
Kab. Pasuruan	-38907.52
Kab. Ponorogo	24912.57
Kab. Probolinggo	20609.30
Kab. Sampang	269592.5
Kab. Sidoarjo	-517313.2
Kab. Situbondo	160135.0
Kab. Sumenep	57981.45
Kab. Trenggalek	112980.1
Kab. Tuban	7407.857
Kab. Tulungagung	-47099.05
Kota Batu	189148.8
Kota Blitar	175378.4
Kota Kediri	84956.37
Kota Madiun	161659.5
Kota Malang	-119627.5
Kota Mojokerto	192852.2
Kota Pasuruan	190958.5
Kota Probolinggo	106943.6
Kota Surabaya	-1893197.

Lampiran 12 Surat Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
Telepon: (0331)- 330224, 334267, 337422, 333147 * Faximile: 0331-339029
Laman: www.fkip.unej.ac.id

Nomor : **0609**/UN25.1.5/LT/2018
Lampiran : 1
Hal : Permohonan Data

21 JAN 2019

Yth. Kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710
Jakarta

Dengan hormat, sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember di bawah ini :

Nama : Ahmad Dalail
NIM : 150210301011
Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018

Bermaksud melakukan permintaan data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Untuk maksud di atas, dimohon kesediaan Saudara agar dapat memberikan mahasiswa kami data yang diperlukan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota yang tercantum dalam APBD (data rincian kota terlampir) pada tahun 2017 dan 2018 (satu tahun) dalam rangka penyelesaian studinya

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih



NIP. 19670625 199203 1 003

Lampiran

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur

1	Kab. Bangkalan	20	Kab. Pasuruan
2	Kab. Banyuwangi	21	Kab. Ponorogo
3	Kab. Blitar	22	Kab. Probolinggo
4	Kab. Bojonegoro	23	Kab. Sampang
5	Kab. Bondowoso	24	Kab. Sidoarjo
6	Kab. Gresik	25	Kab. Situbondo
7	Kab. Jember	26	Kab. Sumenep
8	Kab. Jombang	27	Kab. Trenggalek
9	Kab. Kediri	28	Kab. Tuban
10	Kab. Lamongan	29	Kab. Tulungagung
11	Kab. Lumajang	30	Kota Blitar
12	Kab. Madiun	31	Kota Kediri
13	Kab. Magetan	32	Kota Madiun
14	Kab. Malang	33	Kota Malang
15	Kab. Mojokerto	34	Kota Mojokerto
16	Kab. Nganjuk	35	Kota Pasuruan
17	Kab. Ngawi	36	Kota Probolinggo
18	Kab. Pacitan	37	Kota Surabaya
19	Kab. Pamekasan	38	Kota Batu

No kontak : 081252787234

Email : ahmaddalail31097@gmail.com

Lampiran 13 Surat Konfirmasi dari DJPK



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI**

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 11, JALAN DR.WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON ((021) 3449230 (20 SALURAN) PESAWAT 6348, 3500849; FAKSIMILE (021) 3500847; SITUS www.kemenkeu.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi

Tanggal : 25 Februari 2019

No. Pendaftaran : 99/PPID.KK/2019

Kami menyampaikan kepada Saudara/i

Nama : Ahmad Dalail

Alamat : Dusun Serbet, Rt 008 Rw 001, Desa Purwosono, Lumajang

No. Telp/Fax/Email : 081252787234 / / ahmaddalail31097@gmail.com

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan:

No.	Hal-hal Terkait Permohonan Informasi	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik*	<input type="checkbox"/> Tidak Tersedia <input checked="" type="checkbox"/> Tersedia
2.	Bentuk informasi yang tersedia*	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Softcopy/elektronik</i> <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i>
3.	Waktu penyediaan	9 Hari
4.	Penjelasan/penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**(tambahkan kertas bila perlu)	

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:*

<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, didasarkan pada alasan sebagaimana penjelasan terlampir.
<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta tidak ada di Satuan Kerja kewenangan PPID.
<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta belum didokumentasikan.
<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta belum selesai didokumentasikan.

Jakarta, 7 Februari 2019

**Kepala Biro Komunikasi dan Layanan
Informasi
selaku
PPID Kementerian Keuangan**



Wufransa Wira Sakti ↓

Keterangan

* Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓).

** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

2

**Tanggapan Atas Permohonan Informasi Publik a.n. Sdr. Ahmad Dalail
Nomor Pendaftaran 99/PPID.KK/2019**

Berkenaan dengan informasi publik yang Saudara ajukan kepada PPID Kementerian Keuangan pada tanggal 25 Januari 2019, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Informasi yang diminta sebagaimana tertulis pada Formulir Permohonan Informasi Publik:

"Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan Belanja modal pada kabupaten dan kota di provinsi jawa timur tahun 2017 dan 2018."

2. Atas permohonan informasi publik Saudara sebagaimana angka satu di atas, perlu kami informasikan bahwa informasi mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 dan 2018 tersedia pada tautan <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Catatan:

Segala akibat hukum dari perlakuan data/informasi ini setelah keluar dari kantor Kementerian Keuangan, menjadi tanggung jawab Pemohon/peminta data.

Lampiran 14 Lembar Konsultasi



KEMENTERIAN RISTEK DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Kalimantan III/3 Kampus Tegalboto Kotak Pos 162
Telp./Fax (0331) 334988 Jember 68121

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Dalail
NIM/ Angkatan : 150210301011/ 2015
Jurusan/ Prog. Studi : IPS/Pendidikan Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan
Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran
Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa
Timur Tahun 2013-2018
Pembimbing I : Dr. Sukidin, M.Pd.

KEGIATAN KONSULTASI

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	TT. Pembimbing I
1.	Sumat, 11-12-2019	ACC Sudul	<i>[Signature]</i>
2.	Senin, 14-1-2019	Konsultasi BAB I	<i>[Signature]</i>
3.	Sumat, 18-1-2019	Revisi BAB I	<i>[Signature]</i>
4.	Senin, 21-1-2019	Konsultasi BAB I, BAB II	<i>[Signature]</i>
5.	Sumat, 25-1-2019	Revisi BAB II dan BAB III	<i>[Signature]</i>
6.	Senin, 28-1-2019	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>
7.			
8.			
9.	Selasa, 21-5-2019	BAB IV, V	<i>[Signature]</i>
10.	Kamis, 13-6-2019	BAB IV, V	<i>[Signature]</i>
11.	Sumat, 21-6-2019	BAB IV, V. Lampiran	<i>[Signature]</i>
12.	Kamis, 27-6-2019	BAB IV, V. Lampiran	<i>[Signature]</i>
13.	Sumat, 28-6-2019	Lampiran	<i>[Signature]</i>
14.	Senin, 1-7-2019	Lampiran	<i>[Signature]</i>
15.			<i>[Signature]</i>

Catatan:

1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi.
2. Lembar ini harus dibawa sewaktu Seminar Proposal Skripsi dan Ujian Skripsi



KEMENTERIAN RISTEK DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Kalimantan III/3 Kampus Tegalboto Kotak Pos 162
Telp./Fax (0331) 334988 Jember 68121

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Dalail
NIM/ Angkaran : 150210301011/ 2015
Jurusan/ Prog. Studi : IPS/Pendidikan Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018
Pembimbing II : Wiwin Hartanto, S.Pd., M.Pd.

KEGIATAN KONSULTASI

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	TT. Pembimbing II
1.	Semin, 12-11-2018	ACC judul	
2.	Selasa, 4-12-2018	BAB I	
3.	Kamis, 20-12-2018	Revisi BAB I	
4.	Kamis, 3-1-2019	BAB II	
5.	Kamis, 10-1-2019	Revisi BAB II	
6.	Selasa, 22-1-2019	BAB III	
7.	Selasa, 29-1-2019	Revisi BAB III	
8.		ACC judul	
9.	Rabu, 22-5-2019	BAB IV, V	
10.	Rabu, 12-6-2019	BAB IV, V	
11.	Kamis, 20-6-2019	BAB IV, V, Campiran	
12.	Senin, 24-6-2019	BAB IV, V, Campiran	
13.	Sabtu, 29-6-2019	Ringkasan	
14.	Senin, 1-7-2019	Ringkasan	
15.		ACC judul	

Catatan:

- Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi.
- Lembar ini harus dibawa sewaktu Semina, Proposal Skripsi dan Ujian Skripsi

Lampiran 15 Tabel Nilai Distribusi t

df	$\alpha = 0,1$	$\alpha = 0,05$
220	1.285411	1.651809
221	1.285394	1.651778
222	1.285377	1.651746
223	1.285359	1.651715
224	1.285342	1.651685
225	1.285325	1.651654
226	1.285309	1.651624
227	1.285292	1.651594
228	1.285276	1.651564
229	1.285259	1.651535
230	1.285243	1.651506
231	1.285227	1.651477
232	1.285211	1.651448
233	1.285196	1.651420
234	1.285180	1.651391
235	1.285164	1.651364
236	1.285149	1.651336
237	1.285134	1.651308
238	1.285119	1.651281
239	1.285104	1.651254

Sumber: Kurniawan, 2008

Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas**

1. Nama : Ahmad Dalail
2. Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 03 Oktober 1997
3. Agama : Islam
4. Status : Belum menikah
5. Nama Ayah : Mohammad Holil
6. Nama Ibu : Indayanti
7. Alamat : Dsn Serbet, RT/RW 008/001 Ds.
Purwosono, Kec. Sumbersuko, Lumajang
8. Alamat di Jember : Jl. Bangka 3 no. 19
9. Email : ahmaddalail31097@gmail.com

B. Pendidikan

NO.	NAMA SEKOLAH	TEMPAT	TAHUN LULUS
1.	SDN Citrosiwangsan 2	Kec. Lumajang-Lumajang	2009
2.	SMPN 5 Lumajang	Kec. Lumajang-Lumajang	2012
3.	SMAN 3 Lumajang	Kec. Lumajang-Lumajang	2015
4.	Universitas Jember	Sumbersari-Jember	2019